



Centre international  
d'éducation aux droits humains  
International Centre for  
Human Rights Education



Direktorat Jenderal  
Perlindungan HAM  
Departemen Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia

## **Memperkuat Kapasitas Panitia RANHAM NAD untuk Melaksanakan RANHAM**

**Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam**

**Indonesia**

**14-17 November 2006**

**Panduan Lokakarya**

Equitas  
666 Sherbrooke St. West, Suite 1100  
Montréal (Québec), H3A 1E7  
Canada

Tel. : (514) 954-0382  
Fax. : (514) 954-0659  
E-mail : [info@equitas.org](mailto:info@equitas.org)  
Web site: [www.equitas.org](http://www.equitas.org)

© 2006 Equitas

Seluruh bagian dari manual ini dapat direproduksi untuk penggunaan dalam pendidikan Hak Asasi Manusia dengan menyatakan sumbernya serta memberi tahu penggunaannya kepada Equitas.

Pendapat yang dinyatakan dalam publikasi ini adalah pendapat dari penciptanya dan tidak mewakili pendapat atau posisi dari penyandang dana kegiatan ini.

# Daftar Isi

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
Latar Belakang .....	5
Tujuan dan Sasaran.....	5
Peserta .....	6
Metodologi .....	6
Mitra-Mitra dari Kanada.....	6
<b>MODUL 1 MENYIAPKAN KONTEKS.....</b>	<b>11</b>
Kegiatan 1 Acara Pembukaan.....	13
Kegiatan 2 Pendahuluan dan Harapan-Harapan Lokakarya .....	14
<i>Lembar Rujukan 1: Topik dan Keterampilan yang akan dibahas pada Lokakarya ini sesuai dengan yang telah diidentifikasi oleh Para Peserta .....</i>	<i>16</i>
Kegiatan 3 Tinjauan Umum Lokakarya, Sasaran-sasaran dan Metodologi.....	18
<i>Lembar Rujukan 2: Kerangka Kerja Lokakarya .....</i>	<i>20</i>
Kegiatan 4 Isu-isu HAM di NAD saat Ini .....	21
<i>Lembar Kerja 1: Isu-isu HAM di NAD.....</i>	<i>23</i>
<b>MODUL 2 STATUS RANHAM SAAT INI.....</b>	<b>27</b>
Kegiatan 1 RANHAM Saat Ini: Tinjauan Umum tentang Sasaran-sasaran, Capaian dan Keberhasilan.....	29
<i>Lembar Rujukan 3: Diseminasi RANHAM dan Pendidikan Hak Asasi Manusia.....</i>	<i>31</i>
Kegiatan 2 Peran Panitia RANHAM NAD .....	34
<i>Lembar Kerja 2: Peran Panitia RANHAM NAD .....</i>	<i>37</i>
<i>Lembar Rujukan 4: Kebutuhan Pendidikan dari Panitia RANHAM NAD .....</i>	<i>38</i>
<i>Lembar Rujukan 5: Keberhasilan dan Tantangan yang Diidentifikasi dalam Pelaksanaan Kerja yang Berhubungan dengan RANHAM.....</i>	<i>39</i>
<i>Lembar Kerja 3: NAD RANHAM Committee Best Practices .....</i>	<i>40</i>
Kegiatan 3 Kelompok Diskusi Terfokus – Menciptakan Panitia RANHAM NAD yang Dinamis .....	41
<i>Lembar Rujukan 6: Bagaimana Menyelenggarakan Sebuah Kelompok Terfokus .....</i>	<i>43</i>
<i>Lembar Rujukan 7: Analisa SWOT .....</i>	<i>44</i>
<i>Lembar kerja 4: Catatan-catatan Kelompok Terfokus.....</i>	<i>45</i>

<b>MODUL 3 MENGANALISA KERJA HAM DI DALAM RANHAM.....</b>	<b>47</b>
Kegiatan 1 Merumuskan Pemahaman Bersama tentang Pendidikan Hak Asasi Manusia.....	49
<i>Lembar Rujukan 8: Rumusan Pendidikan HAM.....</i>	<i>51</i>
Kegiatan 2 RANHAM dan Perubahan Sosial – Pendidikan HAM yang efektif untuk Perubahan Sosial .....	53
<i>Lembar Rujukan 9: Pembelajaran Transformatif.....</i>	<i>55</i>
<i>Lembar Rujukan 10: Contoh Model Potensial Transformatif.....</i>	<i>58</i>
<i>Lembar Rujukan 11: Indikator-indikator: Definisi Utama .....</i>	<i>59</i>
<i>Lembar kerja 5: Potensi Transformatif Kerja Pendidikan HAM Anda .....</i>	<i>60</i>
Kegiatan 3 Standard Hak Asasi Manusia Internasional.....	61
<i>Lembar Kerja 6: Pertanyaan tentang Instrumen International.....</i>	<i>64</i>
Kegiatan 4 Menerapkan konsep Jender di dalam RANHAM .....	65
<i>Lembar Rujukan 12: Jender – Konsep-konsep Dasar .....</i>	<i>67</i>
<b>MODUL 4 PERENCANAAN RANHAM – LANGKAH SELANJUTNYA.....</b>	<b>71</b>
Kegiatan 1 Mengembangkan Kegiatan-kegiatan pendidikan HAM yang berhubungan dengan RANHAM.....	73
<i>Lembar Rujukan 13: Pendidikan HAM dan Pendekatan Berbasis-Hak.....</i>	<i>75</i>
<i>Lembar Rujukan 14: Kerangka Kerja Pendekatan Berbasis Hak .....</i>	<i>79</i>
<i>Lembar Kerja 7: Kegiatan pendidikan HAM RANHAM Menggunakan pendekatan berbasis-hak.....</i>	<i>82</i>
Kegiatan 2 Kerangka Kerja Perencanaan.....	85
<i>Lembar Rujukan 15: Model untuk memasukkan Pendidikan HAM dalam kerja anda .....</i>	<i>87</i>
<i>Lembar Kerja 8: Model untuk memasukkan Pendidikan HAM dalam kerja anda.....</i>	<i>95</i>
Kegiatan 3 Mengembangkan Rencana Aksi Pribadi .....	101
<i>Lembar Kerja 9: Rencana Aksi Pribadi .....</i>	<i>102</i>
<b>MODUL 5 EVALUASI LOKAKARYA DAN ACARA PENUTUPAN .....</b>	<b>103</b>
Kegiatan 1 Evaluasi Umum Lokakarya .....	105
Kegiatan 2 Acara Penutupan.....	105
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>
Lampiran 1: Teknik-Teknik Pelatihan Pendidikan Hak Asasi Manusia yang Efektif .....	108
Lampiran 2: Praktek-Praktek yang Baik dalam Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia: Panduan, Indikator dan Evaluasi .....	110

Lampiran 3: Komentar Umum No. 16 (2005), Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya - Kesetaraan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan Atas Penikmatan Semua Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya..... 122



# Pendahuluan

## Latar Belakang

*Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia* adalah sebuah proyek kerja sama antara Equitas – Pusat Pendidikan HAM Internasional dan Direktorat Jendral Perlindungan HAM dari Kementrian Hukum dan HAM Indonesia.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 (RANHAM) dari pemerintah Indonesia menyediakan kerangka kerja penting bagi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban Hak Asasi Manusia di tingkat internasional dan di dalam negeri dan sebuah pintu masuk yang strategis untuk melibatkan banyak badan dan lembaga pemerintah dalam isu-isu HAM di tingkat Nasional, Propinsi dan lokal. Rencana tersebut mengenali adanya kebutuhan untuk bekerja secara lebih dekat dengan otoritas pemerintah daerah dan masyarakat sipil melalui panitia RANHAM di tingkat propinsi dan lokal dalam konteks proses desentralisasi Indonesia yang sedang berlangsung.

Melalui Panitia RANHAM ini, Kementrian melibatkan badan-badan pemerintah daerah dan pelaku masyarakat sipil yang penting untuk menjamin bahwa mereka menganggap penting pendekatan berdasarkan-hak yang selaras dengan kewajiban Indonesia dalam bidang HAM di tingkat Internasional dan di dalam negeri.

Sejak terjadinya bencana Tsunami di Aceh dan sekitarnya, prioritas yang diberikan oleh Departemen Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia (*MOLAHR*) adalah penguatan kapasitas Panitia RANHAM di Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disebut NAD) dan propinsi-propinsi sekitarnya. Melalui Panitia RANHAM, Departemen Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia menjalin hubungan erat dengan badan-badan pokok pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat sipil setempat yang turut terlibat dalam upaya rekonstruksi guna menjamin bahwa program yang dilaksanakan benar benar memperhatikan pendekatan berbasis hak yang selaras dengan kewajiban-kewajiban domestik dan internasional Indonesia untuk hak-hak asasi manusia.

## Tujuan dan Sasaran

**Tujuan** lokakarya ini adalah untuk memperkuat lebih jauh kapasitas Direktorat Jendral Perlindungan HAM dan Panitia RANHAM NAD di Indonesia dalam melaksanakan RANHAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Sasaran-sasaran dari lokakarya ini adalah agar peserta mampu untuk:

1. Meninjau ulang kebutuhan untuk pengembangan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat pelaksanaan RANHAM (misalnya, Panitia RANHAM Nasional dan Propinsi, Dir-Jen Perlindungan HAM, masyarakat sipil).

2. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan RANHAM yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Panitia RANHAM NAD sejak Maret 2006.
3. Lebih jauh memperkuat kapasitas peserta untuk melakukan kontribusi dalam pelaksanaan RANHAM yang efektif dengan cara:
  - a. meningkatkan kesadaran peserta tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar HAM serta mekanisme dan kewajiban HAM Indonesia di tingkat internasional dan di dalam negeri.
  - b. mengenali dan berbagi praktek-praktek terbaik dari pengalaman Indonesia dan Kanada yang relevan bagi pelaksanaan RANHAM yang efektif.
  - c. mengembangkan dan melatih teknik-teknik pendidikan HAM yang efektif
  - d. mengembangkan strategi untuk mengalihkan pengetahuan dan ketrampilan baru di dalam lembaga-lembaga mereka.

## **Peserta**

Target peserta Lokakarya ini adalah anggota-anggota Panitia RANHAM tingkat propinsi NAD. Termasuk juga pegawai-pegawai badan-badan Pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan RANHAM di Aceh dan di propinsi-propinsi sekitarnya.

## **Metodologi**

Rancangan model kurikulum dari lokakarya ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip dari belajar-berdasarkan-pengalaman orang dewasa. Prinsip utamanya adalah isi akan lebih banyak datang dari peserta dan lokakarya akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menarik keluar isi ini. Peserta dan fasilitator sepakat untuk terlibat dalam proses belajar-mengajar bersama. Penekanan ada pada penerapan praktis dan pengembangan strategi aksi. Refleksi dan evaluasi yang berkesinambungan adalah inti dari proses belajar.

Fasilitatornya terlatih dalam metode pendidikan orang dewasa, memiliki pengetahuan tentang HAM dan berpengalaman dalam bekerja dengan berbagai macam kelompok yang berbeda. Ahli HAM internasional yang terkenal akan diundang untuk memberikan presentasi serta turut serta dalam diskusi panel selama lokakarya.

## **Mitra-Mitra dari Kanada**

Untuk proyek ini, Equitas bekerja sama dengan 4 lembaga dari Kanada, yaitu:

1. Rights & Democracy, Montreal
2. The *Centre d'Études et de Recherches Internationales (CÉRIUM)* of the *Université de Montréal*, Montreal
3. Centre for Human Rights and Legal Pluralism, McGill University, Montreal
4. Dr. James Ron, Associate Professor, Norman Patterson School of International Affairs, Carleton University, Ottawa

## Penghargaan dan Terima Kasih

Lokakarya ini diselenggarakan oleh Equitas – Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional *International Centre for Human Rights Education* (sebelumnya dikenal sebagai *Canadian Human Rights Foundation*).

Direktorat Jendral Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia beserta Equitas-Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional mengucapkan terimakasih bagi semua yang telah menyumbangkan waktu dan keahliannya untuk menyiapkan panduan lokakarya ini. Terimakasih yang tulus, kami sampaikan kepada mitra-mitra dan sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan sumber daya, teknis dan berbagai bentuk bantuan lainnya dalam memperbanyak, serta mendistribusikan panduan lokakarya ini.

Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para pejabat dan staff Dir-Jen Perlindungan HAM, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jendral Perlindungan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, Direktur Kerja sama dan direktur pendidikan atas perannya dalam menyelenggarakan lokakarya ini serta memberikan saran-saran serta umpan balik yang sangat berguna dalam pengembangan buku panduan ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu J. I. Isakayoga, Kepala Seksi Kerja Sama PBB.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas sumbang-saran dari: Bpk. Suhermanto Reza, Kepala Biro Hukum, Propinsi Sumatera Barat; Ibu Wahyu Sri Ambar Arum, dosen pada Universitas Negeri Jakarta; Bapak Djoko Sasongko, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat;; Ibu Elly Suharto, guru dari Propinsi Bangka Belitung; Dr. Marzuki, dosen pada sekolah kesejahteraan, Bandung; Bapak Bambang Haryadi, dari Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta; Bapak Tomi Lebang, pelaku masyarakat sipil di Jakarta; dan ibu Sri Ikawati, seksi Instrumen HAM Internasional pada Dir-Jen Perlindungan HAM, Jakarta bagi bantuannya dalam mengembangkan rancangan awal panduan ini.

Tim Pengembang Kurikulum panduan pelatihan ini adalah: Vincenza Nazzari, Paul McAdams, Ian Hamilton, Bing Arguelles dan Stephen Schmidt.

Buku Panduan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dana dari Pemerintah Kanada yang disampaikan melalui *Human Security Program* dari *Dept of Foreign Trade and International Affairs*.

Canada



Canadian International  
Development Agency    Agence canadienne de  
développement international



Droits et Démocratie  
Rights & Democracy

Centre international des droits de la personne et du développement démocratique  
International Centre for Human Rights and Democratic Development

## Jadwal

HARI 1, 14 November 2006		
Waktu	Modul	Judul
8:30-9:00	<b>Modul 1</b> Kegiatan 1	<b>Menyiapkan Konteks</b> Acara Pembukaan
<b>9:00-10:30</b>	Kegiatan 2	Pendahuluan dan Harapan Lokakarya
<b>10:30-10:45</b>	<b>Rehat</b>	
10:45-11:15	Kegiatan 3	Tinjauan Umum Lokakarya, Sasaran dan Metodologi
11:15-12:30	Kegiatan 4	Isu-Isu HAM di NAD Saat Ini
<b>12:30-14:00</b>	<b>Makan Siang</b>	
14 :00-14 :45	Kegiatan 4	Lanjutan
14 :45-15 :45	<b>Modul 2</b> Kegiatan 1	<b>Status RANHAM Saat Ini</b> RANHAM Saat ini: Tinjauan Umum Sasaran-sasaran, Capaian dan Keberhasilan
<b>15:45-16:00</b>	<b>Rehat</b>	
16:15-17:30	Kegiatan 1	Peran Panitia RANHAM NAD
17:30-17:45		Rangkuman dan Evaluasi Harian

HARI 2, 15 November 2006		
Waktu	Modul	Judul
<b>8:30-8 :45</b>		<b>Rangkuman Hari 1</b>
8:45-10:15	<b>Modul 2</b> Kegiatan 3	<b>Status RANHAM Saat Ini</b> Diskusi Kelompok Terfokus – Menciptakan Panitia RANHAM NAD yang Dinamis
<b>10:15-10:30</b>	<b>Rehat</b>	
10:30-11:15	<b>Modul 3</b> Kegiatan 1	<b>Menganalisa Kerja HAM di dalam RANHAM</b> Merumuskan Pemahaman Bersama tentang Pendidikan HAM
11:15-12:30	Kegiatan 2	RANHAM Perubahan Sosial – Pendidikan HAM yang Efektif untuk Perubahan Sosial
<b>12:30-14:00</b>	<b>Makan Siang</b>	
14:00-15:30	Kegiatan 3	<b>Menganalisa Kerja HAM di dalam RANHAM</b> Standard HAM Internasional
<b>15:30-15:45</b>	<b>Rehat</b>	
15:45-17:15	Kegiatan 3	Lanjutan
17:15-17:30		Rangkuman dan Evaluasi Harian

HARI 3, 16 November 2006		
Waktu	Modul	Judul
8:30-8:45		<b>Rangkuman Hari 2</b>
8:45-10:30	<b>Modul 3</b> Kegiatan 4	<b>Menganalisa Kerja HAM di dalam RANHAM (lanjutan)</b> Menerapkan Konsep Jender di dalam RANHAM
10:30-10:45	<b>Rehat</b>	
10:45-12:30	<b>Modul 4</b> Kegiatan 1	<b>Perencanaan RANHAM – Langkah Selanjutnya</b> Mengembangkan Kegiatan Pendidikan HAM yang berhubungan dengan RANHAM
12:30-14:00	<b>Makan Siang</b>	
14:00-15:00	Kegiatan 1	Lanjutan
15:00-15:15	<b>Rehat</b>	
15:15-17:15	Kegiatan 2	Kerangka Kerja Perencanaan
17:15-17:30		Rangkuman dan Evaluasi Harian

HARI 4, 17 November 2006		
Waktu	Modul	Judul
8:30-8:45		<b>Rangkuman Hari 3</b>
8:45-9:30	<b>Modul 4</b> Kegiatan 2	<b>Perencanaan RANHAM – Langkah Selanjutnya (lanjutan)</b>
9:30-10:45	Kegiatan 3	Mengembangkan Rencana Aksi Pribadi
10:45-11:15	<b>Modul 5</b> Kegiatan 1	<b>Evaluasi Lokakarya dan Acara Penutupan</b> Evaluasi Umum Lokakarya
11:15-11:45	Kegiatan 2	Acara Penutupan



## Modul 1 Menyiapkan Konteks

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
<b>Kegiatan 1</b>	Acara Pembukaan	30 mnt
<b>Kegiatan 2</b>	Pendahuluan dan Harapan Lokakarya	1 jam 30 mnt
<b>Kegiatan 3</b>	Tinjauan Umum Lokakarya, Sasaran dan Metodologi	30 mnt
<b>Kegiatan 4</b>	Isu-Isu HAM di NAD Saat Ini	2 jam



## **Kegiatan 1 Acara Pembukaan**

### **Sasaran**

Untuk membuka Lokakarya secara resmi.

### **Waktu**

30 mnt

### **Uraian**

Penyelenggara Lokakarya membuka lokakarya secara resmi dengan menyambut para peserta dan nara sumber.

**Akhir dari Kegiatan ■**

## Kegiatan 2 Pendahuluan dan Harapan-Harapan Lokakarya

### Sasaran

- Untuk bertemu dengan anggota kelompok, termasuk fasilitator, penyelenggara lokakarya dan nara sumber.
- Untuk mengenali harapan-harapan para peserta lokakarya dan menggali sumber daya potensial di dalam kelompok.

### Waktu

1 jam 30 mnt

### Uraian

Kegiatan ini akan memungkinkan anda untuk mengenal peserta lokakarya yang lain, untuk saling berbagi tentang harapan anda, dan untuk mengenali sumber daya potensial di dalam kelompok.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, anda akan memperkenalkan diri anda kepada anggota kelompok dan menyampaikan harapan-harapan anda serta sumber daya anda untuk lokakarya ini.

Pada **Bagian B**, fasilitator akan merangkum harapan dan sumber daya anda.

45 mnt

#### Bagian A Pendahuluan

1. Fasilitator menyajikan sejumlah nilai/sikap pribadi yang ditulis pada selembar kertas besar dan menempelkannya di berbagai tempat di sekeliling ruangan:
  - Empati
  - Hormat
  - Kesetaraan
  - Cinta Kasih
  - Tanggung Jawab
2. Secara ringkas, refleksikan nilai-nilai/sikap-sikap yang tertempel dan kemudian berdirilah disamping nilai/sikap yang anda anggap paling cocok sebagai pekerja Hak Asasi Manusia.
3. Perkenalkan diri anda (nama, jabatan, tanggung jawab utama, divisi/departemen, dan lembaga) kepada peserta lain yang berkumpul di sekeliling nilai/sikap yang sama.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

**Kegiatan 2 lanjutan**

4. Gunakan waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan diantara anda alasan mengapa anda memilih nilai/sikap tersebut
5. Fasilitator kemudian akan meminta setiap kelompok secara bergiliran memperkenalkan anggota kelompoknya dan menjelaskan alasan anggota kelompok yang berbeda memilih nilai tersebut.

**15 mnt****Bagian B Diskusi Kelompok**

1. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari **Tugas Pra-Lokakarya**, fasilitator akan menyiapkan bagan harapan-harapan kelompok yang berhubungan dengan lokakarya. Fasilitator akan membaca harapan-harapan peserta dan menandai harapan-harapan yang umum serta yang mungkin tidak akan dibahas selama lokakarya.
2. Fasilitator membaca daftar topik dan ketrampilan yang diidentifikasi oleh para peserta lokakarya Maret 2006. Daftarnya berasal dari **Kuesioner Tindak Lanjut** yang diisi oleh peserta pada bulan Juli 2006 (lihat **Lembar Rujukan 1**). Fasilitator membaca daftar tersebut dan membahas bagaimana topik dan ketrampilan tersebut akan ditanggapi selama lokakarya. Fasilitator juga akan menjelaskan ide tentang “tempat parkir” dimana para peserta bias menyampaikan isu/topik/pertanyaan yang mungkin tidak akan dibahas di dalam lokakarya, tetapi paling tidak menjadi minat para peserta. Isu-isu yang terdapat pada “tempat parkir” bisa dibahas pada saat rehat teh atau makan siang.
3. Setiap peserta akan menerima sebuah “*metacard*” untuk menulis nama dan sebuah sumber daya yang bisa mereka tawarkan kepada peserta lain (misalnya, keahlian dalam mengadakan pelatihan, pengetahuan tentang hak-hak perempuan, pengetahuan tentang instrumen internasional tertentu).
4. Fasilitator akan memimpin diskusi kelompok besar tentang sumber daya yang ada di dalam kelompok dengan cara mengundang peserta untuk berbagi sumber daya yang mereka tawarkan.

**Akhir dari Kegiatan ■**

## Lembar Rujukan 1: Topik dan Ketrampilan yang akan dibahas pada Lokakarya ini sesuai dengan yang telah diidentifikasi oleh Para Peserta

Pada Juli 2006, para peserta yang mengikuti lokakarya Maret 2006 diminta untuk melengkapi **Kuesioner Tindak Lanjut**. Pada kuesioner tersebut, mereka ditanya topik apa yang ingin dibahas pada lokakarya kali ini. Di bawah ini adalah jawabannya:

### Topik yang ingin dibahas selama lokakarya ini:

#### Melatih kelompok sasaran atau sektor tertentu:

- *RANHAM*: Untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman nilai-nilai HAM bagi anggota panitia RANHAM.
- *Penegakan Hukum*: Pemahaman HAM bagi Aparat Penegak Hukum.
- *Pendidikan*: Prinsip-prinsip HAM dimasukkan pada kurikulum pendidikan.
- *Tahanan Politik*: Perlindungan HAM bagi tahanan politik selama dan sesudah menjalani hukuman.
- *Perempuan dan Anak-anak*: Perlakuan terhadap perempuan dan anak-anak sebagai korban konflik bersenjata dan *trafficking*.
- *Jender*: Memperkuat kesadaran Jender pada tingkat domestik (di dalam rumah tangga).
- *Paska-tsunami*: Perlindungan Hak rakyat atas tanah setelah tsunami.

#### Isu-isu HAM secara umum:

- Bagaimana isu-isu pelanggaran HAM dimasa lalu bisa diproses dengan prinsip-prinsip yang bisa dikembangkan menjadi hukum.
- Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran HAM internasional tanpa diskriminasi agama atau ras.
- Situasi HAM saat ini di NAD, satu tahun setelah perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia.
- Kami berharap bahwa pendidikan dan pengembangan RANHAM dapat dilakukan di IAIN (Universitas Islam Negeri) Ar-Raniry, sehingga dapat meningkatkan kapasitas panitia lokal.

### Ketrampilan yang akan dikembangkan selama lokakarya:

- Bagaimana membuat rencana kerja lima tahun untuk panitia RANHAM.
- Pelatihan untuk menjadi fasilitator/nara sumber untuk kegiatan RANHAM.
- Pendekatan akar-rumput untuk mendiskusikan HAM.

- Meningkatkan ketrampilan untuk melakukan penyelidikan korban pelanggaran HAM di NAD.
- Advokasi HAM.
- Ketrampilan dokumentasi untuk mendokumentasikan persoalan-persoalan HAM dalam masyarakat.
- Belajar prinsip-prinsip HAM di negara-negara lain yang dapat disesuaikan pada situasi di Aceh. To learn about human rights principles in other countries that can be customized to the situation in Aceh.
- Analisa SWOT tingkat lanjut tentang sistim HAM.

## Kegiatan 3 Tinjauan Umum Lokakarya, Sasaran-sasaran dan Metodologi

### Sasaran

- Untuk menghubungkan harapan peserta dengan sasaran dan isi lokakarya.
- Untuk menggambarkan kerangka kerja dasar yang digunakan di dalam lokakarya.
- Untuk mengenali aturan-aturan dasar yang berguna untuk menciptakan dinamika kelompok yang efektif selama Lokakarya.

### Waktu

30 mnt

### Uraian

Pada kegiatan sebelumnya, anda telah mengenali harapan-harapan anda dari lokakarya ini. Pada kegiatan ini, fasilitator akan menjelaskan isi lokakarya dan bagaimana itu akan berhubungan dengan harapan-harapan anda.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator akan menyiapkan tinjauan umum mengenai kerangka kerja dan sasaran lokakarya untuk menunjukkan bagaimana harapan-harapan anda akan dipenuhi.

Pada **Bagian B**, anda akan membantu untuk menetapkan aturan dasar untuk bisa bekerja secara efektif sebagai kelompok selama lokakarya ini.

20 mnt

#### **Bagian A Presentasi Kelompok**

Fasilitator akan menyajikan kerangka kerja dan sasaran-sasaran lokakarya, sambil menghubungkannya dengan harapan-harapan yang tercatat pada saat **Kegiatan 2**. Kerangka kerja dasar untuk lokakarya ini disajikan pada **Lembar Rujukan 2** agar anda dapat mengikutinya selama presentasi ini.

Berlanjut ▶ ▶ ▶



## Lembar Rujukan 2: Kerangka Kerja Lokakarya

### Langkah 1 - Melihat Situasi HAM Saat Ini

- Dimana kita sekarang?
- Apa situasi HAM di Indonesia saat ini?
- Apa yang telah kita lakukan sebagai panitia?
- Apa yang telah saya lakukan di dalam lembaga saya?
- Apa praktek terbaik kita?
- Pelajaran apa yang telah kita petik?
- Apa yang telah kita lakukan untuk membuat kita berhasil?
- Bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk memperbaiki kerja kita?

Langkah ini berhubungan dengan kegiatan berikut ini:

#### **Modul 1**

- Kegiatan 4: Isu-isu HAM di NAD Saat Ini
- #### **Modul 2**
- Kegiatan 1: RANHAM Saat Ini
  - Kegiatan 2: Peran Panitia RANHAM NAD
  - Kegiatan 3: Diskusi Kelompok Terfokus

### Step 2 - Mengenali Situasi yang Diinginkan

- Dimana kita ingin berada?
- Menurut Rencana Aksi Nasional, dimana kita seharusnya berada?
- Apa capaian dan keberhasilan yang telah kita hasilkan?

Langkah ini berhubungan dengan kegiatan berikut ini:

#### **Modul 3**

- Kegiatan 1: Merumuskan pemahaman bersama tentang Pendidikan HAM
- Kegiatan 2: RANHAM dan Perubahan Sosial – Pendidikan HAM yang efektif untuk Perubahan Sosial
- Kegiatan 3: Standard HAM Internasional
- Kegiatan 4: Menerapkan Konsep Jender di dalam RANHAM

### Step 3 – Apa yang kita lakukan selanjutnya?

- Celah apa yang ada antara situasi saat ini dengan yang diinginkan?
- Bagaimana kita bisa menggunakan praktek-praktek terbaik kita untuk menutup celah tersebut?
- Apa prioritasnya?
- Apa yang dapat kita lakukan sebagai panitia/lembaga/pribadi untuk mengerjakan prioritas-prioritas tersebut?

Langkah ini berhubungan dengan kegiatan berikut ini:

#### **Modul 4**

- Kegiatan 1: Mengembangkan Kegiatan RANHAM yang berhubungan dengan Pendidikan HAM
- Kegiatan 2: Kerangka Kerja Perencanaan
- Kegiatan 3: Mengembangkan Rencana Aksi

## Kegiatan 4 Isu-isu HAM di NAD saat Ini

### Sasaran

- Untuk mengenali isu-isu HAM di NAD saat ini.
- Untuk memeriksa bagaimana RANHAM menanggapi isu-isu HAM ini.

### Waktu

2 jam

### Uraian

Pada kegiatan ini, anda mulai memeriksa isu-isu HAM saat ini dengan menggunakan studi kasus singkat.

Kegiatan ini dibagi menjadi 3 bagian.

Pada **Bagian A**, anda akan bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu HAM di NAD saat ini.

Pada **Bagian B**, kelompok akan mempresentasikan analisisnya mengenai isu-isu HAM di NAD saat ini.

Pada **Bagian C**, fasilitator memimpin diskusi kelompok besar.

45 mnt

#### **Bagian A Kerja Kelompok Kecil**

1. Fasilitator membagi peserta ke dalam tiga kelompok.
2. **Lembar Kerja 1** berisi daftar kasus-kasus singkat yang menggambarkan isu-isu HAM. Fasilitator menugaskan satu kasus untuk masing-masing kelompok dan meminta mereka untuk menganalisa kasusnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada **Lembar Kerja**. Gunakan format yang disajikan pada Error! Reference source not found. untuk mencatat penemuan kelompok anda dan bersiap mempresentasikannya pada **Bagian B**.

30 mnt

#### **Bagian B Presentasi Kelompok**

Tiap kelompok mempresentasikan analisa kasus mereka.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

**Kegiatan 4 lanjutan**

**45 mnt**

**Bagian C      Diskusi**

Fasilitator merangkum poin-poin yang disepakati dari kelompok dan nara sumber akan memberikan komentar pada kerja peserta..

Pertanyaan-pertanyaan untuk dipertimbangkan:

- Apa isu-isu HAM saat ini yang utama, ditunjukkan oleh kasus-kasus ini? Apakah kasus-kasus ini secara tepat mencerminkan sejumlah isu-isu HAM saat ini di NAD dan Indonesia?
- Bagaimana isu-isu ini dirasakan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan pada kasus-kasus ini?
- Apakah ada faktor-faktor umum yang mendasari atau mengarah pada isu-isu HAM ini?
- Bagaimana pendidikan HAM bisa menanggapi isu-isu ini? Apa tujuan pendidikan HAM yang didambakan?
- Isu-isu HAM apalagi yang menjadi keprihatinan di NAD?

**Akhir dari Kegiatan ■**

## Lembar Kerja 1: Isu-isu HAM di NAD

Fasilitator akan menugaskan anda salah satu kasus di bawah ini pada kelompok anda. Bacalah kasus tersebut dan jawab pertanyaan-pertanyaannya.

### Uraian Kasus #1

**Para pemrotes berunjuk rasa di depan rumah Gubernur di Banda Aceh untuk memprotes distribusi dana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi paska-tsunami yang buruk.**

### Questions:

1. Hak-hak apa yang tidak bisa dinikmati?
  
2. Dalam bahasa HAM, kita sering berbicara tentang “pemegang Hak” (mereka yang memiliki hak) dan “pemanggul kewajiban” (mereka yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak). Dalam kasus ini, siapa “pemegang hak” yang tidak bisa menikmati hak-haknya?
  
3. Siapa para “pemanggul kewajiban”? Menurut anda, kewajiban apa saja yang mereka miliki dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak?
  
4. Apakah panitia RANHAM bisa memainkan peran dalam kasus ini? Jika ya, apa perannya?

### Uraian Kasus #2

Setelah lokakarya di sebuah hotel, para peserta perempuan yang sedang berdiri di gang dalam hotel tersebut membuka kerudungnya dan kemudian ditangkap oleh polisi syariah. Perempuan-perempuan tersebut lalu di arak keliling kota di atas sebuah truk dan kerudung mereka dibuka.

### Questions:

1. Hak-hak apa yang tidak bisa dinikmati?
2. Dalam bahasa HAM, kita sering berbicara tentang “pemegang Hak” (mereka yang memiliki hak) dan “pemanggul kewajiban” (mereka yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak). Dalam kasus ini, siapa “pemegang hak” yang tidak bisa menikmati hak-haknya?
3. Siapa para “pemanggul kewajiban”? Menurut anda, kewajiban apa saja yang mereka miliki dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak?
4. Apakah panitia RANHAM bisa memainkan peran dalam kasus ini? Jika ya, apa perannya?

### Uraian Kasus #3

Dengan bantuan fasilitator, peserta akan mengidentifikasi studi kasus ketiga yang menyoroti isu-isu HAM di NAD saat ini.

Uraian kasus:

### Questions:

1. Hak-hak apa yang tidak bisa dinikmati?
2. Dalam bahasa HAM, kita sering berbicara tentang “pemegang Hak” (mereka yang memiliki hak) dan “pemanggul kewajiban” (mereka yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak). Dalam kasus ini, siapa “pemegang hak” yang tidak bisa menikmati hak-haknya?
3. Siapa para “pemanggul kewajiban”? Menurut anda, kewajiban apa saja yang mereka miliki dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak?
4. Apakah panitia RANHAM bisa memainkan peran dalam kasus ini? Jika ya, apa perannya?



## Modul 2 Status RANHAM Saat Ini

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
<b>Kegiatan 1</b>	RANHAM Saat Ini: Tinjauan Umum tentang Sasaran-sasaran, Capaian dan Keberhasilan	1 jam
<b>Kegiatan 2</b>	Peran Panitia RANHAM NAD	1 jam 30 mnt
<b>Kegiatan 3</b>	Kelompok Diskusi Terfokus – Menciptakan Panitia RANHAM NAD yang Dinamis	1 jam 30 mnt



## Kegiatan 1 RANHAM Saat Ini: Tinjauan Umum tentang Sasaran-sasaran, Capaian dan Keberhasilan

### Sasaran

- Untuk meninjau ulang RANHAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.
- Untuk mengenali keberhasilan pencapaian pelaksanaan RANHAM sampai saat ini.

### Waktu

1 jam

### Uraian

Kegiatan sebelumnya telah mengidentifikasi situasi HAM di Indonesia saat ini. Pada kegiatan ini, anda akan melihat pada pelaksanaan RANHAM yang telah direncanakan dan menentukan bagaimana hal tersebut akan mengubah situasi saat ini.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, nara sumber akan menyediakan tinjauan umum tentang RANHAM.

Pada **Bagian B**, anda akan mengambil bagian dalam sebuah forum terbuka dimana anda akan punya kesempatan untuk memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber.

30 mnt

#### **Bagian A Presentasi**

Nara sumber dari Dir-Jen HAM akan menyajikan tinjauan umum tentang RANHAM dengan fokus khusus pada sasaran RANHAM “Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia” (lihat **Lembar Rujukan 3**). Beberapa topik yang akan dibahas oleh nara sumber adalah sebagai berikut:

- Capaian dan Keberhasilan sampai saat ini
- Kegiatan yang sedang berlangsung
- Cerita-cerita sukses
- Penerapan sudut pandang jender pada sasaran RANHAM
- Kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang

Nara sumber juga akan menghubungkan pekerjaan RANHAM dengan isu-isu HAM saat ini yang telah diidentifikasi oleh peserta pada kegiatan sebelumnya.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

*Kegiatan 1 lanjutan*

**30 mnt**

**Bagian B Forum Terbuka**

Selama forum terbuka ini anda memiliki kesempatan untuk memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan terhadap tiap isu yang diajukan yang akan mempengaruhi pekerjaan anda.

**Akhir dari Kegiatan ■**

### Lembar Rujukan 3: Diseminasi RANHAM dan Pendidikan Hak Asasi Manusia

Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Indikator keberhasilan (out put)
1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan aparat pemerintah akan pentingnya HAM dalam pelaksanaan tugasnya.	Penegak Hukum dan Aparat Pemerintah:	
	a. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kedinasan di semua Instansi Pemerintah.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah.
	b. Pelatihan HAM untuk Pelatih kepada penegak hukum dan aparat pemerintah.	
c. Diseminasi bahan informasi HAM kepada penegak hukum dan aparat pemerintah.		
2. Penguatan pendidikan HAM di Perguruan Tinggi dan institusi HAM.	Perguruan Tinggi dan Lembaga HAM lainnya:	
	a. Penambahan koleksi buku HAM di perpustakaan Perguruan Tinggi, Depkeham, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, PUSHAM dan lainlain.	Tersedianya bahan ajar HAM dan bahan-bahan rujukan mengenai HAM.
	b. Memperkuat program studi HAM bergelar di Indonesia dan melanjutkan kerjasama pemberian beasiswa untuk mengikuti program studi HAM di luar negeri.	Terbentuknya bidang gelar dan non-gelar Studi HAM di Perguruan Tinggi dalam negeri dan mendorong program beasiswa studi HAM di luar negeri.
	c. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum di Perguruan Tinggi.	Tersedianya kurikulum HAM di Perguruan Tinggi.
	d. Pelatihan HAM bagi organisasi kemahasiswaan.	Terlaksananya pelatihan HAM untuk organisasi mahasiswa.

## Lembar Rujukan - Lanjutan

Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Indikator keberhasilan (out put)
3. Peningkatan Pemahaman dan kesadaran mengenai HAM melalui jalur sekolah.	Pendidikan jalur sekolah :	
	a. Pelatihan HAM kepada para guru dengan prioritas guru bidang studi terkait.	Terlaksananya pelatihan HAM untuk guru.
	b. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam mata pelajaran terkait terutama Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Sejarah, IPS dan Bahasa Indonesia.	Tersedianya pelajaran sejarah, IPS dan bahasa yang bermuatan HAM.
	c. Menerjemahkan bahan-bahan pengajaran bermuatan HAM.	Tersedianya terjemahan bahan ajar mengenai HAM.
	d. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam muatan kurikulum pendidikan lokal.	Terintegrasikannya pendidikan HAM dalam muatan pendidikan lokal.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Penghormatan terhadap HAM.	Jalur Pendidikan Luar Sekolah:	
	a. Penyusunan bahan ajar mengenai HAM yang mudah diserap oleh masyarakat;	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
	b. Diseminasi HAM pada tingkat desa antara lain melalui PKK, Kadarkum, kegiatan keagamaan dan sebagainya.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
	c. Meningkatkan program penataranpenataran HAM yang terkait dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-undang tentang HAM dan sebagainya.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
	d. Diseminasi, pelatihan, penataran, dan lokakarya HAM di kalangan Kelompok Belajar dan Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Kursus Pemuda, Dewan Pendidikan, dan PGRI.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
	e. Diseminasi, pelatihan, penataran, dan lokakarya HAM di kalangan organisasi keolahragaan, pelatih olah raga, atlit, dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP).	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.

## Lembar Rujukan - Lanjutan

Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Indikator keberhasilan (out put)
	f. Diseminasi, pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan organisasi politik, organisasi sosial dan LSM, serta penyuluhan mengenai konsepsi HAM di kelompok-kelompok minat, profesi dan bisnis, seperti Majelis Taklim, Pramuka, Karang Taruna dan lain-lain.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
5. Peningkatan layanan informasi tentang Hak Asasi Manusia.	Media Massa:	
	a. Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan mengenai HAM bagi wartawan media cetak, media elektronik dan petugas –petugas penerangan.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
	b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik (TV dan Radio).	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
	c. Menerbitkan dan menyebarkan bahanbahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
	d. Tayangan mengenai HAM di media cetak dan elektronik.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
	e. Pemanfaatan media tradisional.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.

## Kegiatan 2 Peran Panitia RANHAM NAD

### Sasaran

- Untuk mengenali peran-peran umum individu dan lembaga-lembaga pada Panitia RANHAM NAD.
- Untuk mengenali praktek-praktek terbaik bagi Panitia RANHAM NAD.

### Waktu

1 jam 30 mnt

### Uraian

Kegiatan sebelumnya melihat pada keberhasilan RANHAM dan membuat rencana kegiatan di masa yang akan datang. Pada kegiatan ini, anda akan memeriksa sumbangan anda terhadap keberhasilan RANHAM tersebut.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, anda akan mengambil bagian dalam diskusi kelompok besar untuk menganalisa peran departemen/bagian dan/atau lembaga anda dalam koordinasi dan pelaksanaan RANHAM.

Pada **Bagian B**, anda akan bekerja sendiri untuk menganalisa sumbangan pribadi dan lembaga dalam mencapai hasil-hasil dan keberhasilan RANHAM sampai saat ini.

Pada **Bagian C**, fasilitator akan merangkum informasi dari **Bagian B** dan memimpin diskusi untuk mengenali praktek-praktek terbaik untuk panitia RANHAM dan lembaga anggotanya.

30 mnt

#### **Bagian A Diskusi Kelompok**

1. Fasilitator akan memimpin sesi curah pendapat untuk merumuskan berbagai peran berbeda dari pribadi, bagian dan lembaga dalam melaksanakan RANHAM. Fasilitator akan menuliskan peran-peran tersebut pada “*flipchart*”. **Lembar Kerja 2** untuk mencatat pemahaman kelompok terhadap peran-peran ini.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

**Kegiatan 2 lanjutan**

2. Nara sumber akan memberikan komentar pada peran-peran yang telah dikenali. Fasilitator menghubungkan peran yang telah diidentifikasi pada kebutuhan pendidikan oleh peserta lokakarya Maret 2006 (lihat **Lembar Rujukan 4**). Apakah kebutuhan yang telah diidentifikasi membantu anda dalam memperjelas peran anda dalam melaksanakan RANHAM?

**20 mnt**

**Bagian B Kerja Pribadi**

1. Fasilitator membagikan kertas “*metacard*”, 2 putih dan 2 kuning, untuk tiap peserta untuk menyelesaikan kegiatan ini.
2. Refleksikan pada bagaimana RANHAM berhubungan dengan tanggung jawab anda dalam pekerjaan pribadi anda. Gunakan “*metacard*” **putih** untuk mencatat **sumbangan pribadi anda dalam koordinasi dan/atau pelaksanaan RANHAM** (contohnya: membimbing anggota staff junior, melakukan riset tentang pelaksanaan HAM di negara-negara lain, bertindak sebagai penghubung antar lembaga lain dll.). Tuliskan satu refleksi pada tiap “*metacard*”.
3. Refleksikan bagaimana lembaga anda menyumbang pada RANHAM. Gunakan “*metacard*” **kuning** untuk mencatat **sumbangan bagian/lembaga anda dalam koordinasi dan pelaksanaan RANHAM** (misalnya: mengkoordinasikan harmonisasi hukum-hukum perburuhan, menyediakan dukungan kepada lembaga lain untuk perlindungan pekerja migrant, menyelenggarakan kelompok kerja hak-hak anak). Tuliskan satu refleksi pada tiap “*metacard*”.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

*Kegiatan 2 lanjutan*

**45 mnt**

**Bagian C      Diskusi Kelompok**

1. Fasilitator memimpin diskusi tentang kontribusi pribadi dan bagian/lembaga dengan meminta anda untuk berbagi apa yang telah anda tulis pada **Bagian B**. Semua peserta akan menempelkan semua refleksi mereka pada dinding.
2. Fasilitator mengelompokkan kartu-kartu dan memberikan komentar terhadap persamaan dan perbedaan kontribusi yang telah dibuat.
3. Menggunakan daftar kontribusi bersama yang telah dikelompokkan, fasilitator memperkenalkan konsep tentang praktek terbaik, dan melakukan elaborasi tentang bagaimana praktek terbaik memungkinkan panitia dan anggotanya memberikan kontribusi untuk mewujudkan keberhasilan RANHAM.

Dalam rangka memfokuskan diskusi anda, fasilitator akan menyajikan keberhasilan dan tantangan dalam melaksanakan kerja-kerja yang berhubungan dengan RANHAM yang telah diidentifikasi oleh peserta yang mengikuti lokakarya Maret 2006 (lihat **Lembar Rujukan 5**).

4. Fasilitator memimpin diskusi kelompok dimana berkesempatan untuk berkomentar dalam rangka mendapatkan daftar praktek-praktek terbaik untuk Panitia RANHAM NAD (gunakan **Lembar Kerja 3** untuk mencatat). Pertimbangkan hal-hal berikut:
  - Perbaiki pribadi apa yang telah anda buat dalam cara anda bekerja; sikap, ketrampilan dan pengetahuan anda sebagai hasil kerja anda dalam panitia atau dalam melaksanakan RANHAM?
  - Perubahan apa yang telah dibuat di dalam lembaga anda sebagai hasil kerja pada Panitia NAD atau pelaksanaan RANHAM?
5. Fasilitator mencatat daftar praktek-praktek terbaik yang telah disepakati pada tingkat pribadi dan bagian/lembaga.

**Akhir dari Kegiatan ■**

## Lembar Kerja 2: Peran Panitia RANHAM NAD

Apa peran peran individu, departemen dan kelembagaan dalam mengimplementasi RANHAM? Gunakan tempat di bawah ini untuk menampilkan catatan berdasarkan diskusi kelompok pada **Bagian A**.

### Peran Pribadi dalam melaksanakan RANHAM

### Peran bagian/lembaga dalam melaksankana RANHAM

#### **Lembar Rujukan 4: Kebutuhan Pendidikan dari Panitia RANHAM NAD**

Di bawah ini adalah daftar kebutuhan pendidikan yang diidentifikasi oleh peserta lokakarya Maret 2006.

- Lokakarya dan pelatihan bagi anggota RANHAM.
- Pelatihan bagi aparat Penegak Hukum dan Pemerintah.
- Membentuk gugus tugas untuk pendidikan HAM bagi populasi Aceh.
- Penguatan Pusat-pusat Studi HAM.
- Keterampilan Sosialisasi HAM.
- Meningkatkan kelompok fasilitator dan nara sumber (akademisi, pejabat Pemerintah, ORNOP).
- Bahan-bahan rujukan HAM.
- Dukungan dana dari pemerintah/lembaga donor.
- Infrastruktur (bangunan, peralatan).
- Memasukkan HAM dalam sektor pendidikan formal dan infomal.
- Bea siswa HAM (di dalam dan luar negeri), memperkuat jurusan-jurusan HAM.

### Lembar Rujukan 5: Keberhasilan dan Tantangan yang Diidentifikasi dalam Pelaksanaan Kerja yang Berhubungan dengan RANHAM

Di bawah ini adalah daftar keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan kerja yang berhubungan dengan RANHAM sebagaimana yang diidentifikasi oleh peserta lokakarya Maret 2006 yang melengkapi Kuesioner Tindak-Lanjut pada Juli 2006.

Keberhasilan	Tantangan
<p><b>Koordinasi Panitia RANHAM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat Kapasitas Panitia RANHAM.</li> </ul> <p><b>Sosialisasi HAM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pemahaman publik dan HAM dan nilai-nilainya.</li> <li>▪ Meningkatnya pemahaman masyarakat dan bilai-nilai HAM melalui penyelesaian sengketa pertanahan.</li> <li>▪ Jender dalam hukum perkawinan, dimana posisi suami istri setara.</li> <li>▪ Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pejabat yang menangani sengketa pertanahan melalui pendidikan informal.</li> <li>▪ Memberikan masukan kepada masyarakat di kampung saya dan masyarakat yang saya kunjungi, untuk memberikan perhatian pada perempuan dan anak-anak, dan menghindari kekerasan.</li> </ul>	<p><b>Koordinasi Panitia RANHAM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesulitan dalam mengidentifikasi strategi dalam mengembangkan kapasitas internal Panitia RANHAM, dan target diseminasi dan pelaksanaan RANHAM.</li> <li>▪ Koordinasi Panitia RANHAM Daerah yang lemah.</li> <li>▪ Evaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan sangat sulit karena tidak ada program yang berkelanjutan.</li> </ul> <p><b>Sosialisasi HAM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tantangan yang dihadapi adalah banyak orang yang tidak memahami nilai-nilai HAM sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi kepada mereka.</li> <li>▪ Perbedaan tingkat pendidikan diantara masyarakat menyebabkan sulitnya membuat pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai HAM.</li> <li>▪ Tingkat pendidikan masyarakat Aceh yang relatif rendah, sehingga sangat sulit untuk memberikan pemahaman secara cepat.</li> <li>▪ Sangat sulit untuk mengukur keberhasilan karena tidak ada penilaian terhadap apa yang telah diberikan kepada siswa.</li> <li>▪ Ada banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai budaya HAM yang sesuai untuk masyarakat yang Islami.</li> <li>▪ Masih banyak orang yang mempertanyakan budaya HAM yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Islam seperti di propinsi NAD.</li> </ul> <p><b>Konteks Politik Lokal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkembangan lingkungan politik yang stabil dan situasi keamanan.</li> <li>▪ Pemerintah daerah terlalu sibuk dengan Pilkada, sehingga koordinasinya tidak terlalu lancar.</li> </ul>

### Lembar Kerja 3: NAD RANHAM Committee Best Practices

Peningkatan **individual** yang telah anda capai dalam cara kerja anda, sikap, ketrampilan, dan pengetahuan sebagai akibat dari kerja anda dalam panitia NAD atau kerja implementasi RANHAM?

Perubahan apa yang telah dilakukan di departemen/lembaga anda sebagai hasil kerja panitia NAD atau kerja implementasi RANHAM?

### Kegiatan 3 Kelompok Diskusi Terfokus – Menciptakan Panitia RANHAM NAD yang Dinamis

#### Sasaran

- Untuk mengevaluasi pekerjaan yang anda lakukan sebagai bagian dari Panitia RANHAM NAD.
- Untuk mengenali praktek-praktek terbaik yang dapat memperbaiki kerja Panitia RANHAM NAD.

#### Waktu

1 jam 30 mnt

#### Uraian

Kegiatan sebelumnya melihat pada sumbangan anda pada pencapaian RANHAM dan mengenali sejumlah praktek terbaik. Pada kegiatan ini, anda akan mengevaluasi kerja Panitia RANHAM NAD untuk menentukan bagaimana memperbaiki efektifitasnya.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator akan menyajikan strategi menggunakan kelompok terfokus untuk mengevaluasi suatu topic tertentu.

Pada **Bagian B**, anda akan membentuk kelompok terfokus untuk mengevaluasi kerja Panitia RANHAM NAD.

Pada **Bagian C**, anda akan mengambil bagian dalam diskusi kelompok untuk mengenali praktek-praktek terbaik untuk Panitia RANHAM NAD.

#### 15 mnt

##### **Bagian A Presentasi**

Fasilitator menyajikan teknik menggunakan kelompok terfokus. Kelompok terfokus adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk menyampaikan pendapat, sikap atau reaksinya terhadap sebuah program, kegiatan atau hasil tertentu. Lihat **Lembar Rujukan 2** untuk keterangan tentang kelompok terfokus.

Untuk kegiatan ini, **tujuan kelompok terfokus adalah untuk mengevaluasi kerja Panitia RANHAM NAD.**

Berlanjut ▶ ▶ ▶

### **Kegiatan 3 lanjutan**

Dalam rangka mempersiapkan kelompok terfokus, fasilitator menyajikan analisa SWOT yang dilakukan pada lokakarya Maret 2006 (lihat **Lembar Rujukan 7**). Kekuatan dan kelemahan internal merupakan hal yang penting untuk latihan ini, karena kita akan mencari cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini.

**45 mnt**

#### **Bagian B      Kelompok Terfokus**

1. Kelompok membahas pertanyaan berikut:

##### **Seberapa efektif dinamika kelompok dalam Panitia RANHAM NAD?**

Pertimbangkan hal-hal berikut ini (gunakan **Bagian 1 dari Lembar kerja 4** untuk mencatat):

- Pemahaman bersama tentang tujuan Panitia RANHAM NAD
  - Partisipasi anggota
  - Komunikasi di antara anggota Panitia RANHAM NAD
  - Komunikasi Panitia RANHAM NAD tentang aksi/hasil/rekomendasi dengan rekan kerja dan penyelia.
2. Fasilitator menggunakan “*flipchart*” untuk mencatat hasil kelompok terfokus dan menempelkannya di dinding.

**30 mnt**

#### **Bagian C      Diskusi Kelompok**

1. Lanjutkan kelompok terfokus tersebut dengan membuat daftar rekomendasi untuk menciptakan Panitia RANHAM NAD yang lebih efektif (gunakan **Bagian 2 dari Lembar kerja 4** untuk mencatat).
2. Fasilitator mencatat rekomendasi tersebut pada “*flipchart*”.
3. Fasilitator dan nara sumber memberikan komentar pada daftar perubahan yang direkomendasikan untuk memperbaiki efektifitas Panitia RANHAM NAD.

**Akhir dari Kegiatan ■**

**Lembar Rujukan 2: Bagaimana Menyelenggarakan Sebuah Kelompok Terfokus**

<p><b>Langkah 1: Menyiapkan Kelompok</b></p>			
<p><b>Harus jelas mengapa anda mengumpulkan orang-orang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhitungkan apa yang betul-betul anda perlu tahu</li> <li>• Tentukan pertanyaan apa yang akan dijawab oleh kelompok</li> </ul> <p><b>Buat agenda yang akan bisa mencapai tujuan anda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentukan jumlah peserta dan perannya</li> <li>• Putuskan tujuan kelompok terfokus - (termasuk isi dan keluaran)</li> <li>• Buat aturan proses bagi kelompok terfokus</li> <li>• Tentukan waktu, tempat dan jangka waktu dari kelompok terfokus</li> </ul> <p><b>Pilih Peserta dan alokasikan peran-peran.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilih siapa dan berapa orang</li> <li>• Atur untuk Pemimpin-fasilitator</li> <li>• Rencanakan seseorang untuk mencatat kelompok terfokus</li> </ul> <p><b>Atur alat-alat dan pengaturan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentukan pengaturan ruang</li> <li>• Tentukan alat-alat yang dibutuhkan (flipchart, spidol, papan nama...)</li> <li>• Atur akomodasi bagi peserta bila perlu</li> </ul>	<p><b>Langkah 2: Luncurkan Kelompok</b></p> <p><b>Pendahuluan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalkan fasilitator</li> <li>• Perkenalkan peserta</li> </ul> <p><b>Jelaskan Agendanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tujuan kelompok terfokus</li> <li>• Perjelas peran-peran peserta</li> <li>• Bangun aturan-aturan proses                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran netral fasilitator</li> <li>• Peran pencatat sebagai ingatan kelompok</li> <li>• Sifat pertemuan (Curah pendapat, Pengambilan-keputusan)</li> <li>• Prosedur Penyelesaian Konflik</li> <li>• Hal-hal Administratif (rehat, pesan-pesan, waktu mulai...)</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Langkah 3: Menjalankan Kelompok Terfokus</b></p> <p><b>Kemajuan mengarah pada tujuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbing kelompok terfokus sedemikian rupa sehingga bekerja untuk tujuan yang semula telah diidentifikasi</li> <li>• Perkenalkan para peserta</li> </ul> <p><b>Pastikan bahwa partisipasi mengarah pada tujuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akankah anda membutuhkan tambahan informasi dari orang-orang ini?</li> <li>• Apakah anda akan mengumpulkan kelompok ini lagi?</li> <li>• Apakah prosesnya memuaskan?</li> <li>• Bagaimana anda akan menangani kelompok terfokus ini secara berbeda?</li> </ul>	<p><b>Langkah 4: Menindak lanjuti Kelompok terfokus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lakukan apa yang telah anda sepakati</li> </ul> <p><i>Di adaptasi dari Rossett, A.(1987) <u>Training Needs Assessment</u>. Englewood Cliffs, N.J. Educational Technnology Publications.</i></p>

### Lembar Rujukan 7: Analisa SWOT

Analisa SWOT dibawah ini dilakukan oleh peserta lokakarya Maret 2006.

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Panitia RANHAM</li> <li>▪ Pengetahuan tentang instrumen internasional</li> <li>▪ Berbagai disiplin ilmu terwakili di dalam Panitia</li> <li>▪ Pengalaman kelembagaan</li> <li>▪ Peraturan perundang-undangan</li> <li>▪ Sumber daya manusia</li> <li>▪ UU no 29/1999, 26/2006</li> <li>▪ SK Presiden (29/1998, 40/2003)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahan-bahan HAM yang tidak memadai</li> <li>▪ Waktu pelatihan yang terbatas</li> <li>▪ Koordinasi yang tidak memadai</li> <li>▪ Dukungan Pemerintah Daerah yang lemah</li> <li>▪ Sumber daya manusia yang tidak mencukupi</li> <li>▪ Dukungan dana yang rendah dari pemerintah daerah</li> <li>▪ Pemahaman HAM yang rendah di dalam Panitia RANHAM</li> <li>▪ Tidak ada visi bersama</li> <li>▪ Dukungan infrastruktur yang rendah</li> <li>▪ Pendidikan HAM yang terbatas</li> <li>▪ Sosialisasi HAM yang terbatas</li> <li>▪ Dukungan fasilitas yang terbatas</li> <li>▪ Koordinasi yang lemah</li> </ul>
Kesempatan	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan Pemerintah</li> <li>▪ Dukungan luar negeri</li> <li>▪ Lokakarya/pelatihan HAM</li> <li>▪ Organisasi Internasional yang prihatin dengan HAM di NAD</li> <li>▪ Tuntutan masyarakat untuk perlindungan HAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infrastruktur yang hancur</li> <li>▪ Tingkat pendidikan yang rendah</li> <li>▪ Kondisi HAM yang kurang mempedulikan HAM.</li> <li>▪ Intervensi dari pihak-pihak tertentu</li> <li>▪ Apatis</li> <li>▪ Nilai-nilai HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal.</li> </ul>

### Lembar kerja 4: Catatan-catatan Kelompok Terfokus

Pertanyaan Kelompok Terfokus	Catatan
<p><b>BAGIAN 1</b></p> <p><i>Seberapa efektifkah dinamika panitia RANHAM NAD?pertimbangkanlah hal hal berikut ini:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pemahaman bersama tentang fungsi panitia RANHAM NAD</i></li> <li>• <i>Keterlibatan anggota.</i></li> <li>• <i>Komunikasi antar anggota panitia RANHAM NAD</i></li> <li>• <i>Komunikas langkah-langkah /hasil/rekomendasi panitia RANHAM NAD dengan para rekat sejawat dan atasan.</i></li> </ul>	

Pertanyaan Kelompok Terfokus	Catatan
<p><b>BAGIAN 2</b></p> <p><i>Demi meningkatkan efektifitas panitia RANHAM NAD, apa perubahan di tingkat individu, departemen dan kelembagaan yang akan anda sarankan?</i></p>	

## Modul 3 Menganalisa Kerja HAM di dalam RANHAM

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
<b>Kegiatan 1</b>	Merumuskan Pemahaman Bersama tentang Pendidikan Hak Asasi Manusia	45 mnt
<b>Kegiatan 2</b>	RANHAM dan Perubahan Sosial – Pendidikan HAM yang efektif untuk Perubahan Sosial	1 jam 15 mnt
<b>Kegiatan 3</b>	Standard HAM Internasional	3 jam
<b>Kegiatan 4</b>	Menerapkan Konsep Jender di dalam RANHAM	1 jam



## Kegiatan 1 Merumuskan Pemahaman Bersama tentang Pendidikan Hak Asasi Manusia

### Sasaran

- Untuk merefleksikan pandangan pribadi anda tentang pendidikan HAM.
- Untuk merumuskan pemahaman bersama tentang pendidikan HAM.

### Waktu

45 mnt

### Uraian

Pada kegiatan modul sebelumnya, anda melihat dan mengevaluasi kerja anda yang berhubungan dengan RANHAM sampai saat ini. Pada kegiatan ini, anda akan mulai melihat dimana anda ingin berada pada saat RANHAM selesai dilaksanakan mengenai pemahaman bersama tentang pendidikan HAM.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, anda akan bekerja sendiri untuk merefleksikan pemahaman anda tentang pendidikan HAM.

Pada **Bagian B**, anda akan bekerja dalam kelompok kecil untuk lebih mengembangkan ide-ide anda tentang pendidikan HAM.

Pada **Bagian C**, anda akan berbagi hasil diskusi anda di kelompok kecil dengan kelompok yang lebih besar.

15 mnt

#### Bagian A Diskusi Kelompok Besar

1. Fasilitator menempelkan “*flipchart*” yang berisi jawaban anda dari **tugas pra-lokakarya** tentang pendidikan HAM dan memberikan komentar atas persamaan dan perbedaannya.
2. Fasilitator menyajikan sejumlah rumusan pendidikan HAM dan tujuannya (lihat **Lembar Rujukan 8**) dan menghubungkannya dengan rumusan anda dari **tugas pra-lokakarya**.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

**Kegiatan 1 lanjutan**

**10 mnt**            **Bagian B            Kerja Kelompok Kecil**  
Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok kecil dan meminta tiap kelompok menulis dua pertanyaan pada “*metacard*” tentang pendidikan HAM untuk ditanyakan pada fasilitator.

**20 mnt**            **Bagian C            Diskusi Kelompok Besar**  
1. Secara bergiliran, tiap kelompok mengajukan pertanyaannya pada fasilitator.  
2. Fasilitator menjawab dan memberikan komentar pada pertanyaan yang diajukan.  
3. Sebagai kelompok, pertimbangkan mengapa pendidikan HAM akan menjadi penting bagi para-pihak (*stakeholders*) yang telah diidentifikasi pada dengan siapa anda bekerja.

Akhir dari Kegiatan ■

## Lembar Rujukan 8: Rumusan Pendidikan HAM

### 1. Rumusan Pendidikan HAM dari Rancangan Rencana Aksi untuk Tahap Pertama (2005 – 2007) tentang Program Dunia yang diusulkan untuk Pendidikan HAM of the proposed World Programme for Human Rights Education, Sesi ke 59, Majelis Umum, Oktober 2004 \*(kutipan)

#### Pengantar

“Konferensi Dunia Hak-Hak Asasi Manusia menyadari pentingnya akan pendidikan, pelatihan, informasi publik mengenai hak-hak asasi manusia untuk memajukan dan mencapai kestabilan serta keharmonisan hubungan antar komunitas dan untuk membina saling pengertian, toleransi dan perdamaian” (Deklarasi dan Program Aksi Vienna, Bagian II.D, paragraf 78)

#### Konteks dan rumusan dari Pendidikan Hak Asasi Manusia

Komunitas internasional telah semakin sepakat bahwa pendidikan hak-hak asasi manusia merupakan kontribusi fundamental bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia seutuhnya. Pendidikan hak-hak asasi manusia bertujuan untuk membangun pemahaman bersama terhadap tanggungjawab setiap insan untuk mewujudkan terlaksananya hak-hak asasi manusia di dalam setiap kelompok masyarakat serta di dalam masyarakat luas. Dalam hal ini, pendidikan ham memberikan sumbangan berarti bagi pencegahan jangka panjang terhadap kekerasan dan konflik-konflik pelanggaran hak-hak asasi manusia, untuk memajukan kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi setiap orang pada proses pembuatan keputusan di dalam sistem yang demokratis, sebagaimana yang tertuang di dalam resolusi 2004/71 Komisi Hak-Hak Asasi Manusia.

Persyaratan mengenai pendidikan HAM telah dimasukkan dalam banyak instrument internasional, termasuk Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (pasal 26), Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (pasal 13), Konvensi Hak-Hak Anak (pasal 29), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (pasal 10), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (pasal 7), dan Deklarasi Wina dan Program Aksi (Bagian I, hal. 33-34 dan Bagian II, hal 78-82), juga Deklarasi dan Program Aksi Konferensi Dunia menentang Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Intoleransi yang berhubungan yang diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan, tahun 2001 (Deklarasi, hal. 95-97 dan Program Aksi, hal. 129-139)

Sesuai dengan sejumlah instrument di atas, yang menyediakan unsure-unsur rumusan pendidikan hak asasi manusia yang disepakati oleh masyarakat internasional, pendidikan hak-hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai pendidikan, pelatihan dan informasi yang bertujuan untuk membangun budaya hak-hak asasi manusia secara universal dengan berbagi pengetahuan, keahlian serta membentuk sikap-sikap yang diarahkan untuk:

### Lembar Rujukan - Lanjutan

- (a) Penguatan terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;
- (b) Pembangunan kepribadian dan martabat manusia seutuhnya;
- (c) Memajukan pemahaman, toleransi, kesetaraan jender dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, kelompok-kelompok masyarakat adat dan suku, kebangsaan, masyarakat etnik, agama dan linguistik;
- (d) Membuat semua orang dapat berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang merdeka dan demokratis dibawah naungan aturan hukum.
- (e) Membangun dan menjaga perdamaian; serta
- (f) Memajukan pembangunan berkelanjutan berbasis rakyat dan keadilan sosial.

## 2. Pemahaman Equitas tentang Pendidikan HAM

Pendidikan HAM adalah sebuah proses transformasi sosial yang dimulai dengan individu dan kemudian meluas mencakup masyarakat secara luas.

Tujuan pendidikan HAM adalah pemberdayaan. Hasilnya adalah perubahan sosial. Pendidikan HAM meliputi penggalian terhadap prinsip-prinsip dan instrumen HAM dan pemajuan refleksi dan pencarian yang bersifat kritis. Pada akhirnya pendidikan HAM akan menginspirasi orang untuk memegang kendali atas kehidupannya sendiri serta keputusan-keputusan yang yang mempengaruhi kehidupannya.

Praktek Pendidkan HAM didasarkan atas prinsip saling menghormati dan saling-belajar. Metode partisipatif yang mendorong untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman pribadi adalah sangat penting. Cara-cara komunkasinya sangat banyak (dari curah pendapat [*brainstorming*] sampai teater jalanan dan festival) tetapi tantang sesungguhnya adalah untuk menemukan bagaimana caranya untuk benar-benar dapat berkomunikasi diantara berbagai budaya, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda.

## Kegiatan 2 RANHAM dan Perubahan Sosial – Pendidikan HAM yang efektif untuk Perubahan Sosial

### Sasaran

- Untuk mengenali unsur-unsur utama dari teori pembelajaran transformatif.
- Untuk merefleksikan potensi-potensi transformatif pada kerja-kerja pendidikan HAM.
- Untuk menerapkan model potensi transformatif pada evaluasi sasaran RANHAM tentang diseminasi dan pendidikan HAM

### Waktu

1 jam 15 mnt

### Uraian

Pada kegiatan sebelumnya anda telah mengenali pemahaman umum tentang pendidikan HAM. Pada kegiatan ini, anda akan melihat bagaimana pendidikan HAM menjadi sebuah alat yang efektif untuk perubahan sosial di Indonesia.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator akan membuat presentasi singkat tentang teori pembelajaran transformatif theory dan memberikan sejumlah contoh untuk mengevaluasi hasil-hasil.

Pada **Bagian B**, anda akan bekerja dalam kelompok kecil untuk you menerapkan model potensi transformatif pada beberapa sasaran RANHAM tentang diseminasi dan pendidikan HAM.

Pada **Bagian C**, anda akan berbagi hasil diskusi anda dengan kelompok besar.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

**Kegiatan 2 lanjutan**

**20 mnt**

**Bagian A Presentasi**

1. Fasilitator menyediakan tinjauan umum tentang bagaimana “transformasi social” dirumuskan (lihat **Lembar Rujukan 9 dan 10**).
2. Fasilitator akan menggambarkan kondisi ideal untuk pembelajaran transformatif (lihat **Lembar Rujukan 9**) dan menyediakan sejumlah contoh-contoh strategi yang diambil untuk mengevaluasi hasil-hasil (lihat **Lembar Rujukan 10 dan Lampiran 11 dan Lampiran 2** untuk informasi atau indicator-indikator).

Setelah presentasi, anda akan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.

**25 mnt**

**Bagian B Kerja Kelompok Kecil**

1. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok kecil dan menugaskan tiap kelompok membahas satu sasaran RANHAM tentang diseminasi dan pendidikan HAM (lihat **Lembar Rujukan 3**).
2. Di dsalam kelompok kecil anda, refleksikan perubahan apa yang anda bayangkan akan terjadi pada individu, lembaga dan masyarakat sebagai hasil dari kerja pendidikan HAM anda untuk sasaran ini.
3. Siapkan versi “flipchart” dari **Lembar Kerja 5** untuk mencatat hasil diskusi anda.

**30 mnt**

**Bagian C Laporan Kerja Kelompok**

Kelompok besar berkumpul kembali. Tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya (masing-masing 5 mnt). Fasilitator menandai hubungan antara pembelajaran transformatif dengan evaluasi hasil yang disajikan.

**Akhir dari Kegiatan ■**

## Lembar Rujukan 9: Pembelajaran Transformatif

### Transformasi Sosial, Pembelajaran Transformatif dan Potensial Transformatif

#### Menjabarkan Perubahan (Transformasi) Sosial

Transformasi sosial dapat melibatkan perubahan dalam struktur sosial, hubungan antar tenaga kerja, urbanisasi, perilaku, kepercayaan, pandangan, nilai-nilai, kebebasan dan hak-hak, kualitas pendidikan, keuntungan secara kompetitif dan komparatif serta tata pemerintahan yang baik.

**Sumber:** Alvi, H. (2005). *The Human Rights of Women and Social Transformation in the Arab Middle East. Middle East Review of International Affairs*, Vol. 9, Juni 2005, No. 2.

#### Dalam Mencapai Transformasi Sosial

Taylor (1998), dengan merujuk pada pendapat Paulo Freire mengenai tujuan transformasi sosial, menunjuk Freire "... sangat menaruh perhatian pada transformasi sosial melalui pengungkapan kebenaran oleh orang-orang yang tertindas dengan cara membangkitkan kesadaran kritis mereka dimana mereka belajar untuk menerima pertentangan-pertentangan sosial, politis dan ekonomi, serta mengambil tindakan dalam melawan elemen-elemen opresif kebenaran."

**Sumber:** Taylor, E. (1998). *The Theory and Practice of Transformative Learning: A Critical Review. Ohio: Vocational Education, Ohio State University*. Dapat diakses melalui alamat web: [www.cete.org/acve/mp\\_taylor\\_01.asp](http://www.cete.org/acve/mp_taylor_01.asp) (diakses pada tanggal 6 Oktober 2004)

#### Pembelajaran Transformatif

Mezirow, yang membuat teori pembelajaran transformatif, menyatakan bahwa para individu dapat ditransformasi/ dirubah melalui sebuah proses refleksi kritis. Ia lalu menjelaskan bahwa dalam pembelajaran transformatif, pembelajaran yang paling kentara justru timbul dalam ranah komunikatif yang "melibatkan pengidentifikasian pemikiran, nilai, kepercayaan serta perasaan yang bermasalah, secara kritis menguji asumsi yang mendasari hal-hal tersebut, menguji pembenaran mereka melalui diskursus rasional dan membuat keputusan yang diambil berdasarkan hasil konsesus." (Taylor, 1998, p. 43)

**Source:** Nazzari, V., et al. (Canadian Human Rights Foundation, yang merupakan nama Equitas sebelumnya) (2005). *Using Transformative Learning as a Model for Human Rights Education: A Case Study of the Canadian Human Rights Foundation's International Human Rights Training Program, Intercultural Education*, Vol. 16, No. 2, Mei 2005, halaman. 171-186.

#### Model Potensial Transformatif

Model potensial transformatif merupakan sebuah representasi visual mengenai bagaimana pembelajaran transformatif dapat menciptakan sebuah dampak pada tingkat individual, lembaga, dan masyarakat yang digambarkan dalam **Lembar Rujukan 10**.

## **Praktik-praktik Penting dan Kondisi-kondisi Ideal untuk menerapkan Pembelajaran Transformatif**

Di bawah ini merupakan tindakan-tindakan serta keadaan-keadaan penting dalam menerapkan pembelajaran transformatif seperti yang ditunjukkan oleh J. Mezirow<sup>1</sup> dan para peneliti sesudahnya yang mendukung serta memperluas penemuan-penemuannya.

### **1) Kondisi-kondisi belajar yang ideal**

- Kondisi-kondisi belajar yang meningkatkan rasa keamanan, keterbukaan serta kepercayaan (contohnya kelayakan lingkungan pelatihan).

### **2) Situasi pembelajaran yang terbuka dan mengutamakan refleksi kritis**

- Dibentuknya situasi pembelajaran yang demokratis, terbuka, rasional, memiliki akses kepada semua informasi yang ada serta mengutamakan refleksi kritis.

### **3) Pembelajaran transformatif sebagai pengalaman**

- Pembelajaran yang mensyaratkan adanya saling berbagi pengalaman HAM secara pribadi maupun profesional

### **4) Kurikulum yang berpusat pada peserta**

- Metode-metode struktural efektif yang mengutamakan pendekatan berpusat pada siswa, mengangkat otonomi, keterlibatan dan kerjasama para siswa.
- Kegiatan-kegiatan yang memberi dukungan terhadap eksplorasi perspektif pribadi alternatif, pengajuan masalah serta refleksi kritis.

### **5) Umpan balik dan penilaian diri**

- Keadaan-keadaan pembelajaran yang mendukung umpan balik yang layak dan tepat waktu merupakan sebuah aspek utama dalam proses pembelajaran partisipatif.
- Berada dalam sebuah lingkungan yang mendukung kemampuan untuk tidak memberikan kritik terhadap ide orang lain secara pribadi dan bagaimana menanggapi kritik dari orang lain.

### **6) Pengaturan kelompok untuk pembelajaran transformatif**

Kondisi-kondisi signifikan bagi pembelajaran transformatif dalam konteks kelompok meliputi:

- Kesempatan untuk saling mengenal latar belakang budaya dari seluruh peserta di dalam kelompok.

---

<sup>1</sup> Jack Mezirow memulai teori pembelajaran transformatif. Ia merupakan Profesor Emeritus Pendidikan Lanjutan dan Dewasa pada *Teachers College, Columbia University*. Titik berat penelitian Professor Mezirow adalah pada pembelajaran dan pendidikan bagi orang dewasa. Hasil kerjanya telah membuahkan sebuah perubahan teori Transformasi yang melingkupi dimensi generic serta proses pembelajaran dan dampaknya bagi para pendidik orang dewasa.

**Lembar Rujukan - Lanjutan**

- Perlunya menghargai dan tidak menghindari “ketidaksepahaman dan konflik”.
- Keharusan melaksanakan ide-ide baru.

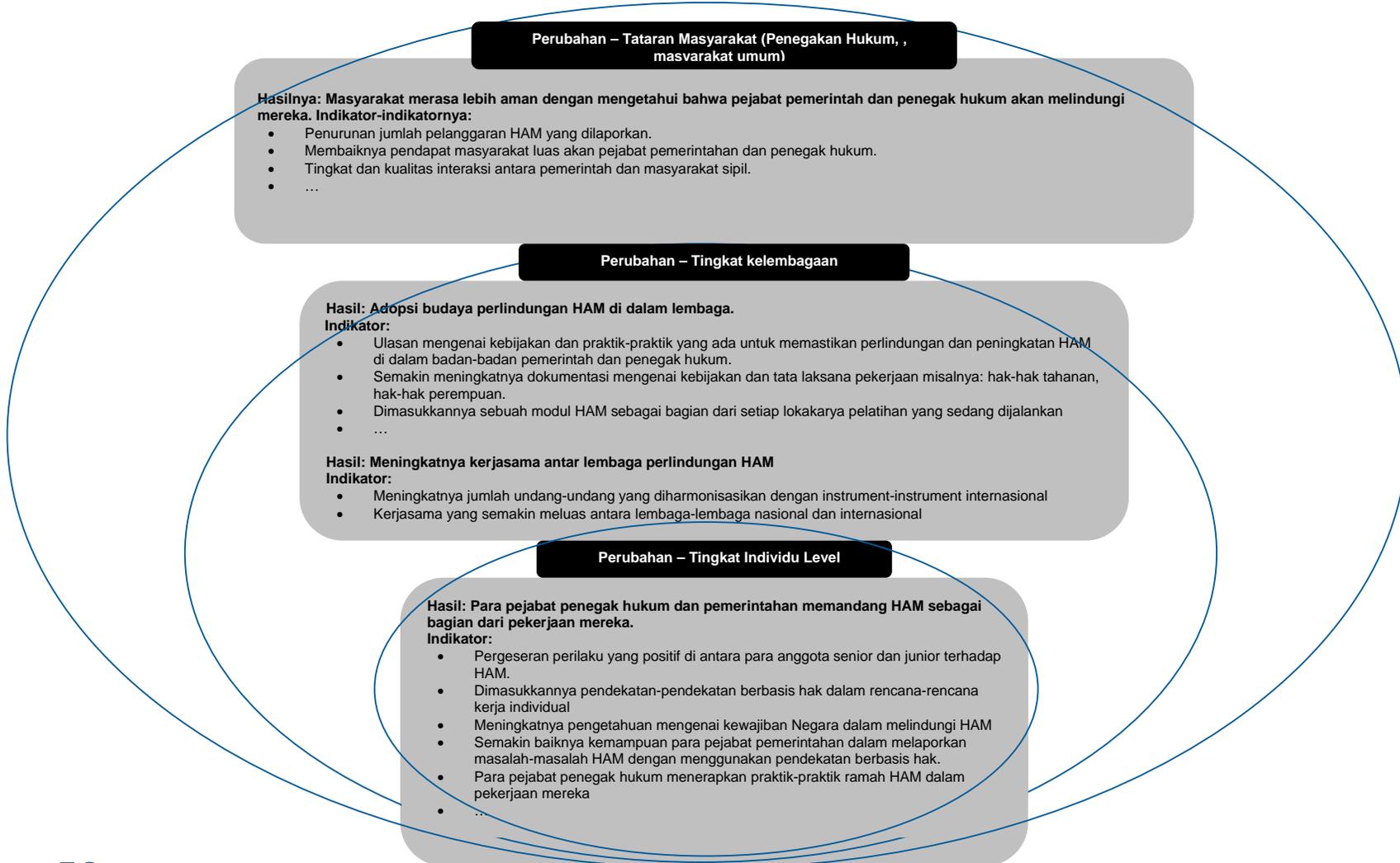
**7) Karakteristik Fasilitator**

- ‘Guru’ harus dapat dipercaya, bersikap empati, peduli, mempertahankan keaslian, jujur dan menunjukkan integritas tingkat tinggi.

**Sumber:** Nazzari, V., et al. (*Canadian Human Rights Foundation*, nama Equitas sebelumnya). (2005). *Using Transformative Learning as a Model for Human Rights Education: A Case Study of the Canadian Human Rights Foundation’s International Human Rights Training Program*, Pendidikan interkultur Vol. 16, No. 2, Mei 2005, hal. 171-186.

## Lembar Rujukan 10: Contoh Model Potensial Transformatif

Contoh berikut ini menggambarkan potensial transformatif pendidikan HAM dengan menggunakan tujuan RANHAM “peningkatan pemahaman dan kesadaran para pejabat penegak hukum dan pemerintahan mengenai pentingnya HAM dalam melaksanakan tugas mereka.”



## Lembar Rujukan 11: Indikator-indikator: Definisi Utama

**Sumber:** *Results-Based Management* di Pernyataan Kebijakan-CIDA. Tersedia secara online di: <http://www.acdi-cida.gc.ca/>.

### Indikator

Sebuah indikator merupakan sebuah ukuran atau petunjuk yang membantu menghitung atau menggambarkan pencapaian hasil. Indikator akan membantu dalam menunjukkan kemajuan ketika segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan tanda peringatan awal ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Indikator-indikator itu hanya akan memberikan petunjuk saja – indikator-indikator itu tidak akan menceritakan mengenai keseluruhan cerita. Misalnya, indikator-indikator itu tidak akan menjelaskan mengapa kemajuan terjadi ataupun tidak. Memilih indikator-indikator yang ‘tepat’ adalah sangat penting. Data yang digunakan untuk membuat indikator harus dapat diandalkan dan konsisten seiring dengan berjalannya waktu, peka terhadap kemajuan yang membawa hasil, layak dan mudah dikumpulkan serta dianalisis, dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Sumber: UNFPA. (2000). *Results-Based Management* di UNFPA. Tersedia secara online di :<http://www.unfpa.org/results/docs/rbminfomaterials.doc>.

### Data Baseline

Serangkaian keadaan yang terjadi di awal sebuah program/proyek. Hasil dari proyek tersebut akan diukur atau dinilai berbanding terhadap data *baseline* tersebut. Istilah lain yang juga biasa digunakan adalah *benchmark*: sebuah poin Rujukan dimana dari situ ukuran-ukuran dapat dibuat.

### Indikator-indikator Kuantitatif

Ukuran-ukuran kuantitas, termasuk pernyataan statistik. Indikator-indikator kuantitatif memiliki nilai numerik.

- Jumlah...
- Frekuensi dari...
- Persentase dari...
- Rasio dari ...

### Indikator-indikator Kualitatif

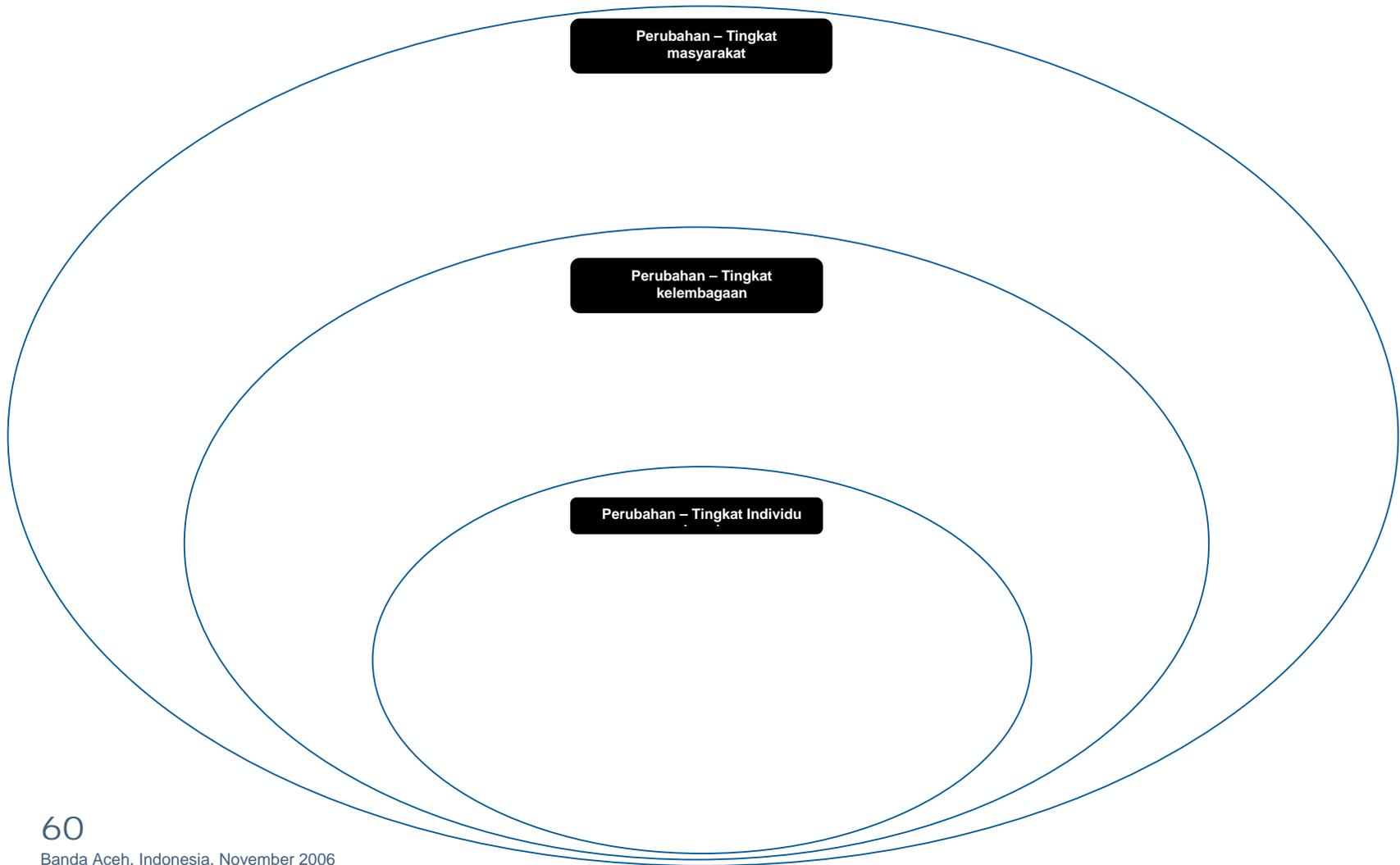
Penilaian, Pendapat, Persepsi, dan Perilaku yang diturunkan dari analisis subyektif.

- Munculnya...
- Kualitas...
- Perluasan...
- Tingkat...

## Lembar kerja 5: Potensi Transformatif Kerja Pendidikan HAM Anda

Sasaran \_\_\_\_\_

Kelompok sasaran7: \_\_\_\_\_



## Kegiatan 3 Standard Hak Asasi Manusia Internasional

### Sasaran

- Untuk mengkaji ulang tingkat pengetahuan anda tentang instrument HAM internasional.
- Untuk menganalisa 4 instrumen perlindungan HAM utama, yaitu,
  - Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)
  - Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)
  - Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (KPSBDP)
  - Konvensi Hak-hak Anak (KHA)
- Untuk mengenali istilah-istilah kunci yang berhubungan dengan perlindungan dan pemajuan HAM.

### Waktu

3 jam

### Uraian

Pada dua kegiatan sebelumnya anda telah menemukan prinsip tentang bagaimana pendidikan HAM bias digunakan sebagai alat yang efektif untuk perubahan sosial. Pada kegiatan ini, anda akan melihat prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari standard HAM internasional yang membutuhkan diseminasi dan pendidikan.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, nara sumber akan membahas instrumen perlindungan HAM utama yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pada **Bagian B**, akan ada waktu tanya jawab dengan nara sumber.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

### **Kegiatan 3 lanjutan**

**2 jam**

#### **Bagian A Presentasi**

Nara sumber mulai dengan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta mengenai instrumen internasional yang dibahas selama lokakarya Maret 2006 (KIHSP, KIHESB, KPSBDP dan KHA).

Sebagai pengingat: selama lokakarya Maret 2006, peserta dibagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok memeriksa satu instrumen menggunakan criteria berikut ini:

- Hak-hak yang dilindungi
- Kewajiban yang dimiliki Negara
- Keterbatasan-keterbatasan
- Kewajiban/tanggung Jawab yang dimiliki publik
- Mekanisme untuk memantau pengaduan
- Protokol optional protocol dan tujuannya
- Sifat-sifat khusus lainnya
- Penerapan yang mungkin di Indonesia

Nara sumber akan menyediakan penjelasan lebih lanjut tentang beberapa konsep dan istilah-istilah kunci yang digunakan pada instrument internasional.

Penjelasan lebih lanjut tentang istilah-istilah:

- Mengambil Langkah-Langkah dengan semua sarana yang tepat (*Undertake steps by all appropriate means*)
- Mencapai secara bertahap (*Progressive realization*)
- Hingga batas maksimum sumberdaya yang tersedia (*Maximum of available resources*)
- Bantuan dan kerjasama internasional

Konsep-konsep :

- Kandungan standard minimum (*Minimum core content*)
- Justisibilitas (*Justiciability*)
- Menghindari tindakan retrogresif (*retrogressive measures*)

Nara sumber juga menyediakan contoh-contoh spesifik untuk menggambarkan bagaimana Kanada dan negara-negara lain menjamin harmonisasi instrument internasional kedalam peraturan perundang-undangan nasional.

**Berlanjut ▶ ▶ ▶**

**Kegiatan 3 lanjutan**

**1 jam**

**Bagian B Periode tanya jawab**

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok.
2. Tiap kelompok sepakat atas dua pertanyaan yang ingin dijawab oleh nara sumber sehubungan dengan topic. Tiap kelompok mencatat pertanyaannya pada “*metacard*” dan menyerahkannya pada nara sumber.
3. Nara sumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tiap kelompok. Gunakan **Lembar Kerja 6** untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan dari kelompok anda dan kelompok lain. Fasilitator akan memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab akan disampaikan kemudian di dalam lokakarya.

**Akhir dari Kegiatan ■**

**Lembar Kerja 6: Pertanyaan tentang Instrumen International**

Pertanyaan	Catatan

## Kegiatan 4 Menerapkan konsep Jender di dalam RANHAM

### Sasaran

- Untuk mengenali konsep-konsep kunci tentang jender dan prinsip-prinsip non diskriminatif dan kesetaraan karena semuanya diterapkan di dalam HAM.
- Untuk memeriksa bagaimana perspektif jender dapat diterapkan pada kerja-kerja yang berhubungan dengan RANHAM.

### Waktu

1 jam 45 mnt

### Uraian

Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan terhadap penikmatan semua hak asasi manusia adalah salah satu prinsip dasar yang diakui oleh hukum internasional dan diperjelas di dalam instrumen HAM internasional utama sebagaimana dilihat pada kegiatan sebelumnya.

Jender mempengaruhi kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak-hak mereka. Pemahaman konsep jender di dalam masyarakat merupakan hal yang penting untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia yang setara oleh laki-laki dan perempuan.

Documen kunci yang bisa membantu memperjelas kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah **Komentar Umum no 16** Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: **Kesetaraan Hak antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Penikmatan semua Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lampiran 3)**.

Kegiatan ini dibagi menjadi 3 bagian.

Pada **Bagian A**, tim Equitas akan memimpin diskusi tentang konsep dasar jender.

Pada **Bagian B**, peserta akan memeriksa bagaimana perspektif jender dapat diterapkan di dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan RANHAM.

**Berlanjut ▶ ▶ ▶**

**Kegiatan 4 lanjutan**

**45 mnt**

**Bagian A Presentasi dan Diskusi Kelompok**

Tim Equitas memimpin diskusi kelompok besar tentang konsep-konsep dasar jender. Silahkan merujuk pada **Lembar Rujukan 12** untuk informasi lebih lanjut tentang konsep jender dan **Lampiran 3** untuk Komentar Umum no 16 Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kesetaraan Hak antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Penikmatan semua Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

**1 jam**

**Bagian B Diskusi Kelompok**

Tim Equitas memimpin diskusi kelompok besar dalam menerapkan persepektif jender dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan RANHAM.

Pertanyaan untuk dipertimbangkan:

- Ketika peserta lokakarya Maret 2006 mengidentifikasi tantangan pada kerja mereka yang berhubungan dengan RANHAM, beberapa diantara mereka mencantumkan bahwa masyarakat “mempertanyakan budaya HAM yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Islam.” Bagaimana konsep jender ditanggapi dalam masyarakat Islam?
- Apakah hak-hak perempuan yang dinyatakan dalam instrumen internasional direfleksikan dengan cara yang sama di dalam hukum-hukum syariah? Jika tidak, apa perbedaannya? Jika ya, apa kesamaannya?
- Bagaimana kerja anda merefleksikan perspektif jender?

**Akhir dari Kegiatan ■**

## Lembar Rujukan 12: Jender – Konsep-konsep Dasar

**Sumber:** UNDP. (2004). *Moving from Policy Moving from Policy to Practice: A Gender Mainstreaming Strategy for UNDP India*. Tersedia secara online di: <http://www.undp.org.in/REPORT/Gstrat/Default.htm>.

- Istilah “Jender” digunakan untuk menggambarkan serangkaian kualitas dan perilaku yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan oleh masyarakat mereka. Identitas sosial seseorang dibentuk oleh pengharapan-pengharapan ini. Pengharapan-pengharapan ini berakar dari pemikiran bahwa kualitas, perilaku, karakteristik, kebutuhan dan peran tertentu bersifat ‘natural’ bagi laki-laki, sementara kualitas dan peran yang lain bersifat ‘natural’ bagi perempuan.
- Jender bukanlah hal yang biologis – anak perempuan dan anak laki-laki lahir dengan tidak mengetahui bagaimana mereka harus terlihat, berpakaian, bicara, berperilaku, berpikir atau bertindak. Identitas ‘terjender’ maskulin dan feminin mereka dibentuk melalui proses **sosialisasi**, yang kemudian menyiapkan mereka pada peran sosial yang diharapkan dapat mereka mainkan. Peran-peran dan pengharapan-pengharapan sosial ini berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain dan juga pada tiap rentang waktu dalam sejarah. Mereka dapat dan memang berubah.
- Hubungan Jender bersifat **patriarki** – yang maksudnya hubungan-hubungan tersebut merefleksikan dan memperkuat hirarki dimana perempuan selalu berada di bawah laki-laki. Ketaklukan perempuan tersebut terlihat dalam ketidaksetaraan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat, demikian pula dalam interaksi sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta hubungan antar manusia.
- Struktur dan lembaga sosial patriarki dipertahankan dan diperkuat oleh sistem nilai dan aturan budaya yang mempropagandakan anggapan keinferioritasan perempuan. Setiap budaya memiliki contoh-contoh kebiasaannya sendiri yang menunjukkan nilai rendah terhadap perempuan.
- Patriarki membuat para perempuan tak berdaya dalam berbagai cara – dengan meyakinkan mereka akan inferioritas diri mereka sendiri terhadap para laki-laki; dengan meminta mereka memenuhi peran-peran dan perilaku ‘layak’ yang telah dilekatkan pada mereka; dengan menafikkan kuasa atas tubuh, hidup dan tenaga kerja mereka sendiri; dengan membatasi akses mereka terhadap sumber-sumber serta membatasi kesempatan mereka terlibat dalam keputusan untuk kehidupan mereka sendiri.
- Berbagai bentuk pengendalian ini seringkali bekerja saling menguatkan satu sama lain, dan telah menghasilkan pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses sosial, ekonomi dan politik. Ketaklukan perempuan terlihat dalam **kondisi sosio-ekonomi** perempuan (seperti tingkat kesehatan, pendapatan dan pendidikan mereka) demikian juga dalam **posisi** mereka atau tingkat otonomi dan pengendalian atas hidup mereka.

- Kesetaraan Jender tidak hanya berkisar pada perubahan keadaan para perempuan – ia juga mensyaratkan transformasi struktur serta sistem yang berdasar pada akan ketaklukan perempuan dan ketidaksetaraan Jender. Transformasi ini tidak bisa dipaksakan oleh intervensi eksternal. Perempuan harus menjadi **agen-agen perubahan**.
- Kesetaraan Jender mengharuskan **pemberdayaan perempuan**, sebuah proses yang akhirnya akan menuju pada keterlibatan yang lebih luas dalam proses sosial dan politik, kuasa pengambilan keputusan yang lebih besar dan pada tindakan penuh kesadaran akan transformasi sosial.
- Proses pemberdayaan tidak bersifat sektoral – hal ini mencakup peran dan minat ganda perempuan, dan membahas hubungan internal antar mereka, yang akhirnya akan membuat perempuan mendapatkan kuasa yang lebih besar atas kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan karenanya memiliki berbagai dimensi.
  - Membangun pemahaman kritis akan penyebab dan proses ketidakberdayaan.
  - Meningkatkan rasa percaya diri dan perubahan terhadap citra diri.
  - Mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber daya alam, keuangan dan intelektual.
  - Mendapatkan kepercayaan diri, pengetahuan, informasi dan keterampilan dalam memahami dan terlibat dalam struktur dan proses sosial, ekonomi dan politik.
  - Meningkatnya partisipasi dalam dan pengendalian proses pengambilan keputusan di dalam dan diluar keluarga dan komunitas.
  - Perpindahan pada peran dan ruang yang baru, yang kemudian dipandang secara eksklusif sebagai ranah laki-laki.
  - Berhimpun untuk menanyakan, menantang dan merubah kepercayaan, praktik-praktik, struktur dan lembaga yang tidak adil dan tidak setara yang menguatkan ketidaksetaraan Jender.
- Proses pemberdayaan perempuan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar yang membentuk nilai, sistem dan lembaga yang telah bertahan sedemikian lama. Karenanya sangatlah tidak dapat dielakkan bahwa hal tersebut melawan daya tolak dari struktur kekuasaan yang ada. Lebih mudah bagi perempuan dengan cara **berhimpun** ketimbang maju sendiri-sendiri dalam membawa maju proses pemberdayaan melawan penolakan itu.
- Usaha-usaha pembangunan selama kurun waktu empat puluh tahun belakangan belum dan tidak secara luas mengatasi penyebab-penyebab mendasar dari ketaklukan perempuan, dan karenanya gagal dalam mempengaruhi kesetaraan Jender dengan cara yang cukup signifikan. Pendekatan-pendekatan arus utama terhadap pembangunan perempuan

## Lembar Rujukan - Lanjutan

belum berdasarkan kepada analisis kenyataan keseluruhan mengenai kehidupan para perempuan, namun justru lebih menitikberatkan pada peran mereka sebagai ibu dan ibu rumah tangga ataupun sebagai agen-agen ekonomi. Pembangunan perempuan dipandang sebagai sebuah isu “memperbolehkan mereka terlibat” dalam proyek yang mereka tidak terlibat dalam penentuannya, atau diputuskan oleh orang lain.

- Penekanan selanjutnya bergeser pada menjadikan perempuan sebagai sasaran melalui proyek-proyek khusus perempuan. Meskipun banyak dari proyek-proyek ini bersifat inovatif dan katalistik, namun sebagian besar lainnya bersifat kecil, terkucilkan dan merupakan inisiatif pendana yang hanya memiliki dampak yang tidak bertahan lama. Dimana komponen perempuan dimasukkan dalam proyek-proyek arus utama besar, tujuan serta prioritas proyek-proyek ini seringkali dipengaruhi atau memahami kebutuhan dan perhatian para perempuan.
- Kini semakin dapat diterima bahwa ketidaksetaraan Jender bukanlah hasil dari integrasi perempuan atau kurangnya integrasi dalam pembangunan, ataupun kurangnya keterampilan, penghargaan dan sumber daya mereka. Penyebab utama dari masalah tersebut bersemayam dalam struktur, lembaga, nilai dan kepercayaan sosial yang kemudian menciptakan dan mengokohkan ketaklukkan perempuan. Isu ini bukan sekedar “menambahkan” perempuan dalam berbagai proses, namun lebih kepada bagaimana membentuk proses-proses ini untuk membentuk ruang bagi keterlibatan perempuan tidak hanya dalam pelaksanaan agenda pembangunan namun juga dalam pengaturan agenda itu sendiri.
- Krisis global penurunan kualitas ekologi yang meningkat dengan pesat dan kemiskinan di tahun 1990an telah membawa pada tumbuhnya penerimaan terhadap kritik ideologi dominan dan kerangka kerja konseptual pembangunan oleh pergerakan manusia dan LSM baik di Selatan maupun Utara. Model-model dominan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi dan yang mengutamakan ekspor kini semakin disadari telah menghasilkan eksploitasi skala besar baik terhadap sumber daya alam maupun manusia. Perempuan merupakan pihak yang terkena dampaknya paling parah. Pekerjaan perempuan dan lingkungan telah dibandingkan dengan “subsidi yang mendukung seluruh masyarakat. Keduanya tidak dihargai atau bahkan dianggap gratisan sebagaimana pihak lain terus menerus mengeruk keuntungan dari mereka. ”
- Karenanya kebutuhan untuk bergeser dari **mengintegrasikan** perempuan ke dalam pendekatan-pendekatan pembangunan yang telah ada – dengan memberikan mereka “bagian terbesar dari kue yang telah teracuni” – ke suatu kerangka kerja pembangunan yang **setara dan berkelanjutan**. Hal ini juga membutuhkan usaha pembentukan pembangunan agar dapat merefleksikan

**Lembar Rujukan - Lanjutan**

visi, minat dan kebutuhan mereka yang telah dianggap tidak terlihat dan tidak memiliki kuasa oleh proses-proses arus utama.

- Perempuan dan kaum miskin bersama-sama membentuk kelompok mayoritas poluasi dunia. Perspektif dan pengalaman perempuan-perempuan miskin dapat menjadi sumber utama dalam transformasi cara pembangunan yang kita pahami selama ini. **Pengarusutamaan Jender karenanya merupakan sebuah strategi dalam mengatasi dan memutar krisis global pembangunan saat ini.**

## Modul 4 Perencanaan RANHAM – Langkah Selanjutnya

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
<b>Kegiatan 1</b>	Mengembangkan Kegiatan-kegiatan pendidikan HAM yang berhubungan dengan RANHAM	2 jam 30 mnt
<b>Kegiatan 2</b>	Kerangka Kerja Perencanaan	2 jam 45 mnt
<b>Kegiatan 3</b>	Mengembangkan Rencana Aksi Pribadi	1 jam 30 mnt



## Kegiatan 1 Mengembangkan Kegiatan-kegiatan pendidikan HAM yang berhubungan dengan RANHAM

### Sasaran

Untuk mengenali berbagai jenis kegiatan-kegiatan pendidikan HAM yang efektif yang dapat dilakukan oleh Panitia RANHAM NAD dalam rangka melindungi dan memajukan HAM.

### Waktu

2 jam 45 mnt

### Uraian

Pada kegiatan sebelumnya anda menganalisa standard HAM internasional dan prinsip-prinsipnya. Pada kegiatan ini, anda akan melihat bagaimana prinsip-prinsip itu bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan pendidikan HAM anda yang berhubungan dengan RANHAM.

Kegiatan ini dibagi menjadi empat bagian.

Pada **Bagian A**, Fasilitator akan membuat presentasi tentang pendekatan berbasis-hak dan kerangka kerja bagi penggunaannya.

Pada **Bagian B**, Anda akan bekerja di dalam kelompok kecil untuk menerapkan kerangka kerja pendekatan berbasis-hak untuk kegiatan-kegiatan pendidikan HAM.

Pada **Bagian C**, tiap kelompok akan mempresentasikan ide-idenya.

Pada **Bagian D**, fasilitator akan memberikan komentar terhadap presentasi tersebut dan menyediakan contoh-contoh tentang teknik-teknik pelatihan pendidikan HAM yang efektif.

### 30 mnt

#### Bagian A Presentasi

1. Fasilitator akan menyajikan arti dari pendekatan berbasis-hak dengan menyampaikan konsep-konsep berikut:

- perbedaan antara hak dan kebutuhan
- unsur-unsur pendekatan berbasis-hak
- pendekatan berbasis-hak dan pendidikan HAM.

Tinjauan umum tentang pendekatan berbasis-hak ada pada **Lembar Rujukan 13** sebagai rujukan anda selama presentasi.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

**Kegiatan 1 lanjutan**

2. Fasilitator kemudian akan menyajikan kerangka kerja untuk menggunakan pendekatan berbasis-hak pada pendidikan HAM (lihat **Lembar Rujukan 14**) dan menyediakan contoh-contoh kegiatan pendidikan HAM yang efektif.

**1 jam**

**Bagian B Kerja Kelompok Kecil**

1. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok kecil.
2. Di dalam kelompok kecil anda, pilih isu HAM saat ini yang anda hadapi dalam pekerjaan anda dan lakukan analisa dengan menggunakan pendekatan berbasis-hak. Fasilitator akan membantu kelompok untuk mengenali berbagai isu yang berbeda untuk dianalisa. Tuliskan isu kelompok anda pada ruang yang tersedia pada **Lembar Kerja 7**.
3. Identifikasi satu kegiatan pendidikan HAM yang bisa menanggapi isu tersebut. Pastikan bahwa kegiatan tersebut berhubungan dengan kerja anda sebagai bagian dari sasaran RANHAM untuk "Diseminasi dan Pendidikan HAM." (Lihat **Lembar Rujukan 13** untuk keterangan lebih lanjut tentang sasaran RANHAM tersebut).
4. Lengkapi seluruh **Lembar Kerja 7** dan bersiap untuk menyajikan hasil anda kepada kelompok besar pada **Bagian C**.

**30 mnt**

**Bagian C Presentasi Kelompok**

Tiap kelompok menyajikan hasil diskusinya kepada kelompok besar.

**45 mnt**

**Bagian D Diskusi Kelompok Besar**

Fasilitator merangkum poin-poin utama dari presentasi dan melengkapi presentasi tersebut dengan contoh-contoh dari teknik-teknik pelatihan pendidikan HAM yang dapat direfleksikan oleh Panitia RANHAM NAD (lihat **Lampiran 1**).

Akhir dari Kegiatan ■

## Lembar Rujukan 13: Pendidikan HAM dan Pendekatan Berbasis-Hak

### Pendekatan Berbasis-Hak

#### **Hak Asasi Manusia**

Hak-hak asasi manusia adalah milik setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, anak laki-laki atau perempuan, balita atau lansia, hanya karena dia seorang insan manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang memungkinkan saya dapat hidup secara terhormat.

Apabila sesuatu dinyatakan atau dikenali sebagai sebuah **hak**, itu berarti bahwa:

- Ada kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, memajukan dan memenuhi hak tersebut.
- Hak dapat dituntut. .

#### **Hak dan Kebutuhan**

**Hak** berbeda dengan **kebutuhan**. Kebutuhan adalah sebuah aspirasi. Kebutuhan dapat diakui, namun tidak harus berkaitan dengan kewajiban pemerintah. Kepuasan akan suatu kebutuhan tidak dapat dituntut. Sementara Hak mengharuskan kewajiban dari pemerintah dan dapat dituntut. Hak selalu dikaitkan dengan 'keberadaan'. Kebutuhan selalu dikaitkan dengan 'kepemilikan'.

#### **Pendekatan Hak**

- Hak harus diwujudkan
- Hak menuntut tanggungjawab dan kewajiban
- Hak adalah universal
- Hak hanya dapat terwujud melalui kepentingan hasil dan proses
- Semua hak sama pentingnya

#### **Pendekatan Kebutuhan**

- Kebutuhan dipenuhi atau dipuaskan
- Kebutuhan tidak menuntut tanggungjawab atau kewajiban
- Kebutuhan tidak harus universal
- Kebutuhan dasar dapat dipenuhi melalui cita-cita atau strategi berorientasi hasil
- Kebutuhan dapat diukur menurut skala prioritas

### **Pendekatan Berbasis-Hak**

- **ADALAH** sebuah kerangka kerja berdasarkan nilai-nilai dan prinsip HAM. Hal ini berdasarkan premis bahwa setiap manusia, dengan menjadi manusia, adalah pemegang hak.
- **MENGASUMSIKAN** bahwa manusia seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi pengembangan dirinya secara penuh.
- **MENGANGGAP** bahwa **hak berbeda dengan kebutuhan**. Hak Asasi Manusia melekat pada diri tiap laki-laki, perempuan dan anak. Kebutuhan

### Lembar Rujukan - Lanjutan

adalah sebuah aspirasi. **Kebutuhan** bisa saja absah (*legitimate*), tetapi memuaskan sebuah kebutuhan tidak dapat dituntut karena tidak perlu langsung dihubungkan dengan kewajiban Negara.

- **MELIPUTI** prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, akuntabilitas, pemberdayaan dan partisipasi.
- **MELIBATKAN** proses pemberdayaan mereka yang tidak menikmati hak-hak mereka untuk menuntut hak mereka. Hal ini tidak melibatkan sumbangan atau pertumbuhan ekonomi sederhana.
- **MENGINTEGRASIKAN** norma-norma, standard dan prinsip-prinsip sistim Ham internasional ke dalam perencanaan, kebijakan-kebijakan dan proses-proses program pengembangan, program sosial dan program-program lain.
- **MENDUKUNG** konsep bahwa semua orang, tanpa peduli jender, ras, agama, kesukuan, status social atau perbedaan lainnya, memiliki hak dasar untuk hidup secara bermartabat. Program-program berbasis-hak menanggapi seluruh aspek kehidupan manusia (contohnya, dari menjamin kebutuhan dasar hidup sampai dengan kebutuhan psikologis) . Mereka merupakan kesatuan dan menyeluruh.
- **MEMBUTUHKAN** penciptaan lingkungan dimana setiap orang bisa menikmati Hak Asasi Manusia.

### Prinsip-prinsip Pendekatan Berbasis Hak

#### 1. HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN HAK

- Membangun hubungan langsung dengan instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia internasional, regional dan nasional.
- Memahami berbagai macam hak yang tidak dapat direnggut, yang saling tergantung dan saling terkait: sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial.

#### 2. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS

- Mengenal para pengaju tuntutan (dan hak-hak mereka) serta para pelaksana tanggungjawab yang berkaitan (dan kewajiban-kewajiban mereka).
- Mengenal kewajiban-kewajiban positif para pelaksana (untuk melindungi, memajukan dan menyediakan) serta kewajiban-kewajiban negatif (untuk mengekang diri dari pelanggaran).

### 3. BERALIH DARI KETERGANTUNGAN MENUJU PEMBERDAYAAN

- Menitik beratkan para penerima manfaat sebagai pemilik hak dan pengarah pembangunan bukan sebagai obyek dari program dan aksi untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka.
- Memberikan kekuatan, kemampuan dan akses yang dibutuhkan bagi semua orang untuk merubah kehidupan mereka masing-masing, meningkatkan komunitas mereka dan mempengaruhi nasib mereka masing-masing. Menempatkan tekanan yang lebih tinggi lagi pada kekuatan-kekuatan setiap individu dan komunitas termasuk anak-anak untuk berperan lebih aktif lagi di dalam masyarakat tempat mereka tinggal.

### 4. PARTISIPASI

- Bertujuan mencapai tingkat partisipasi yang tinggi dari komunitas, masyarakat sipil, masyarakat adat, kaum perempuan, anak-anak dan lainnya.
- Memandang remaja dan anak-anak sebagai peserta aktif dalam menemukan penyelesaian konstruktif.

### 5. TIDAK DISKRIMINATIF

- Memberikan perhatian khusus pada diskriminasi terhadap kesetaraan, keadilan dan kelompok-kelompok terpinggirkan. Kelompok-kelompok ini bisa saja meliputi kelompok-kelompok perempuan, minoritas dan tahanan. Pendekatan berbasis hak menghendaki bahwa pertanyaan akan siapa yang terpinggirkan saat ini disini, akan dijawab oleh mereka sendiri.

Dengan menggunakan pendekatan berbasis hak dalam menyampaikan isu, maka perlu dijamin bahwa prinsip-prinsip tersebut diatas digunakan dan dihargai.

### Pendidikan HAM dan Pendekatan Berbasis-Hak

Pendidikan hak-hak asasi manusia meliputi ajaran bagaimana menerapkan pendekatan berbasis hak kedalam praktek. Dua tujuan pendidikan hak-hak asasi manusia yang paling utama adalah:

- Belajar *tentang* hak-hak asasi manusia (misalnya, sejarah hak-hak asasi manusia, dokumen-dokumen, mekanisme-mekanisme pelaksanaan).
- Belajar *untuk* hak-hak asasi manusia (misalnya, memahami dan menerima prinsip-prinsip kesetaraan dan martabat manusia serta komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak semua orang). Meliputi penjelasan nilai-nilai, perubahan sikap, pengembangan solidaritas dan keahlian untuk kegiatan advokasi dan aksi.

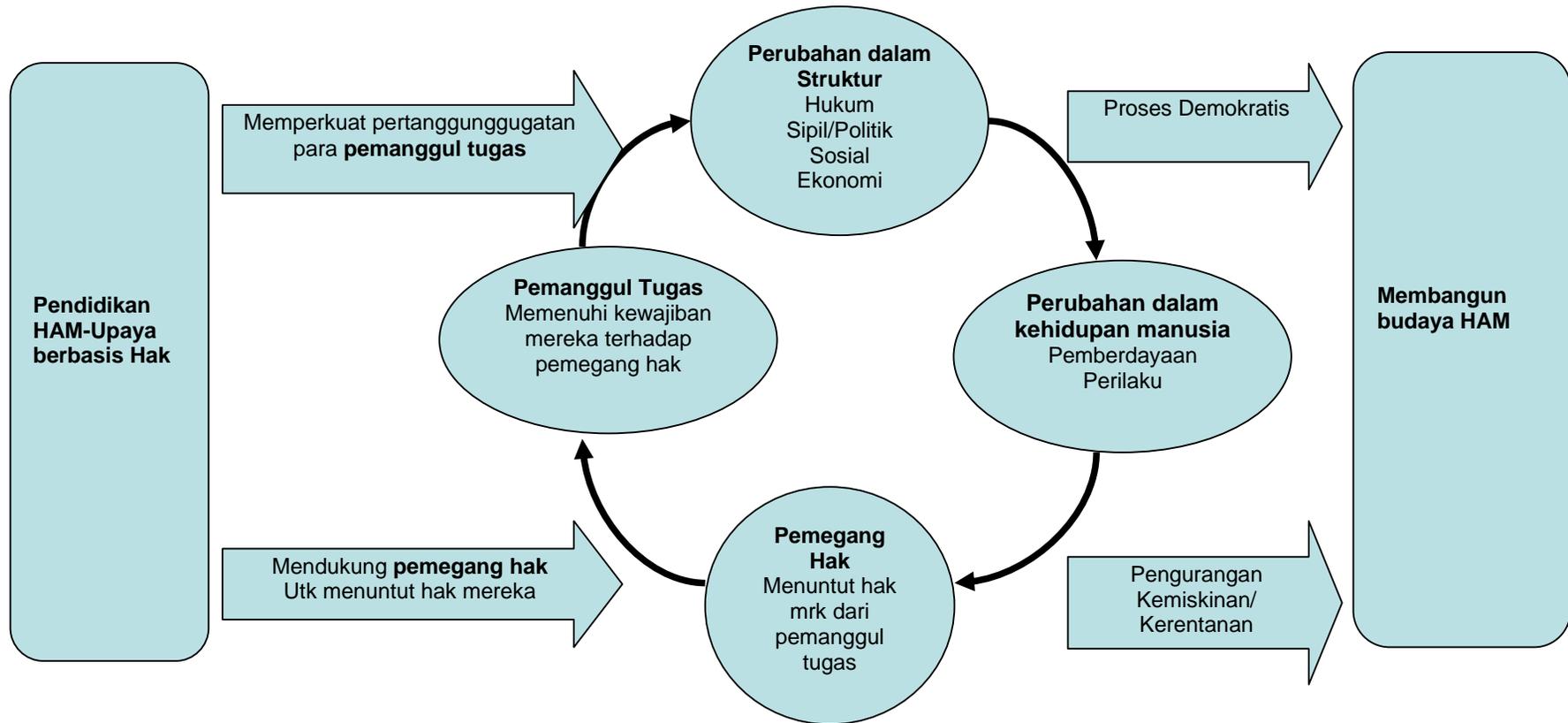
Prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak menjadi panduan bagi isi dan praktek pendidikan hak-hak asasi manusia.

### Lembar Rujukan - Lanjutan

Informasi tentang Pendekatan Berbasis Hak disarikan dari:

- UNICEF Canada, Children's Rights, CIDA, Continuous Learning Human Resources, December 2001.
- World Health Organisation, 25 Questions & Answers on Health & Human Rights, Health & Human Rights Publication Series, Issue No. 1, July 2002.
- Rios-Kohn, Rebecca, A Review of a UNICEF Country Programme, Based on Human Rights: The Case of Peru, UNICEF, November 2001.
- Institute for Child Rights & Interagency Coalition on AIDS and Development, Filling the Gaps: Using a Rights-Based Approach to Address HIV/AIDS and its Affects on South African Children, Youth and Families, Care and Support Guidelines, 2001.
- UNHCR website, <http://www.unhcr.ch/development/approaches-04.html>

## Lembar Rujukan 14: Kerangka Kerja Pendekatan Berbasis Hak



Diadaptasi dari Ljungman, C. M. (2004). *Applying a Rights Based Approach to Development: Concepts and Practices*. Berdasarkan sebuah BAB oleh Cecilia M. Ljungman dalam *Methods for Development Work and Research – A New Guide for Practitioners*, karangan Britha Mikkelsen Edisi Ke 2. Sage Publications, New Delhi. Tersedia secara online: [http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/events/february2005/documents/Ljungman\\_000.doc](http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/events/february2005/documents/Ljungman_000.doc)

### Lembar Rujukan 14: Kerangka Kerja Pendekatan Berbasis Hak (lanjutan)

Di bawah ini merupakan sebuah contoh dalam menganalisis isu HAM dengan menggunakan pendekatan berbasis hak.

Komponen Kerangka Kerja	Elemen yang harus diperhatikan
<b>1. Isu HAM:</b>	Ketidakcukupan standard hidup bagi orang-orang yang terlantar secara internal (IDP) karena konflik dan bencana alam.
<b>2. Hak-hak khusus apa saja yang dilanggar? (rujuklah pada hak yang digambarkan dalam instrumen internasional atau perundang-undangan nasional)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ standard hidup yang tercukupi (termasuk pangan dan bebas dari rasa lapar, mendapatkan air, sandang, papan dan terbebas dari pemindahpaksaan, meningkatnya kondisi hidup secara terus menerus)</li> <li>▪ Standard tertinggi kesehatan mental dan fisik yang dapat dipertahankan termasuk kesehatan dan kebebasan reproduksi dan seksual</li> <li>▪ Keamanan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pelayanan sosial</li> <li>▪ Dll.</li> </ul>
<b>3. Faktor-faktor Pendukung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sejumlah besar orang-orang terlantar secara internal dipaksa masuk ke dalam kamp-kamp pengungsi karena konflik dan bencana alam.</li> <li>▪ Kurangnya bahan dan jasa (pangan, air, bahan bakar, pelayanan kesehatan, dll) karena buruknya koordinasi</li> <li>▪ Struktur Pekerjaan terganggu atau hancur.</li> <li>▪ Buruknya penentuan hak kepemilikan, tidak adanya sistem untuk menuntut hak.</li> </ul>
<b>4. Pendidikan HAM untuk mengatasi isu:</b>	Lokakarya mengenai pendidikan HAM bagi para pejabat penegak hukum, pemerintah, serta LSM di daerah-daerah yang terkena konflik dan bencana alam
<b>5. Tujuan:</b>	Meningkatkan kondisi hidup orang-orang yang terlantar secara internal karena konflik dan bencana alam.
<b>6. Kelompok Sasaran:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pejabat penegak hukum bekerja di kamp-kamp pengungsian</li> <li>▪ Pejabat pemerintah bertanggungjawab terhadap reintegrasi orang-orang terlantar secara internal ke dalam masyarakat.</li> <li>▪ LSM membantu usaha-usaha penyelamatan.</li> </ul>
<b>7. Sasaran: memperkuat kemampuan peserta untuk:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengidentifikasi kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk standard hidup yang mencukupi.</li> <li>▪ Mengatur kamp-kamp bagi orang-orang terlantar secara internal (termasuk pembagian sumber daya dan keterlibatan dalam pembuatan keputusan)</li> <li>▪ Mengidentifikasi strategi bagi reintegrasi orang-orang terlantar secara internal ke dalam masyarakat, dengan perhatian utama kepada peningkatan kesejajaran antara lelaki dan perempuan.</li> </ul>
<b>8. Siapa saja para pemanggul tugas?</b>	Pemanggul tugas adalah pejabat-pejabat pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap reintegrasi orang-orang terlantar secara internal ke dalam masyarakat.

## Lembar Rujukan - Lanjutan

Komponen Kerangka Kerja	Elemen yang harus diperhatikan
<p><b>Bagaimana mereka memenuhi kewajiban mereka terhadap pemegang hak?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengetahui kewajiban pemerintah dengan tetap memegang teguh standard hidup yang mencukupi.</li> <li>▪ Instrumen Internasional dan perundang-undangan nasional mengenai hak terhadap standard hidup yang mencukupi.</li> <li>▪ Contoh praktik-praktik terbaik dalam mencapai standard hidup yang mencukupi.</li> <li>▪ Pembuatan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan.</li> </ul>
<p><b>9. Siapa saja pemegang hak?</b></p> <p><b>Bagaimana pemegang hak menuntut hak mereka dari pemangkul tugas?</b></p>	<p>Pemegang Hak adalah orang-orang yang terlantar secara internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LSM dapat memberitahukan mereka akan hak-hak mereka</li> <li>▪ Perwakilan orang-orang yang terlantar secara internal dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan bagi manajemen IDP di dalam kamp-kamp serta bagi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.</li> <li>▪ Pemerintah dapat menyediakan mekanisme pengajuan keluhan bagi perselisihan mengenai hak kepemilikan</li> </ul>
<p><b>10. Bagaimana hal ini terkait dengan RANHAM?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pemahaman dan kesadaran pejabat-pejabat penegak hukum dan pemerintahan mengenai pentingnya HAM dalam melaksanakan tugas mereka.</li> </ul>

### Lembar Kerja 7: Kegiatan pendidikan HAM RANHAM Menggunakan pendekatan berbasis-hak

Komponen kerangka	Unsur-unsur pertimbangan
1. isu-isu HAM:	
2. Hak-hak spesifik apa yang dilanggar (buat rujukan terhadap hak-hak sebagai mana dijabarkan pada instrumen internasional atau perundangan nasional)	
3. Faktor-faktor penyumbang:	
4. Pendidikan HAM untuk menanggulangi isu-isu tersebut:  Jenis kegiatan (-kegiatan) pendidikan HAM apa yang dapat anda lakukan untuk menanggulangi isu ini?	
5. Tujuan kegiatan (-kegiatan) pendidikan HAM anda:	

**Lembar kerja - lanjutan**

Komponen kerangka	Unsur-unsur pertimbangan
<p><b>6. Kelompok Sasaran:</b></p>	
<p><b>7. Tujuan: memperkuat kemampuan peserta untuk:</b></p>	
<p><b>8. Siapa yang berkewajiban?</b></p> <p><b>Bagaimana mereka memenuhi kewajiban kepada para pemangku hak-hak?</b></p>	

Komponen kerangka	Unsur-unsur pertimbangan
<p><b>9. Siapa para pemangku hak?</b></p> <p><b>Bagaimana para pemangku hak menuntut hak mereka dari para pemangku kewajiban?</b></p>	
<p><b>10. Bagaimana isu ini berkaitan dengan RANHAM ?</b></p>	

## Kegiatan 2 Kerangka Kerja Perencanaan

### Sasaran

Untuk merencanakan langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan diseminasi dan pendidikan HAM RANHAM ke dalam pekerjaan anda.

### Waktu

2 jam 45 mnt

### Uraian

Pada kegiatan sebelumnya anda telah melihat bagaimana caranya mengembangkan kegiatan pendidikan HAM menggunakan pendekatan berbasis-hak. Pada kegiatan ini, anda akan mulai melihat prioritas RANHAM dan merencanakan bagaimana caranya anda akan mencapai prioritas-prioritas ini menggunakan kegiatan pendidikan HAM.

Walaupun banyak peserta bekerja pada bagian dan/atau lembaga yang berbeda, mungkin tetap ada minat umum tentang jenis kegiatan pendidikan HAM yang bisa dilakukan. Contoh, mungkin ada sejumlah peserta yang bekerja lembaga pemasyarakatan, dan akan berguna bagi para peserta ini untuk berpikir kegiatan pendidikan HAM bersama yang dapat mereka lakukan sebagai bagian dari RANHAM. Ini sebabnya mengapa anda akan dibagi kedalam kelompok kecil yang memiliki minat yang sama untuk kegiatan ini.

Kegiatan ini dibagi menjadi empat bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator akan menyajikan model kerangka kerja perencanaan untuk memasukkan pendidikan HAM dalam pekerjaan anda yang akan digunakan pada kegiatan ini.

Pada **Bagian B**, anda akan bekerja dalam kelompok kecil untuk menerapkan model tersebut pada kegiatan pekerjaan anda dan sasaran-sasaran RANHAM.

Pada **Bagian C**, kelompok anda akan mempresentasikan kerangka kerja perencanaan anda untuk kegiatan anda.

Pada **Bagian D**, fasilitator akan memberikan komentar pada presentasi kelompok anda.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

**Kegiatan 2 lanjutan**

- 30 mnt**            **Bagian A            Presentasi**  
Fasilitator akan menyajikan model yang akan digunakan pada kegiatan ini dan menjelaskan bagaimana menggunakannya dengan menggunakan contoh pada **Lembar Rujukan 15**.
- 1 jam 30 mnt**   **Bagian B            Kerja Kelompok Kecil**  
1. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok berdasarkan keterlibatan lembaga mereka dengan kelompok para-pihak (*stakeholders*), misalnya guru-guru, media, pejabat penegak hukum atau petugas keamanan, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dll.  
2. Kelompok anda menyelesaikan **Lembar Kerja 8** untuk kegiatan tertentu pada pekerjaan anda.  
3. Siapkan diri anda untuk mempresentasikan Lembar Kerja yang telah lengkap kepada peserta lain.
- 30 mnt**            **Bagian C            Presentasi Kelompok**  
Secara bergiliran, tiap kelompok mempresentasikan Lembar Kerja yang telah lengkap untuk kegiatan tertentu mereka.
- 15 mnt**            **Bagian D            Diskusi Kelompok Besar**  
Fasilitator memberi komentar pada model kerangka kerja perencanaan yang telah dilengkapi dengan mencatat kesamaan/perbedaan serta wilayah untuk perbaikan.

Akhir dari Kegiatan ■

### Lembar Rujukan 15: Model untuk memasukkan Pendidikan HAM dalam kerja anda

Contoh berikut ini menggambarkan langkah-langkah untuk memasukan Pendidikan HAM ke dalam kegiatan pekerjaan RANHAM bagi petugas yang mengerjakan tentang hak-hak anak di Departemen Kesehatan.

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
<p><b>Langkah 1</b> <b>Identifikasi</b> <b>KEMUNGKINAN</b> <b>MELAKUKAN</b> <b>PENDIDIKAN HAM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Apakah tujuan utama kegiatan (misalnya bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan, menulis dan membagikan laporan, membahas peran gender dengan anggota masyarakat, membicarakan mengenai hak-hak anak kepada para guru dll.)?</i></li> <li>2. <i>Apakah kegiatan terkait Pendidikan HAM terhadap tujuan RANHAM untuk <b>Penyebaran dan Pendidikan mengenai HAM?</b></i></li> <li>3. <i>Bagaimana kegiatan ini sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan rutin Anda?</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasukan HAM dalam kebijakan-kebijakan mengenai Rumah Sakit. Pekerjaan ini akan melibatkan pengulasan terhadap kebijakan pelayanan kesehatan yang ada untuk menjamin kebijakan-kebijakan itu memperhatikan hak-hak anak dengan standard kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Kegiatan-kegiatannya termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi satu daerah yang menjadi tempat perdana dimana anak-anak memiliki akses yang buruk terhadap fasilitas kesehatan.</li> <li>▪ Data <i>Baseline</i> mengenai keadaan akses anak-anak terhadap kesehatan di daerah perdana dikumpulkan.</li> <li>▪ Lokakarya untuk mengulas kebijakan tingkat nasional bersama-sama dengan para pejabat Depkes dan pejabat-pejabat RS di satu wilayah perdana dimana anak-anak memiliki akses yang buruk terhadap pelayanan kesehatan.</li> <li>▪ Tiga lokakarya yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat Depkes di wilayah perdana (dengan panduan dari Menteri Kesehatan) untuk melatih pegawai-pegawai pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan berbasis hak untuk menjamin kesehatan anak. Dibuatnya sebuah buku saku kecil untuk digunakan oleh pejabat Depkes setempat.</li> <li>▪ Memantau hasil dalam kurun waktu satu tahun.</li> </ul> </li> <li>2. Tujuan 4, "Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai HAM."</li> <li>3. Departemen Kesehatan bertanggungjawab menawarkan panduan kepada dan pengawasan terhadap organisasi-organisasi mandiri di wilayah tersebut; termasuk memberikan panduan, konseling, pelatihan, arahan dan pengawasan.</li> </ol> <p>Bagian dari kegiatan ini mensyaratkan pendidikan terhadap para staff mengenai kewajiban mereka memberikan jasa dan pendidikan terhadap masyarakat mengenai jasa apa saja yang menjadi hak mereka..</p>

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
<b>Langkah 2</b> <b>Identifikasi</b> <b>KELAIKAN</b> <b>KEGIATAN</b> <b>PENDIDIKAN HAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Melihat beban kerja Anda, seberapa laik kegiatan ini?</i></li> <li>2. <i>Berapa banyak waktu yang akan diambil oleh kegiatan ini dari tanggungjawab pekerjaan anda?</i></li> <li>3. <i>Sumberdaya apa saja yang dibutuhkan?</i></li> <li>4. <i>Apakah kegiatan ini dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian dari kegiatan berkelompok? Jika anda bagian dari sebuah kelompok, apakah Anda telah mengidentifikasi peran-peran dan tanggungjawab individual?</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan ini akan memakan waktu namun tetap laik. Bagian tanggungjawab saya di Departemen Kesehatan adalah untuk memberikan panduan bagi para pejabat RS di tingkat kabupaten dalam menjamin kebijakan-kebijakan bagi standard kesehatan tertinggi anak-anak diterapkan.</li> <li>2. Saya telah bekerja dengan pejabat Depkes tingkat kabupaten, namun kini saya akan menambahkan penitikberatan pada hak-hak anak sebagai bagian dari beban kerja saya.</li> <li>3. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber-sumber bahan termasuk standard kesehatan internasional, kebijakan dan tata laksana tingkat nasional yang ada, contoh-contoh dan praktik-praktik terbaik dalam menggunakan pendekatan berbasis hak terhadap kesehatan anak, memahami masalah kesehatan anak di dalam kabupaten dimana pekerjaan ini akan dilakukan proyek percontohnya. Kerjasama dengan para rekan kerja untuk bisa mengikutsertakan kegiatan-kegiatan ini (serangkaian skema lokakarya dan pemantauan) sebagai bagian dari Rencana Kerja Departemen.</li> <li>▪ Sumber daya Keuangan termasuk dana yang dibutuhkan untuk melakukan lokakarya mengenai pengulasan kebijakan, tiga lokakarya untuk melatih pejabat-pejabat Depkes, dan biaya untuk memantau perubahan dalam kurun waktu satu tahun.</li> <li>▪ Sumber daya Manusia termasuk waktu yang diperlukan oleh staff (pada dasarnya 3 jam per minggu dari waktuyang dialokasikan untuk saya).</li> </ul> </li> <li>4. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh staf Departemen Kesehatan berkonsultasi dengan Kementerian ... /Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, pejabat-pejabat Depkes, organisasi seperti UNICEF atau LSM setempat.</li> </ol>

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
<b>Langkah 3</b> <b>Gambaran mengenai KELOMPOK SASARAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Siapa yang menjadi bagian dari kelompok sasaran Anda? Apa saja pekerjaan, tanggungjawab kerja, gender, tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap HAM mereka, dll?</i></li> <li>2. <i>Masalah apa saja yang mereka hadapi?</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuat kebijakan Departemen Kesehatan dan pejabat-pejabat Depkes tingkat Kabupaten –laki-laki dan perempuan dengan tingkat pendidikan yang beragam (sekunder dan tertier) serta pengetahuan mendasar mengenai HAM.</li> <li>2. Pejabat-pejabat Depkes membutuhkan bantuan dalam melaksanakan kebijakan, pejabat Depkes tingkat Kabupaten memiliki kekurangan staf berkualitas, dana yang kurang memadai, sedikit pemahaman mengenai kebijakan. Pejabat-pejabat Depkes juga menghadapi tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka.</li> </ol>
<b>Langkah 4</b> <b>Tentukan KEBUTUHAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Apa saja pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku yang dimiliki oleh kelompok sasaran saat ini yang berkaitan dengan HAM?</i></li> <li>2. <i>Apa saja pengetahuan, nilai dan perilaku serta keterampilan yang harus dikembangkan atau dirubah oleh kelompok sasaran?</i></li> <li>3. <i>Menurut anda, apa saja pengharapan kelompok sasaran akan kegiatan ini?</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Depkes dan Pejabat Depkes tingkat Kabupaten ingin memastikan kebijakan mereka dilaksanakan, dan ada kebijakan yang digunakan untuk memastikan adanya akses yang layak terhadap pelayanan kesehatan terhadap anak-anak.</li> <li>2. Kelompok sasaran memiliki pengetahuan mengenai masalah kesehatan secara umum, namun pejabat Depkes Kabupaten mungkin tidak menyadari adanya masalah-masalah khusus yang terkait dengan akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan dan bagaimana hal ini bisa dikembangkan.</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kerja para pejabat Depkes Kabupaten dan memastikan bahwa sebagian besar populasi memiliki pemahaman yang lebih baik akan jasa pelayanan kesehatan yang tersedia untuk mereka.</li> </ol>

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
<b>Langkah 5</b> <b>Tentukan TUJUAN dan SASARAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Apa yang anda harapkan didapat oleh kelompok sasaran dari kegiatan ini?</i></li> <li>2. <i>Bagaimana kegiatan ini mementingkan pendekatan berbasis hak? Atau dengan kata lain,</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Bagaimana kegiatan ini menjamin para pemanggul tugas memenuhi tanggungjawab mereka terhadap pemegang hak?</i></li> <li>▪ <i>Bagaimana kegiatan ini menjamin para pemegang hak mengetahui bagaimana menuntut hak mereka?</i></li> <li>▪ <i>Bagaimana kegiatan ini menjamin keterlibatan masing-masing pihak?</i></li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ulasan mengenai kebijakan yang ada untuk menjamin akses yang lebih besar terhadap pelayanan kesehatan bagi anak.</li> <li>▪ Pengetahuan akan pendekatan berbasis hak terhadap akses anak akan kesehatan</li> <li>▪ Strategi meningkatkan akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan di kabupaten tempat proyek percontohan.</li> </ul> </li> <li>2. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Staff Depkes terlibat dalam pengulasan kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten.</li> <li>▪ Orangtua dan/atau wali anak-anak yang dirawat di fasilitas kesehatan di wilayah percontohan sadar akan hak-hak mereka. Pejabat Depkes tingkat Kabupaten juga secara reguler mengunjungi sekolah-sekolah dasar untuk mendidik anak-anak tentang pelayanan kesehatan yang layak.</li> <li>▪ Pejabat Depkes Kabupaten secara terarah terlibat dalam pengulasan kebijakan dan pelatihan terhadap pejabat-pejabat mereka sendiri mengenai bagaimana menggunakan pendekatan berbasis hak bagi akses anak-anak terhadap kesehatan.</li> </ul> </li> </ol>

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
<b>Langkah 6</b> <b>Tentukan ISI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Apa saja topik, tema, isu dan informasi yang akan anda masukkan?</i></li> <li>2. <i>Apa saja isi yang akan datang dari kelompok sasaran?</i></li> <li>3. <i>Bagaimana keahlian dari luar bisa diikutsertakan? Presentasi? Video?</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak-hak anak yang spesifik terhadap isu yang ada di kabupaten tempat proyek percontohan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contoh mengenai pelanggaran hak di sektor kesehatan</li> <li>▪ Mekanisme pelaporan</li> </ul> </li> <li>2. Contoh-contoh pelanggaran hak, pengalaman dalam menerapkan kebijakan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan mereka.</li> <li>3. Presentasi akan dibuat oleh pembicara tamu dari Departemen lain dan LSM Internasional Hak Anak.</li> </ol> <p>Isi akan menitikberatkan pada aksesibilitas anak-anak terhadap pelayanan kesehatan. Meningkatkan aksesibilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan menjamin beberapa aspek di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non-diskriminasi: Fasilitas kesehatan, barang-barang dan jasa harus bisa diakses oleh semua orang, baik secara hukum maupun dalam kenyataannya, tanpa ada diskriminasi berdasarkan alasan apapun.</li> <li>2. Aksesibilitas Fisik: Fasilitas, barang dan jasa kesehatan harus berada dalam jangkauan fisik yang aman bagi seluruh bagian masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan termarginalisasi seperti kelompok etnis minoritas dan masyarakat asli, perempuan, anak-anak, remaja, orang-orang tua, orang-orang dengan keterbatasan fisik dan orang-orang dengan HIV/AIDS, termasuk yang berada di daerah-daerah pedesaan.</li> <li>3. Aksesibilitas Ekonomi: Fasilitas-fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat dijangkau oleh semua pihak. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, demikian pula dengan pelayanan yang terkait dengan faktor-faktor utama dalam kesehatan, harus berdasarkan pada prinsip kesejajaran, menjamin pelayanan-pelayanan ini baik yang tersedia secara pribadi maupun umum, dapat dijangkau oleh semua orang.</li> <li>4. Aksesibilitas Informasi: Aksesibilitas termasuk hak untuk mencari, menerima dan memberi informasi serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Namun, aksesibilitas terhadap informasi ini tidak boleh menihilkan hak untuk mendapatkan data kesehatan mereka diperlakukan dengan kerahasiaan.</li> </ol> <p>[Informasi ini diambil dari <i>25 Questions on Health and Human Rights</i>. World Health Organization. <i>Health and Human Rights Publication Series</i>, Edisi No. 1, Juli 2002.]</p>

## Lembar Rujukan - Lanjutan

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda	
<b>Langkah 7</b> <b>Tentukan HASIL</b>	1. <i>Apa saja hasil kegiatan ini dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang?</i>  2. <i>Apa saja indikator tiap hasil yang dicapai?</i>	<i>Hasil</i>	<i>Indikator</i>
		<i>Jangka Pendek (keluaran)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Depkes dan pejabat Depkes Kabupaten mengulas kebijakan yang anda untuk dapat merefleksikan perhatian-perhatian khusus terhadap hak-hak anak, terutama akses mereka terhadap kesehatan.</li> <li>▪ Kabupaten tempat proyek percontohan teridentifikasi</li> </ul>	<i>Indikator</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 orang pejabat Depkes dan pejabat Depkes Kabupaten sadar akan isu yang terkait dengan akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan</li> <li>▪ Perubahan/revisi kebijakan</li> <li>▪ Rencana pelatihan dikembangkan bagi pelatihan terhadap 100 orang pejabat Depkes mengenai pendekatan berbasis hak terhadap kesehatan anak-anak.</li> <li>▪ Data baseline mengenai akses anak terhadap pelayanan kesehatan di kabupaten dikumpulkan.</li> <li>▪ Laporan mengenai analisis akses anak-anak terhadap kesehatan di kabupaten tempat percontohan.</li> </ul>
		<i>Jangka Menengah (keluaran)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kemampuan para pejabat Depkes Kabupaten dalam menjamin akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan</li> <li>▪ Peningkatan kemampuan pemerintah dan pmda dalam melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan yang ramah terhadap anak-anak</li> </ul>	<i>Indikator</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan yang didapat oleh para keluarga</li> <li>▪ Penurunan jumlah anak-anak yang dimasukkan ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan.</li> </ul>

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda	
		<i>Jangka Panjang (Dampak)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya tingkat kesehatan di wilayah kabupaten</li> </ul>	<i>Indikator</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penurunan jumlah anak-anak yang dirawat karena berbagai penyakit (diare, malaria, HIV/AIDS, dll)</li> </ul>
<b>Langkah 8</b> <b>Tentukan TEKNIK</b>	<p>1. Apa saja teknik yang akan Anda lakukan untuk melaksanakan kegiatan ini? (misalnya focus group, wawancara, buletin informasi dll)?</p> <p>2. Apa saja bahan-bahan yang telah ada yang dapat digunakan? Dari lembaga Anda sendiri? Dari sumber-sumber lain?</p> <p>3. Apa saja bahan-bahan yang harus dikembangkan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian untuk mengumpulkan data <i>baseline</i> mengenai isu kesehatan anak di dalam kabupaten tempat proyek percontohan, konsultasi untuk mengidentifikasi peserta, kuisioner untuk menentukan kebutuhan para peserta, lokakarya partisipatif, mekanisme pemantauan terhadap pelayanan kesehatan anak.</li> <li>2. Kebijakan-kebijakan Depkes yang telah ada, presentasi dari departemen dan LSM lain yang mengurus masalah hak-hak anak dan perempuan.</li> <li>3. Lokakarya mengenai cara kerja, buku saku pelaksanaan kebijakan bagi pejabat Depkes Kabupaten yang terkait dengan akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan.</li> </ol>	
<b>Langkah 9</b> <b>Tentukan KERANGKA WAKTU</b>	<p>Pada kurun waktu kapan kegiatan ini berlangsung (misalnya, pertemuan singkat, kampanye advokasi selama beberapa bulan, dll)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi wilayah kabupaten tempat percontohan dan penelitian mengenai masalah kesehatan anak: 3 bulan</li> <li>▪ Konsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai proses: 3 bulan</li> <li>▪ Mengumpulkan dokumentasi terkait dan menyiapkan lokakarya utama bersama para pejabat Depkes dan Pejabat Depkes Kabupaten: 3 bulan</li> <li>▪ Revisi kebijakan dan persetujuan dari Pemerintah: 6 bulan- 1 tahun</li> <li>▪ Pengembangan buku saku mengenai pelaksanaan kebijakan bagi para pejabat Depkes Kabupaten: 4 bulan</li> <li>▪ Pelatihan para pejabat Depkes Kabupaten dengan menggunakan buku saku: 3 bulan (persiapan dan pelaksanaan)</li> <li>▪ Pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengamati perubahan : kunjungan per dua bulan selama kurun waktu satu tahun.</li> </ul>	

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
<p><b>Step 10</b>  <b>Rancangan PIRANTI</b>  <b>EVALUASI &amp;</b>  <b>TINDAK LANJUT</b></p> <p><b>Tentukan STRATEGI</b>  <b>untuk TRANSFER</b>  <b>Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Apa saja informasi yang ingin anda dapat dari evaluasi?</i></li> <li>2. <i>Bagaimana anda akan mengevaluasi kegiatan ini?</i></li> <li>3. <i>Apa saja jenis kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang akan anda rencanakan?</i></li> <li>4. <i>Strategi apa saja yang akan Anda gunakan untuk meningkatkan transfer pembelajaran? Siapa saja penerima transfer ini?</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi akan berdasarkan kepada hasil dan indikator yang telah teridentifikasi.</li> <li>2. Keefektifan pengulasan kebijakan dan buku saku mengenai pelaksanaan perubahan kebijakan akan dilakukan dengan memantau sebagian fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten percontohan selama kurun waktu satu tahun. Lokakarya akan dievaluasi dengan menggunakan kuisioner tertulis dan berbagai teknik evaluasi. Diskusi kelompok fokus yang berisi pejabat Depkes terpilih akan mengevaluasi keberhasilan proyek ini.</li> <li>3. Tindak lanjut akan dilakukan dengan cara memantau akses anak-anak terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten percontohan selama kurun waktu satu tahun.</li> <li>4. Para pejabat Depkes Kabupaten akan berdiskusi mengenai akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan saat bertemu dengan rekan kerja mereka dan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dasar di dalam kabupaten untuk memberikan informasi kepada anak-anak, orangtua serta guru mengenai akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan.</li> </ol>

### Lembar Kerja 8: Model untuk memasukkan Pendidikan HAM dalam kerja anda

Bersama dengan anggota kelompok anda, kembangkan rencana untuk mengikut sertakan pendidikan HAM sebagai bagian dari kerja dan tanggung jawab rutin anda. Pertanyaan-pertanyaan disediakan untuk memandu anda pada proses ini.

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda
<p><b>Langkah 1</b>  <b>Identifikasi PELUANG</b>  <b>untuk</b>  <b>MENYELENGGARAKAN</b>  <b>Pendidikan HAM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Bentuk kegiatan (misalnya, pertemuan dengan pemangku kepentingan tertentu, menulis dan menyebar-luaskan laporan, membahas peran gender dengan warga masyarakat, membahas tentang hak anak dengan para guru)?</i></li> <li>2. <i>Apa keterkaitan kegiatan pendidikan HAM ini dengan sasaran RANHAM: <b>Penyebarnya-luasan dan Pendidikan tentang HAM?</b></i></li> <li>3. <i>Bagaimana kegiatan ini bisa bersesuaian dengan tanggung jawab rutin pekerjaan anda?</i></li> </ol>	

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda
<b>Langkah 2</b> <b>Identifikasi</b> <b>FEASIBILITAS</b> <b>KEGIATAN PENDIDIKAN</b> <b>HAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mempertimbangkan beban kerja anda, apakah kegiatan ini feasibel?</i></li> <li>2. <i>Seberapa banyak kegiatan ini akan mengambil waktu dari tanggung jawab kerja anda?</i></li> <li>3. <i>Sumber daya apa yang dibutuhkan?</i></li> <li>4. <i>Apakah kegiatan ini dilakukan secara individual ataukah sebagai bagian dari suatu Team? Apabila Team, apakah anda sudah mengidentifikasi peran-peran dan tanggung jawab masing masing individu anggota team?</i></li> </ol>	
<b>Langkah 3</b> <b>Uraian KELOMPOK</b> <b>SASARAN anda</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Siapa saja yang termasuk kelompok sasaran anda, Apa pekerjaan mereka, apa tanggung jawab kerja mereka, gender, tingkat pendidikan, pengetahuan tentang HAM, dsb</i></li> <li>2. <i>Apa masalah masalah yang mereka hadapi?</i></li> <li>3. <i>Apa konteks kelompok sasaran anda?</i></li> </ol>	

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda
<b>Langkah 4</b> <b>Tentukan KEBUTUHAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Bagaimana pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap kelompok sasaran dalam soal HAM?</i></li> <li>2. <i>Apa saja pengetahuan, nilai dan sikap yang perlu dikembangkan atau diubah pada kelompok sasaran?</i></li> <li>3. <i>Menurut anda, apa harapan kelompok sasaran atas kegiatan ini?</i></li> </ol>	
<b>Langkah 5</b> <b>Tetapkan TUJUAN dan SASARAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Apa yang anda harapkan dapat diperoleh kelompok sasaran dari kegiatan ini.</i></li> <li>2. <i>Bagaimana kegiatan ini mempertimbangkan pendekatan berbasis Hak? Dengan kata lain,;</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Bagaimana kegiatan ini memastikan bahwa pemangku kewajiban memenuhi kewajibannya kepada pemilik hak?</i></li> <li>▪ <i>Bagaimana kegiatan ini memastikan bahwa para pemilik Hak mengerti bagaimana cara menuntut hak mereka?</i></li> <li>▪ <i>Bagaimana kegiatan ini menjamin partisipasi?</i></li> </ul> </li> </ol>	

## Lembar kerja - Lanjutan

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda	
<b>Langkah 6</b> <b>Tentukan ISI MATERI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Topik,tema, isu dan informasi apa yang akan anda cakup?</i></li> <li>2. <i>Cakupan materi apa yang akan berasal dari kelompok sasaran?</i></li> <li>3. <i>Bagaimana para pakar dari luar akan diikutsertakan? presentasi? video?</i></li> </ol>		
<b>Langkah 7</b> <b>Tetapkan HASIL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Apa saja hasil dari kegiatan ini dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? What are the results of this activity, in the short-term, medium-term, and long-term?</i></li> <li>2. <i>What are the indicators of each result?</i></li> </ol>	<b>Hasil</b> Jangka-pendek (keluaran)  Jangka-menengah (hasil)  Jangka-panjang (Dampak)	<b>Indikator</b>     

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda
<b>Langkah 8</b> <b>Tetapkan TEKNIK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Teknik (-teknik) apa yang akan anda gunakan untuk melakukan kegiatan ini (misalnya focus group, wawancara, buletin info, dsb)?</i></li> <li>2. <i>Bahan yang sudah ada yang dapat digunakan? Dari lembaga anda? Dari sumber lain?</i></li> <li>3. <i>Bahan apa yang perlu dikembangkan?</i></li> </ol>	
<b>Langkah 9</b> <b>Tetapkan KERANGKA JADWAL</b>	<i>Berapa lamakah kegiatan ini berlangsung (pertemuan pendek, kampanye advokasi selama beberapa bulan, dsb)?</i>	

## Lembar kerja - Lanjutan

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda
<p><b>Langkah 10</b>  <b>Rancang alat-alat</b>  <b>EVALUASI dan TINDAK</b>  <b>LANJUT</b></p> <p><b>Tentukan Strategi</b>  <b>TRANSFER</b>  <b>Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Informasi apa yang anda ingin dapatkan dari suatu evaluasi?</i></li> <li>2. <i>Bagaimana anda akan mengevaluasi kegiatan ini?</i></li> <li>3. <i>Kegiatan tindak lanjut apa yang anda rencanakan?</i></li> <li>4. <i>Strategi apa yang akan anda gunakan untuk meningkatkan transfer pemebelajaran? Siapa saja penerima transfer pembelajaran ini?</i></li> </ol>	

### Kegiatan 3 Mengembangkan Rencana Aksi Pribadi

#### Sasaran

Untuk melengkapi rencana aksi pribadi untuk anda sendiri.

#### Waktu

45 mnt

#### Uraian

Pada kegiatan sebelumnya, anda melihat pada prioritas-prioritas RANHAM dan bagaimana merencanakan untuk mencapainya menggunakan pendidikan HAM. Pada kegiatan ini, anda akan mengidentifikasi rencana aksi anda sendiri untuk menggunakan pendidikan HAM untuk mencapai sasaran-sasaran RANHAM.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, anda akan bekerja sendiri untuk melengkapi rencana aksi anda.

Pada **Bagian B**, anda akan menyajikan rencana aksi anda kepada peserta lain.

**20 mnt**

#### **Bagian A Kerja Sendiri**

Tiap peserta menggunakan waktunya untuk melengkapi “Rencana aksi pribadi” pada **Lembar Kerja 9**.

**25 mnt**

#### **Bagian B Presentasi**

1. Tiap peserta mempresentasikan rencana aksi mereka dan berbagi sejumlah ide-ide mereka dengan peserta lain.
2. Fasilitator menyimpulkan dengan mencatat rekomendasi konkrit dari peserta untuk langkah-langkah selanjutnya.

**Akhir dari Kegiatan ■**

### Lembar Kerja 9: Rencana Aksi Pribadi

**Nama:**

**Departmen/Lembaga:**

**Bagaimana saya berencana untuk berbagi hasil lokakarya ini dengan kolega-kolega saya:**

**Apa yang akan saya lakukan untuk melanjutkan interaksi dan pertukaran dengan peserta lain:**

**Perubahan apa yang akan saya buat di pekerjaan saya sebagai hasil dari informasi pada loka karya ini?**

## Modul 5 Evaluasi Lokakarya dan Acara Penutupan

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
<b>Kegiatan 1</b>	Evaluasi Umum Lokakarya	30 mnt
<b>Kegiatan 2</b>	Acara Penutupan	30 mnt



## **Kegiatan 1 Evaluasi Umum Lokakarya**

### **Sasaran**

Untuk mengevaluasi Lokakarya.

### **Waktu**

30 mnt

### **Uraian**

Peserta melengkapi kuesioner evaluasi akhir.

Akhir dari Kegiatan ■

## **Kegiatan 2 Acara Penutupan**

### **Waktu**

30 mnt

### **Uraian**

Pada acara penutupan akan ada pembagian sertifikat dan sambutan penutup.

Akhir dari Kegiatan ■



## Lampiran

<i>Lampiran</i>	
<b>Lampiran 1</b>	Teknik-teknik Pelatihan Pendidikan HAM yang Efektif
<b>Lampiran 2</b>	Praktek-Praktek yang Baik dalam Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia: Panduan, Indikator dan Evaluasi
<b>Lampiran 3</b>	Komentar Umum No. 16 (2005), Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – Kesetaraan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan atas Penikmatan Semua Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

## Lampiran 1: Teknik-Teknik Pelatihan Pendidikan Hak Asasi Manusia yang Efektif

Jenis-jenis teknik dapat termasuk pada beberapa kategori:

1. Kelompok “Membangun Dinamika”:
  - “Dinamicas”
  - Icebreakers
  - Energizers
2. Teknik membangun Pengetahuan/Informasi:
  - Presentasi
  - Membaca bahan-bahan dan mengerjakan tugas
  - Curah Pendapat (*Brainstorming*)
3. Teknik Nilai-nilai/Sikap-sikap:
  - Bermain Peran (*Role plays*)
  - Debat
4. Melatih/Menerapkan Keterampilan:
  - Studi Kasus
  - Simulasi
5. Analisa Kritis/Refleksi:
  - Teknik yang merupakan kombinasi dari jenis-jenis yang tertera di atas.

Memberikan Informasi	Mengajarkan Ketrampilan, Perilaku	Mengubah Sikap, Nilai-Nilai
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presentasi:</b> Satu nara sumber memaparkan informasi atau pandangannya terhadap satu isu..</li> <li>• <b>Presentasi Panel:</b> Dua sampai tiga nara sumber memaparkan sejumlah aspek yang berbeda dari sebuah topik umum (dibutuhkan moderator).</li> <li>• <b>Debat:</b> Dua nara sumber menyatakan pandangan yang bertentangan dan mempertahankan pendapatnya (dibutuhkan moderator).</li> <li>• <b>Dialog:</b> Informal, pembicaraan mengenai wacana antara dua nara sumber.</li> <li>• <b>Presentasi Drama:</b> Sebuah pertunjukan drama yang sudah dipersiapkan.</li> </ul> <p>Kegiatan lanjutan yang sesuai setelah presentasi nara sumber yang melibatkan peserta/pendengar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forum:</b> Periode tanya-jawab/diskusi yang terbuka dan bebas, langsung setelah presentasi.</li> <li>• <b>Periode Tanya-Jawab:</b> Kesempatan bagi setiap peserta untuk langsung bertanya pada penyaji..</li> <li>• <b>Kelompok “Buzz”:</b> Sub-kelompok yang terdiri dari 4-6 orang selama sekitar 5 menit mendiskusikan isu tertentu atau pertanyaan yang diajukan oleh nara sumber. lalu berbagi dengan peserta/pendengar lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Studi Kasus:</b> Presentasi tentang sebuah masalah atau kasus untuk di analisa dan dipecahkan oleh kelompok.</li> <li>• <b>Demonstrasi:</b> Fasilitator secara verbal menjelaskan dan mempertunjukkan sebuah tindakan, prosedur atau proses.</li> <li>• <b>Permainan (Games), Pengalaman yang Terstruktur:</b> Peserta mengikuti sebuah permainan yang membutuhkan ketrampilan tertentu, biasanya dipandu oleh fasilitator.</li> <li>• <b>Simulasi:</b> Peserta belajar ketrampilan dalam sebuah situasi yang diatur meniru situasi sebenarnya dimana ketrampilan tersebut akan dibutuhkan.</li> <li>• <b>Tim Mengajar/Belajar:</b> Kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 orang bekerja sama, dimana tiap orang saling mengajar dan menolong mengembangkan ketrampilan.</li> </ul> <p>Kegiatan yang sesuai sebagai tindak lanjut dan mempraktekan ketrampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proyek Penerapan:</b> Kegiatan dalam pelatihan yang memungkinkan peserta untuk mempraktekkan ketrampilan dalam konteks dan situasi mereka sendiri.</li> <li>• <b>Praktek:</b> Kegiatan khusus untuk menerapkan pembelajaran <b>setelah</b> pelatihan dalam konteks pekerjaan mereka..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tanggapan Berputar (Circle Response):</b> Pertanyaan yang diajukan kepada anggota kelompok yang duduk dalam melingkar, setiap orang secara bergantian menyatakan tanggapannya</li> <li>• <b>Kunjungan Lapangan:</b> Meihat atau mengalami situasi langsung untuk pengamatan dan belajar.</li> <li>• <b>Permainan:</b> Mengalami (mengikuti) sebuah permainan dan mendiskusikan penerapannya dalam kehidupan nyata.</li> <li>• <b>Diskusi Kelompok:</b> Anggota kelompok kecil (8-20 orang) saling bertukar ide dan pendapat tentang sebuah masalah atau isu yang menjadi keprihatinan bersama dalam waktu sekitar 10-40 menit, tergantung besarnya kelompok.</li> <li>• <b>Bermain Peran:</b> Dramatisasi secara spontan tentang sebuah masalah atau situasi yang dilanjutkan dengan diskusi.</li> <li>• <b>Simulasi:</b> Pengalaman dalam sebuah situasi yang dibuat nyata mungkin dilanjutkan dengan diskusi.</li> <li>• <b>Skit (Pertunjukkan Pendek) :</b> Presentasi dramatis yang pendek dan sudah dilatih, dilanjutkan dengan diskusi.</li> </ul>



## Lampiran 2: Praktek-Praktek yang Baik dalam Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia: Panduan, Indikator dan Evaluasi

**Sumber:** Arab Institute for Human Rights and the Documentation, Information and Training Centre for Human Rights of Morocco. (2000). Workshop on HRE issues in Human Rights NGOs. Marrakech, Morocco.

### 1. Perencanaan Nasional

Rencana/Strategi nasional untuk pendidikan Hak Asasi Manusia seharusnya:

- lengkap (dalam hal jangkauannya - anak-anak, remaja selain orang dewasa),
- partisipatif (dalam hal keterlibatan seluruh pelaku yang relevan - kementerian, lembaga-lembaga nasional, ornop-ornop, pusat-pusat Hak asasi Manusia, dll) dan,
- efektif (dalam hal metodologi pendidikan)

Prioritas harus diberikan pada pendekatan yang berkelanjutan (seperti pelatihan untuk pelatih/TOT, integrasi Hak Asasi Manusia pada semua kurikulum pelatihan dan pendidikan yang relevan, organisasi jaringan-jaringan, dll). Juga, strategi/rencana-rencana harus dikembangkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui kemitraan dan koalisi di dalam dan di antara pelaku-pelaku pemerintah dan non-pemerintah.

**Panduan** untuk rencana nasional pendidikan Hak Asasi Manusia telah dikembangkan oleh sejumlah praktisi dan ahli pendidikan Hak Asasi Manusia yang berkumpul di PBB pada tahun 1977 (UN Doc A/52/469/Add.1 and Corr.1). Panduan tersebut mengusulkan:

- prinsip-prinsip umum untuk mengatur rencana tersebut (seperti Pendidikan HAM harus memajukan "*interdependence, indivisibility* dan *universality*" dari HAM; pentingnya HAM untuk demokrasi; pembangunan yang berkelanjutan; penegakan hukum; lingkungan dan perdamaian; dan perannya dalam mendorong analisa masalah-masalah HAM yang kronis dan baru muncul, yang mengarah pada jawaban yang konsisten dengan standard HAM) , juga
- prinsip-prinsip kelembagaan dan operasional (seperti perwakilan masyarakat yang beragam (plural), kegiatan yang transparan, akuntabilitas public dan partisipasi yang demokratis) dan
- prinsip-prinsip kegiatan pendidikan (seperti menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, dan belajar-mengajar yang partisipatif).

Panduan ini juga mengusulkan sejumlah langkah-langkah konkrit untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana tersebut, juga sejumlah indikator untuk mengevaluasinya, seperti kumpulan data statistik dan kualitatif.

## 2. Sektor-sektor Sasaran

### Pendidikan HAM dalam Sistem Pendidikan Sekolah Formal

#### Panduan

- Pendidikan HAM adalah komponen terpadu dari hak atas pendidikan.
- Pendidikan HAM harus berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis.
- Pendidikan HAM harus terpadu sepenuhnya ke dalam kerangka kerja dan standard-standard sistem pendidikan formal.
- Pendidikan HAM akan lebih efektif jika sepenuhnya terpadu di dalam kurikulum dari pada menjadi mata pelajaran sendiri atau tidak tetap.
- Sebuah pendekatan seluruh sekolah yang melibatkan seluruh komunitas sekolah (seperti tata usaha sekolah, karyawan, orang tua, dll) adalah lingkungan belajar yang paling efektif untuk Pendidikan HAM .
- Sektor pendidikan formal harus mendorong keterlibatan keluarga, komunitas kelembagaan dan masyarakat sipil dalam Pendidikan HAM.
- Komunitas sekolah harus mencerminkan prinsip-prinsip HAM yang diajarkan di dalam kurikulum.
- Pejabat kementerian pendidikan, petugas sekolah, tata usaha dan karyawan harus menerima Pendidikan HAM.
- Kegiatan ekstra kurikuler menawarkan kesempatan penting untuk Pendidikan HAM .
- Manakala memungkinkan, para pemuda harus dilibatkan dalam menentukan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi mereka.
- Kerangka kerja HAM harus membentuk dasar umum untuk semua pendidikan “khusus” seperti pendidikan tentang perdamaian, perkembangan, kewarga negaraan, toleransi, anti rasisme.
- Pendidikan HAM harus mendorong berpikir kritis.
- Pendidikan HAM adalah alat yang signifikan untuk memerangi rasisme dan diskriminasi.
- Pelatihan guru harus meliputi kandungan HAM dan metodologi partisipatif dan harus didukung dengan materi-materi HAM yang efektif. Pelatihan harus didasarkan pada sumber-sumber dari ornop-ornop, pemerintah, pusat-pusat riset dan pelatihan dan lembaga-lembaga akademis.

#### Indikator-indikator

- Pengembangan Rencana Aksi Nasional untuk decade Pendidikan HAM.
- Mengadopsi Pendidikan HAM kedalam kurikulum nasional standard pada semua tingkatan.
- Pembentukan posisi yang permanent untuk Pendidikan HAM di dalam Kementerian Pendidikan.
- Persyaratan pelatihan HAM untuk sertifikasi atau pemajuan bagi para professional.
- Memasukkan Pendidikan HAM dalam konperensi, lokakarya dan publikasi pendidikan.
- Memperbaiki jumlah dan mutu buku pegangan dan materi Pendidikan HAM.

- Membangun kurikulum berdasarkan Pendidikan HAM.
- Membentuk komisi siswa untuk menerima pengaduan-pengaduan.
- Melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan.

#### **Evaluasi**

- Hasil pre- dan post- test dari sikap dan perilaku siswa.
- Evaluasi berdasarkan rujukan silang dari evaluasi di antara siswa, guru-guru dan pelatih.
- Penilaian atas partisipasi pemuda.

#### **Pelatihan untuk Para Pejabat Penegak Hukum.**

##### **Panduan**

- Ajar peserta untuk tidak hanya menghormati HAM orang lain, tetapi juga untuk mengenali HAM nya sendiri.
- Cari kemitraan untuk pelatihan, terutama yang melibatkan partisipasi dari sejumlah sector (Ornop-ornop, akademisi, pejabat pemerintah).
- Masukkan pendekatan “profesional – ke – profesional”.
- Tekankan sumbangan potensial dari profesional untuk HAM.
- Ciptakan semangat kolaborasi dan kemitraan, bukan pertentangan dan saling menyalahkan.
- Gunakan pengalaman profesional para peserta.
- Pendidikan HAM harus menjadi komponen sebelum dan selama Pelatihan dan harus sistimatis serta berlangsung terus menerus di dalam jenjang karir (contoh, ratifikasi dokumen internasional mungkin menyebabkan penafsiran ulang terhadap hukum-hukum yang ada).
- Tekankan bagaimana mempraktekkan HAM bisa memperbaiki kinerja professional.
- Cari keterkaitan para profesional dalam bidang yang sama dari wilayah dan negara yang berbeda.
- Sajikan studi kasus dan skenario yang relevan terhadap pengalaman profesional sebelum memperkenalkan kerangka kerja hukum atau teoritis.
- Untuk mengatasi resistensi terhadap pelatihan, ciptakan lingkungan yang informal To overcome resistance to training, create informal environments (misalnya, pakaian yang umum, pengaturan yang akrab).
- Untuk mengatasi identifikasi peserta terhadap identitas profesional, gunakan tehnik yang dapat menjelaskan pokok bahasan secara lebih pribadi (misalnya bermain peran).
- Selain isi pelatihan, tekankan juga dimensi pribadi dan psiko-sosial dari pelatihan.
- Sediakan materi-materi yang relevan, mudah diakses dan mudah digunakan (misalnya buku saku untuk Polisi).

##### **Indikator-Indikator**

- Pelembagaan pendidikan HAM dalam pelatihan Profesional.

- Pelatihan HAM dijadikan prasyarat untuk mendapatkan sertifikat profesional atau peningkatan.
- Perubahan hukum dan kebijakan pada wilayah-wilayah yang relevan.
- Permohonan untuk pelatihan lebih jauh.
- Tingkatkan penggunaan bahasa HAM dalam lingkungan kerja profesional.
- Munculnya artikel-artikel HAM dalam publikasi dan jurnal profesional.
- Jaringan kerja antara para profesional yang terlatih dalam HAM.
- Menurunnya pelanggaran oleh profesional, termasuk menurunnya pengaduan terhadap para pejabat.

### **Evaluasi**

- Masukkan HAM dalam evaluasi profesional.
- Lakukan evaluasi tindak-lanjut dengan peserta pada selang waktu yang telah ditentukan.
- Rencana untuk dan mengumpulkan data evaluasi selama berlangsungnya tiap proyek.

### **Pelatihan untuk ORNOP**

#### **Panduan**

- Tentukan tujuan pelatihan bersama-sama dengan yang akan dilatih.
- Tujuan harus bisa diukur dan laik.
- Analisa konteks politik, sosial dan budaya dari ORNOP peserta.
- Analisa struktur internal dan fungsi-fungsi dari ORNOP, termasuk kapasitas dan kelemahan-kelemahan.
- Kenali siapa para peserta pelatihan dan juga kenali kebutuhan-kebutuhan mereka yang spesifik.
- Masukkan teknik-teknik advokasi (misalnya, kampanye penyadaran; strategi untuk menembuat atau mengubah perundang-undangan lokal dan nasional).
- Masukkan cara menggunakan mekanisme regional dan internasional untuk mempengaruhi perubahan.
- Masukkan teknik-teknik untuk meningkatkan kesadaran publik pada semua tingkatan.
- Sesuaikan metodologi dengan tujuan dan ORNOP yang dilatih.
- Gunakan pengalaman profesional dan pribadi para peserta.
- Gunakan teknologi informasi dan komunikasi baru manakala memungkinkan.
- Gunakan materi-materi dan metodologi yang beragam misalnya, gambar-gambar, teater, kartun, dll).
- Pertahankan keseimbangan antara teori dan praktek, pengetahuan dan ketrampilan.
- Pastikan bahwa peserta dapat menerapkan hasil belajar pada kehidupan sehari-hari. (misalnya; advokasi, persiapan pembuatan laporan, kampanye, pelatihan).
- Tingkatkan kapasitas lembaga melalui kapasitas individu.

- Pelatihan individu dari ORNOP harus langsung berhubungan dengan pekerjaan nyata yang mereka lakukan.

#### **Indikator-indikator**

- Peningkatan mutu kerja ORNOP.
- Permintaan untuk pelatihan lanjutan.
- Hubungan dengan peserta dan lembaganya terpelihara secara teratur (misalnya, *database*, milis).
- Pangkalan data (*database*) materi-materi pelatihan dibangun dan dipelihara.
- Peserta menjadi pelatih yang efektif.
- Peserta berhasil dalam menggalang dana.
- Peserta terlibat aktif dalam sesi-sesi pelatihan.
- Penyebaran, penyesuaian dan pengembangan materi-materi.
- Terciptanya jaringan dengan ORNOP lain pada semua tingkatan.
- Dampak kampanye pada media.
- Dukungan/bantuan untuk orang-orang yang terlanggar.
- Melihat kewajiban negara berdasarkan pelaksanaan HAM.

#### **Evaluasi**

- Evaluasi diri oleh peserta.
- Evaluasi di tempat pelaksanaan.
- Strategi praktis dan tertulis untuk mengevaluasi pengetahuan dan ketrampilan.
- Mekanisme tindak lanjut yang efektif (misalnya pertemuan-pertemuan, pertukaran, publikasi, internet).
- Perbandingan laporan kegiatan ORNOP.

### **Kampanye Penyadaran Publik**

#### **Panduan**

- Tentukan seperangkat tujuan yang jelas dan dapat dicapai.
- Cocokkan gaya kampanye dengan kelompok sasaran, untuk memastikan bahwa tindakan cocok dengan pendengar.
- Pertahankan agar organisasi tetap jelas dan sederhana.
- Bangun kredibilitas dengan menggunakan fakta-fakta dan bukti yang akurat.
- Gunakan cerita-cerita yang menarik minat dan menginspirasi tindakan.
- Gunakan slogan dan symbol-simbol yang menarik perhatian dan dapat diingat; gunakan bahasa yang konkrit dan sederhana.
- Gunakan media secara strategis dan pahami bagaimana kerja mereka.
- Gunakan kompetisi (misalnya, drama dan seni and art).
- Gunakan poster dengan gambar-gambar yang mudah dipahami.
- Jika mungkin, buatlah survai tentang sikap dan kesadaran publik. Gunakan hasilnya sebagai alat untuk melakukan advokasi (misalnya untuk menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendidikan HAM).

- Sediakan dokumen-dokumen HAM yang menarik dan mudah didapat seperti DUHAM, untuk membuat standard internasional tersedia dalam kehidupan sehari-hari (misalnya paspor DUHAM).
- Sediakan kemudahan bagi public untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan (misalnya, situs internet, pusat-pusat sumber daya).
- Bangun komunitas HAM yang terdiri dari banyak pihak (misalnya, pemerintah, institusi keagamaan, sistim sekolah dan kelompok bisnis).
- Cari metode/teknik yang inovatif untuk menciptakan kejutan dan menarik perhatian (misalnya, tarian, teater, lagu-lagu, puisi, seni, pertandingan).
- Pilih ruang-ruang yang sesuai dengan kelompok sasaran (misalnya, sekolah, ruang terbuka, ruang yang bias berpindah-pindah seperti karavan).
- Analisa hukum-hukum nasional agar dapat digunakan secara efektif ketika merencanakan kampanye dan untuk menunjukkan perbedaan antara hukum-hukum nasional dan internasional, jika sesuai.
- Tunjukkan hukum-hukum nasional yang diadopsi dari standard internasional.
- Perhatikan bahwa dalam beberapa kasus, orang-orang yang turut serta dalam kampanye mungkin berada dalam bahaya terhadap hukuman. Mereka harus secara sadar dapat memutuskan untuk bersedia untuk mengambil resiko.
- Pada tahapan perencanaan, lakukan riset untuk mengenali dampak ekonomi yang merugikan terhadap orang-orang yang mungkin langsung terkena dan siapkan alternatif agar mereka tidak diasingkan. (misalnya, orang tua yang mungkin kehilangan pendapatannya jika anak-anak mereka sekolah).
- Perkuat solidaritas di antara ORNOP-ORNOP yang sesuai untuk mengkonsolidasikan aksi-aksi kampanye.
- Pastikan bahwa aksi dan perilaku orang-orang di dalam ORNOP konsisten dengan prinsip-prinsip HAM melalui persiapan dan perintah-perintah yang cermat.
- Pertahankan kendali selama kampanye dan buat rencana darurat untuk menghindari kampanye tersebut justru digunakan untuk melawan ORNOP.
- Gunakan hari HAM internasional (misalnya, 10 Desember, 8 Maret) untuk meluncurkan kampanye untuk jangka waktu yang lebih panjang.
- Gunakan tanggapan-tanggapan yang bersifat represif yang mungkin untuk menarik perhatian terhadap isu dan siapkan bahan-bahan untuk kampanye lebih lanjut.
- Pada tahapan perencanaan analisa semua pengaruh dari status ORNOP (semua hubungan dengan pemerintah atau organisasi lain) terhadap hasil kampanye.

#### **Indikator-indikator**

- Kampanye memiliki kerangka waktu yang jelas yang dipilih agar mendapatkan hasil yang maksimum.
- Kampanye jangka panjang telah merumuskan dengan jelas proyek-proyek jangka pendek selama jangka waktu kampanye.

- Bahan-bahan kampanye relevan dan efektif dan sumber daya tidak disia-siakan untuk mengembangkan bahan-bahan yang tidak sepenuhnya digunakan.
- Kampanye memiliki unsure-unsur “kejutan” dan memiliki potensi untuk menciptakan “bahasa” baru untuk publik secara luas atau kelompok sasaran.
- Kampanye menyatakan dengan jelas hasil yang diinginkan dan tindakan-tindakan yang diminta untuk dilakukan oleh kelompok sasaran.
- Strategi telah mengantisipasi dan memiliki keluwesan untuk menghadapi pengaruh-pengaruh yang merugikan.

#### **Evaluasi**

- Evaluasi jangka panjang sulit karena fokus kampanye yang kadang-kadang lebar.
- Evaluasi kuantitatif dapat mengukur besarnya tanggapan dan minat potensial.
- Tanggapan terhadap kampanye dapat menjadi petunjuk untuk aksi-aksi di masa yang akan datang.
- Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau kelompok sasaran lain dalam jangka waktu tertentu dapat menyediakan informasi yang penting.
- Survai kelompok sasaran setelah kampanye.

### **3. Isu-isu Pilihan**

#### **Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers=TOT*)**

##### **Panduan**

- TOT mensyaratkan komitmen jangka panjang dari lembaga dan orang-orang yang mengadakan pelatihan serta orang-orang yang dilatih.
- Sediakan bahan-bahan praktis bagi peserta untuk penggunaan segera/mendadak.
- Keragaman peserta akan memperkaya program.
- Tekankan untuk membangun persahabatan, saling percaya dan komitmen diantara peserta.
- Ciptakan iklim saling menghormati dan kesetaraan antara pelatih dan peserta pelatihan.
- Peserta pelatihan harus dipilih berdasarkan ketrampilan antar-pribadi, kepekaan budaya dan komitmen kepada nilai-nilai HAM.
- Informasi yang lebih baik tentang peserta akan memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk kebutuhan mereka, dan hasil yang lebih baik.
- Perencanaan harus mengantisipasi tanggapan-tanggapan emosional terhadap pembelajaran HAM.
- Menjadi pelatih (trainer) adalah proses seumur hidup: satu sesi tidak cukup.
- Cari keseimbangan jender diantara peserta.
- Ketrampilan harus meliputi resolusi konflik.
- Masukkan psikolog profesional dalam tim pelatihan manakala mungkin.

- Tanggapan emosional peserta jangan dicegah atau ditekan, tetapi harus dihadapi secara langsung.
- Ketahuilah bahwa asumsi-asumsi yang menantang bias menciptakan tanggapan emosional. Tekankan bahwa keraguan dan kebingungan menunjukkan adanya (proses) belajar.
- Pelatih harus menghindari perdebatan dengan peserta dan menunjukkan penghormatan terhadap semua pendapat.
- Latih orang-orang muda untuk melakukan pendidikan terhadap teman sebaya (misalnya mahasiswa mengajar siswa SLTA)
- Sediakan pelatihan dan evaluasi yang teratur dan terus-menerus.
- Pertahankan jaringan peserta. Kegiatan Pendidikan HAM masing-masing harus diinformasikan kepada semua.
- Masukkan rencana aksi pengembangan individu sebagai bagian dari pelatihan untuk menjamin adanya penerapan hasil belajar.
- Tingkatkan kapasitas lembaga melalui kapasitas individu.
- Ciptakan jaringan para pelatih.
- Masukkan ketrampilan untuk menyesuaikan bahan-bahan dan metode terhadap situasi dan kebutuhan yang berbeda.
- Metodologi pelatihan harus merupakan contoh metodologi yang akan digunakan oleh peserta
- Pelatih butuh belajar untuk mengembangkan bahan-bahan dan kegiatannya sendiri untuk secara khusus memenuhi kebutuhan peserta pelatihannya.

#### **Indikator-indikator**

- Peserta membuat rencana aksi dan melaksanakannya secara efektif setelah pelatihan.
- Penggunaan peserta pelatihan dalam pelatihan-pelatihan di masa yang akan datang.
- Pelatihan memberi dampak bagi lembaga si peserta.
- Adanya permintaan pelatihan tambahan dan lebih khusus.

#### **Evaluasi**

- Kembangkan alat evaluasi yang sesuai dengan budaya (lisan dan tulisan).
- Evaluasi proses pelatihan selain hasilnya.

#### **Pelatihan HAM Perempuan**

##### **Panduan**

- Tekankan “universalitas” HAM perempuan.
- Tekankan bahwa CEDAW adalah standard untuk mengukur komitmen pemerintah.
- Pelatihan tidak boleh terbatas hanya pada CEDAW tetapi harus meliputi seluruh konvensi HAM.
- Ajarkan pendekatan riset untuk membangun data bagi advokasi.
- HAM perempuan didekati sebagai isu non-diskriminatif, selain isu hukum.

- Pelatihan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana strategis jangka panjang akan memiliki dampak yang jauh lebih besar.
- Libatkan laki-laki dalam perencanaan dan pelatihan, juga sebagai peserta.
- Cari jalan untuk mempengaruhi dan melatih orang-orang muda tentang HAM perempuan.
- Gunakan media massa untuk menjangkau pendengar perempuan; terutama tentang pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan isu-isu sensitive lainnya.
- Pilih judul pelatihan secara berhati-hati untuk menghindari adanya pembentukan konsep-konsep yang salah (*misconceptions*).
- Dorong sekolah-sekolah dan universitas untuk memasukkan HAM perempuan dalam kurikulum dan riset dan perkuat hubungan mereka dengan ORNOP perempuan.
- Bangun jaringan ORNOP perempuan antar wilayah, terutama untuk berbagi bahan-bahan pelatihan dan pengalaman.
- Bangun jaringan ORNOP yang bekerja dalam pelatihan hak-hak perempuan.
- Tekankan hak-hak ekonomi.
- Gunakan bahasa yang umum/biasa dalam pelatihan.
- Perempuan tanpa pendidikan atau latar belakang HAM dapat memperkenalkan sudut pandang dan keprihatinan yang berharga.
- Cari jalan untuk memasukkan perempuan yang terpinggirkan (*ter-marginalisasi*); terutama dari daerah miskin dan pinggiran.

#### **Indikator-indikator**

- Pendidikan HAM untuk perempuan dan menghasilkan advokasi yang membawa perubahan dalam hukum, kebijakan dan lembaga-lembaga.
- Advokasi yang berhasil dengan pemerintah dan pembuat kebijakan dalam satu Negara dapat membawa pengaruh positif pada negara-negara lain.
- Tingkatkan kemitraan diantara ORNOP perempuan dan pemerintah untuk memperbaiki HAM perempuan.
- Kerjasama antara ORNOP pendidikan HAM, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang berpengaruh (Media, Pendidikan...)

#### **Evaluasi**

- Teknik-teknik evaluasi yang menjamin kerahasiaan yang kemudian juga menjamin bahwa tidak akan ada pengaruh.
- Teknik yang mengatasi resistensi budaya sampai kritik-kritik.
- Wawancara pribadi.
- Evaluasi eksternal.
- Perempuan dalam situasi paska konflik membutuhkan perlakuan khusus.

## Penggunaan Teknologi Informasi Modern (Teknologi Informasi Komunikasi = TIK)

### Panduan

- Gunakan TIK untuk menyebar luaskan bahan-bahan pelatihan dan pendidikan (biasa digunakan di banyak wilayah dan bahasa).
- Gunakan TIK sebagai alat untuk dokumentasi dengan menggunakan pangkalan data (*database*), arsip elektronik, dokumentasi bahan-bahan tentang hukum.
- Gunakan TIK untuk pemantauan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM (urgent alert) melalui dokumentasi kasus-kasus, laporan dan statistik.
- Gunakan TIK untuk komunikasi: (i) (dengan moderator) milis (*listservs*) dan kelompok diskusi *on-line* menyatukan kelompok-kelompok yang tertarik pada isu tertentu dan memungkinkan pertukaran informasi langsung; (ii) dukung jaringan dengan kesempatan untuk bertemu dan bekerja melalui kelompok elektronik (*e-groups*) atau *Intranets* dari sebuah situs web; (iii) kampanye *on-line* tentang atau memperjuangkan sebuah isu atau kasus dapat menciptakan tekanan politis.
- Gunakan TIK untuk belajar *on-line* atau belajar jarak jauh, yang sebenarnya sangat berguna bagi kelanjutan pendidikan untuk kelompok-kelompok profesional. Belajar jarak jauh juga memiliki banyak kegunaan potensial dalam kelanjutan pendidikan untuk kelompok profesional dan dalam persiapan untuk atau sebagai tindak lanjut terhadap kursus-kursus HAM yang ditawarkan oleh universitas atau organisasi HAM. Beberapa universitas telah menggunakan bimbingan *on-line* sebagai persiapan peserta kursus musim panas dan membuat mereka memiliki tingkat pengetahuan yang sama sebelum kursus dimulai.
- Gunakan teknologi seperti internet untuk pendekatan pendidikan khusus, seperti studi kasus, simulasi atau kuis.
- Gunakan TIK untuk menjangkau banyak kelompok sasaran (siswa SLTA dan SLTP; guru-guru; universitas; kelompok-kelompok profesional).
- Buat *CD-ROM* untuk memudahkan akses pada data-data yang berjumlah besar seperti kasus hukum, koleksi hukum-hukum HAM, dll.
- Gunakan TIK untuk menciptakan komunitas maya aktif, pendidik dan kelompok profesional lainnya, yang dapat berbagi informasi dan pelajaran dan sebagai akibatnya dapat meningkatkan mutu pekerjaan mereka.
- Gunakan TIK untuk menjangkau pelajar yang belum pernah dijangkau sebelumnya, secara geografis dan dalam istilah kelompok sasaran (contoh, publik secara luas, siswa SLTA dalam jumlah yang lebih besar dan menggunakan berbagai bahasa yang berbeda, dan beberapa kelompok profesional). Tetapi ingatlah bahwa ada yang saat ini tidak memiliki akses kepada teknologi informasi modern.

### Indikator-indikator

- Tersedianya sejumlah besar data kuantitatif seperti statistik situs web, data tentang penggunaan dokumen, jumlah pendaftar pada sebuah milis, dll.
- Penerapan belajar jarak jauh yang ada di internet tinggi.

- Komunitas maya yang berfungsi dari para aktifis, pendidik dan kelompok-kelompok profesional meluas secara cepat.
- Penggunaan pangkalan data yang meningkat dan banyak organisasi saat ini yang memiliki situs web lembaga.

### **Evaluasi**

- Metode evaluasi – walaupun tidak biasa, seperti juga di berbagai wilayah lain dari pendidikan HAM – yang mirip, walaupun sifat teknologi yang memungkinkan adanya koleksi data kuantitatif yang lebih.
- TIK memungkinkan adanya umpan balik berkala atau langsung. Banyak teknologi informasi yang baru memiliki keluwesan dalam penerapannya untuk pendidikan HAM dan kegiatan HAM dalam konteks yang berbeda dan untuk pelajar yang berbeda.
- TIK biasanya fleksibel. Dapat dengan mudah direvisi, disesuaikan dan diterjemahkan.

## **PANDUAN UMUM**

### **PERENCANAAN**

- Konsultasikan riset di seluruh wilayah pendidikan HAM, terutama dampak.
- Perencanaan itu penting: menilai kebutuhan, menentukan prioritas dan tujuan, strategi-strategi pelaksanaan, dan alat evaluasi, tindak lanjut.
- Ambil keuntungan dari iklim social dan politik yang berpihak pada HAM.
- Proyek percobaan (*Pilot Project*) sebelum melaksanakannya.
- Dorong perencanaan regional dalam pendidikan HAM.

### **BAHAN-BAHAN**

- Sediakan dalam berbagai bahasa daerah.
- Sesuaikan bahan-bahan dari budaya yang berbeda ke budaya dan kondisi lokal.
- Uji percobaan (*Pilot-test*) untuk efektifitas dan relevansi.
- Untuk mengembangkan bahan-bahan, adalah penting untuk menyelidiki sumber daya yang ada.

### **ISI**

- Korban pelanggaran HAM butuh untuk mempelajari penggunaan mekanisme-mekanisme untuk menyampaikan pengalamannya – kondisi emosional peserta membutuhkan kepekaan khusus.
- Hubungkan konteks lokal, nasional dan internasional.

### **METODOLOGI**

- Gunakan beragam metode untuk mempengaruhi pembelajaran kognitif dan efektif ((misalnya, drama, bercerita, seni, bermain peran, simulasi).
- Bangun kolaborasi pelatihan dengan psikolog dan antropolog untuk menanggapi aspek-aspek psiko-sosial.

- Pelatih harus mencerminkan nilai-nilai HAM dalam perilakunya dan metode-metode pelatihan.
- Gunakan metodologi belajar dari pengalaman yang diawali dari kebutuhan dan keprihatinan peserta.
- Tegaskan bahwa keragaman pendapat harus dihormati.

#### TINDAK LANJUT

- Cari jalan untuk mempertahankan motivasi fasilitator dan pelajar/peserta dengan tindak lanjut dan dorongan yang sistimatis.
- Jaringan kerja regional dan internasional dan pembangunan koalisi adalah hal yang penting untuk mengembangkan pendidikan HAM.
- Pelatihan harus berkelanjutan.

#### EVALUASI

- Berdasarkan pengamatan perilaku dan sikap individu, dan menguji pengetahuan dan ketrampilan.
- Rencanakan dan kumpulkan data dari awal program; terutama analisa dampak



### **Lampiran 3: Komentar Umum No. 16 (2005), Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – Kesetaraan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan Atas Penikmatan Semua Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Sumber:

[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/7c6dc1dee6268e32c125708f0050dbf6?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/7c6dc1dee6268e32c125708f0050dbf6?Opendocument)

#### **Pengantar**

1. Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan atas penikmatan semua hak asasi manusia adalah salah satu dari prinsip-prinsip fundamental yang diakui oleh hukum internasional dan dilindungi di dalam instrumen-instrumen internasional utama hak asasi manusia. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) melindungi hak asasi manusia yang fundamental bagi martabat setiap manusia. Pasal 3 dari Kovenan ini secara khusus memberikan jaminan bagi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak yang dilindungi di dalam Kovenan tersebut. Provisi ini dapat ditemukan pada pasal 1 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Provisi yang sama ditemukan juga pada pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), kecuali yang mengacu pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), yang keduanya dirancang pada saat yang sama.

2. *Travaux préparatoires* (pekerjaan persiapan yang mengindikasikan semua dokumen suatu perjanjian yang sedang dibuat untuk menginterpretasikan perjanjian tersebut) menyatakan bahwa pasal 3 dimasukkan ke dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) sebagaimana juga dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) untuk menunjukkan bahwa selain pelarangan terhadap diskriminasi, “hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan harus diakui secara nyata atas dasar yang sama dan oleh karenanya harus diambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak-hak mereka... Selanjutnya, walaupun pasal 3 bertumpang tindih dengan pasal 2 ayat 2, penegasan kembali kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan tetap menjadi penting. Prinsip fundamental yang dilindungi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini harus terus-menerus ditekankan, terutama karena masih banyak prasangka-prasangka yang menghambat pelaksanaannya secara penuh”.<sup>i</sup> Tidak seperti halnya pasal 26 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), pasal 3 dan pasal 2 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) bukan merupakan provisi-provisi yang berdiri sendiri-sendiri. Pasal-pasal tersebut harus dibaca bersamaan dengan setiap hak yang secara spesifik dijamin dalam Bagian III dari Kovenan tersebut.

3. Pasal 2 ayat 2 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) memberikan jaminan atas prinsip nondiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, di samping berdasarkan hal-hal lainnya. Provisi ini, dan jaminan atas penikmatan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 3,

berhubungan secara integral dan saling menguatkan. Kemudian, penghapusan terhadap diskriminasi adalah dasar bagi penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan prinsip kesetaraan.

4. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah memperhatikan secara khusus faktor-faktor yang memberikan pengaruh negatif terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan atas penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam berbagai komentar umumnya, termasuk komentar umum tentang hak atas perumahan yang layak,<sup>ii</sup> hak atas makanan yang cukup,<sup>iii</sup> hak atas pendidikan,<sup>iv</sup> hak atas kesehatan,<sup>v</sup> dan hak atas air.<sup>vi</sup> Komite juga secara berkala meminta informasi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak-hak yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) dalam daftarnya tentang persoalan-persoalan berkaitan dengan laporan Negara-negara Pihak dan pada saat melakukan dialog dengan Negara-negara Pihak.

5. Perempuan sering mengalami penyangkalan terhadap penikmatan yang setara atas hak asasi mereka, khususnya karena mereka diberikan status yang lebih rendah oleh tradisi dan kebiasaan, atau sebagai akibat dari diskriminasi yang bersifat eksplisit (*overt*) maupun implisit (*covert*). Banyak perempuan mengalami bentuk-bentuk diskriminasi yang berbeda karena saling-berpotongan (*intersection*) antara jenis kelamin dengan faktor-faktor lain seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lainnya seperti umur, etnisitas, kecacatan, status perkawinan, status pengungsi atau pekerja migran, yang menyebabkan kerugian yang bersifat kompleks.<sup>vii</sup>

## I. KERANGKA KONSEPTUAL

### A. Kesetaraan

6. Inti dari pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) adalah bahwa hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan ini harus dinikmati oleh laki-laki dan perempuan atas dasar kesetaraan, yaitu suatu konsep yang mengandung pengertian yang substantif. Sementara pernyataan kesetaraan secara formal dapat ditemukan dalam provisi-provisi konstitusional, peraturan dan kebijakan Pemerintah, pasal 3 juga memberikan mandat bagi penikmatan hak-hak dalam Kovenan ini oleh laki-laki dan perempuan secara setara dalam kenyataan atau praktiknya.

7. Penikmatan hak asasi manusia berdasarkan atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus dipahami secara komprehensif. Jaminan atas prinsip nondiskriminasi dan prinsip kesetaraan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional memberikan mandate untuk kesetaraan secara *de facto* maupun kesetaraan secara *de jure*. Kesetaraan secara *de jure* (atau formal) berbeda dengan kesetaraan secara *de facto* (atau substantif), tetapi keduanya merupakan konsep yang saling berhubungan. Kesetaraan formal mengasumsikan bahwa kesetaraan dapat dicapai jika hukum atau kebijakan memperlakukan laki-laki dan

perempuan secara netral. Sebagai tambahannya, kesetaraan substantif memperhatikan dampak dari hukum, kebijakan, dan praktik-praktik tersebut, serta menjamin bahwa hukum, kebijakan, dan praktik-praktik tersebut tidak mempertahankan, tetapi justru mengurangi, ketidakseimbangan yang inheren yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu.

8. Kesetaraan laki-laki dan perempuan secara substantif tidak bisa dicapai hanya dengan diberlakukannya hukum atau diadopsinya kebijakan yang secara nyata bersifat gender-netral. Dalam melaksanakan pasal 3, Negara-negara Pihak harus mempertimbangkan bahwa hukum, kebijakan, dan praktik-praktik semacam itu dapat saja gagal dalam memberikan perhatian kepada persoalan ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan, atau bahkan justru menyebabkan terjadinya ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan, karena hukum, kebijakan, dan praktik tersebut tidak mempertimbangkan ketidak-setaraan yang sudah ada dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya yang dialami oleh perempuan.

9. Berdasarkan pasal 3, Negara-negara Pihak harus menghormati prinsip kesetaraan dalam hukum dan di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan dalam hukum harus dihormati oleh para pembuat undang-undang ketika akan mengadopsi hukum dengan menjamin bahwa undang-undang tersebut akan meningkatkan penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya laki-laki dan perempuan secara setara. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus dihormati oleh badan-badan administratif dan pengadilan, serta hal ini juga berarti bahwa pihak yang berwenang harus menerapkan hukum secara setara bagi laki-laki dan perempuan.

## **B. Nondiskriminasi**

10. Prinsip nondiskriminasi adalah dampak dari prinsip kesetaraan. Berdasarkan apa yang dinyatakan dalam paragraf 15 di bawah ini mengenai langkah-langkah khusus yang bersifat temporal, prinsip ini melarang perlakuan yang berbeda terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan status atau situasi khusus mereka, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya, seperti umur, etnisitas, kecacatan, status perkawinan, status pengungsi atau pekerja migran.

11. Diskriminasi terhadap perempuan adalah “pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya”.<sup>viii</sup> Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dapat didasarkan pada perlakuan yang berbeda terhadap perempuan karena kondisi biologis mereka, seperti penolakan untuk mempekerjakan perempuan karena mereka dapat hamil; atau asumsi-asumsi stereotipe seperti memperdagangkan perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan yang rendah tingkatannya dengan asumsi bahwa perempuan tidak ingin memberikan komitmen waktu terhadap pekerjaannya seperti halnya laki-laki.

12. Diskriminasi secara langsung terjadi ketika perlakuan yang berbeda didasarkan secara langsung dan secara nyata pada perbedaan atas dasar jenis kelamin atau karakteristik laki-laki atau perempuan yang tidak bisa dijustifikasi secara objektif.

13. Diskriminasi yang tidak langsung terjadi ketika suatu undang-undang, kebijakan, atau program yang tidak terlihat diskriminatif tetapi ternyata memiliki dampak diskriminatif ketika diimplementasikan. Hal ini bisa terjadi misalnya, ketika perempuan tidak diuntungkan ketimbang laki-laki berkaitan dengan penikmatan atas kesempatan atau keuntungan tertentu karena sudah adanya ketidak-setaraan. Menerapkan suatu undang-undang yang jender-netral dapat menghapuskan ketidak-setaraan atau justru dapat memperburuk ketidak-setaraan.

14. Jender memberikan dampak terhadap hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak mereka. Jender mengacu pada pengharapan atau asumsi budaya tentang tingkah laku, sikap, karakter, dan kapasitas fisik dan intelektual laki-laki dan perempuan, yang hanya berdasarkan pada identitas mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Asumsi dan pengharapan yang berdasarkan jender pada umumnya menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan berkaitan dengan penikmatan hak-hak secara substantif, seperti kebebasan bertindak dan untuk diakui sebagai orang dewasa yang mandiri dan memiliki kemampuan, untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, dan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan keadaan dan kondisi mereka. Asumsi-asumsi berbasis jender tentang peran ekonomi, sosial, dan budaya menghambat terjadinya saling-berbagi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di semua bidang yang penting bagi kesetaraan.

### **C. Langkah-langkah khusus yang bersifat sementara (*temporary special measures*)**

15. Prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi tidak dengan sendirinya dan tidak cukup menjamin kesetaraan yang sesungguhnya. Terkadang dibutuhkan langkah-langkah khusus yang bersifat sementara (*temporary special measures*) untuk membawa posisi yang tidak menguntungkan atau untuk membawa orang-orang atau kelompok-kelompok yang termarginalisasi kepada tahapan substantif yang sama dengan kelompok lainnya. Langkah-langkah khusus yang bersifat sementara ini tidak hanya mengacu pada upaya merealisasikan kesetaraan *de jure* atau formal tetapi juga kesetaraan *de facto* atau substantif antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam menerapkan prinsip kesetaraan, Negara-negara pihak kadang-kadang dapat mengambil langkah-langkah yang mendukung perempuan untuk menghapuskan atau menekan kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Perbedaan semacam ini sah secara hukum selama langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki diskriminasi secara *de facto*, dan kemudian dapat dihapuskan ketika kesetaraan secara *de facto* sudah tercapai.<sup>ix</sup>

## II. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA PIHAK

### A. Kewajiban hukum secara umum

16. Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan keharusan dan kewajiban yang bersifat mendesak (*immediate obligation*) dari Negara-negara Pihak.<sup>x</sup>

17. Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti halnya hak-hak asasi manusia lainnya, memaksakan tiga tingkat kewajiban Negara-negara Pihak - yaitu, kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kemudian, kewajiban untuk memenuhi mengandung berbagai tugas untuk menyediakan, memajukan, dan memfasilitasi.<sup>xi</sup> Pasal 3 menyatakan suatu standar yang bersifat tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) untuk memenuhi kewajiban Negara-negara Pihak sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB).

### B. Kewajiban hukum yang spesifik

#### 1. Kewajiban untuk menghormati

18. Kewajiban untuk menghormati menuntut Negara-negara Pihak untuk menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan diskriminasi yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan penyangkalan terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Penghormatan atas hak mewajibkan Negara-negara Pihak untuk tidak mengadopsi, dan untuk mencabut dan menarik mundur kebijakan, langkah-langkah administratif, dan program yang tidak sesuai dengan hak yang dilindungi oleh pasal 3. Secara khusus, adalah tugas Negara-negara Pihak untuk mempertimbangkan dampak dari hukum, kebijakan, dan program yang bersifat jender-netral dan untuk mempertimbangkan apakah hukum, kebijakan, dan program tersebut akan mengakibatkan dampak negatif terhadap kemampuan laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak asasi mereka berdasarkan prinsip kesetaraan.

#### 2. Kewajiban untuk melindungi

19. Kewajiban untuk melindungi menuntut Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang ditujukan langsung pada penghapusan prasangka, kebiasaan, dan praktik-praktik lainnya yang menyebabkan munculnya konsepsi inferior atau superior dari kedua jenis kelamin tersebut, serta peran-peran stereotipe laki-laki dan perempuan. Kewajiban Negara-negara Pihak untuk melindungi berdasarkan pasal 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) antara lain termasuk, menghormati dan mengadopsi provisi-provisi konstitusional dan legislatif tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak asasi manusia dan pelarangan diskriminasi dalam bentuk apa pun; mengadopsi peraturan untuk menghapuskan diskriminasi dan untuk mencegah pihak-pihak ketiga mencampuri baik secara langsung maupun tidak langsung penikmatan hak-hak tersebut; mengadopsi langkah-langkah dan program-

program administratif, dan juga membentuk institusi publik, lembaga, dan program untuk melindungi perempuan dari diskriminasi.

20. Negara-negara Pihak memiliki kewajiban untuk memonitor dan meregulasi tingkah laku aktor non-negara untuk menjamin bahwa mereka tidak melanggar prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Kewajiban ini berlaku misalnya, dalam kasus-kasus dimana pelayanan publik telah secara sebagian atau seluruhnya diprivatisasi.

### 3. Kewajiban untuk memenuhi

21. Kewajiban untuk memenuhi menuntut Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang menjamin bahwa laki-laki dan perempuan menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka berdasarkan prinsip kesetaraan di dalam praktik. Langkah-langkah tersebut harus termasuk:

- Memberikan remedi yang layak, seperti kompensasi, reparasi, restitusi, rehabilitasi, jaminan non-repetisi (bahwa peristiwa tersebut tidak akan terulang kembali), deklarasi, permintaan maaf secara publik, program pendidikan dan program pencegahan ;
- Membangun tempat-tempat yang layak untuk perbaikan seperti pengadilan atau mekanisme administratif yang dapat diakses oleh semua orang berdasarkan prinsip kesetaraan, termasuk oleh orang miskin dan yang sangat tidak beruntung serta laki-laki dan perempuan yang termarginalisasi;
- Membangun mekanisme monitoring untuk menjamin bahwa implementasi hukum dan kebijakan yang ditujukan untuk memajukan kesetaraan dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh laki-laki dan perempuan tidak memiliki dampak negatif yang tidak diperkirakan sebelumnya atau merugikan atau memarginalisasi individu atau kelompok tertentu, terutama perempuan dan anak-anak perempuan;
- Merancang dan melaksanakan kebijakan dan program yang memberikan dampak jangka panjang bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan. Hal ini termasuk mengadopsi langkah-langkah khusus yang bersifat sementara (*temporary special measures*) untuk mempercepat terciptanya penikmatan yang setara bagi perempuan atas hak-hak mereka, auditing jender, dan alokasi sumber-sumber daya yang bersifat jender-spesifik;
- Melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia untuk para hakim dan petugas-petugas publik;
- Melaksanakan program-program penyuluhan dan pelatihan tentang prinsip kesetaraan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat akar-rumput (*grass-root*);
- Mengintegrasikan prinsip kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal, serta mendorong partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan di sekolah-sekolah dan program-program pendidikan lainnya;

- Memajukan representasi yang setara antara laki-laki dan perempuan di kantor-kantor publik dan badan-badan pengambil keputusan;
- Mendorong partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan pembangunan, dan pembagian keuntungan pembangunan serta semua program yang berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

### **C. Contoh-contoh spesifik dari kewajiban Negara-negara Pihak**

22. Pasal 3 adalah kewajiban yang saling bersinggungan dan berlaku untuk semua hak yang terkandung dalam pasal 6 sampai pasal 15 Kovenan. Hal tersebut menuntut diberikannya perhatian terhadap prasangka sosial dan budaya yang berdasarkan jender, diberikannya kesetaraan dalam alokasi sumber-sumber daya, dan didorongnya konsep tanggung jawab bersama dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan publik. Contoh-contoh pada paragraf berikut ini dapat digunakan sebagai panduan yang sesuai dengan pasal 3 yang berlaku bagi hak-hak lain dalam Kovenan, tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi sempurna.

23. Pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk menjamin hak setiap orang atas kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan hak ini. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 6 antara lain menuntut, bahwa dalam hukum dan dalam praktiknya, laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan-pekerjaan di semua tingkatan dan semua jenis pekerjaan, serta bahwa pelatihan kejuruan dan program-program panduan baik di sektor publik maupun swasta menyediakan keterampilan, informasi, dan pengetahuan yang diperlukan oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keuntungan yang sama dari hak atas pekerjaan.

24. Pasal 7 (a) dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi yang adil dan layak dalam bekerja dan untuk menjamin, diantaranya, upah yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Pasal 3 berkaitan dengan pasal 7 antara lain menuntut Negara-negara Pihak untuk mengidentifikasi dan menghapuskan penyebab-penyebab mendasar dari perbedaan upah, seperti evaluasi pekerjaan yang jender-bias atau persepsi bahwa ada perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Negara-negara Pihak harus memonitor kesesuaian pelaksanaannya oleh sektor swasta dengan peraturan nasional tentang kondisi-kondisi pekerjaan melalui suatu inspektorat tenaga kerja yang berfungsi secara efektif. Negara Pihak harus mengadopsi peraturan yang menyatakan tentang pertimbangan yang setara dalam hal promosi, kompensasi di luar gaji, dan kesempatan serta dukungan yang setara terhadap pengembangan pelatihan kejuruan dan profesional di tempat kerja. Yang terakhir, Negara Pihak harus mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dalam merekonsiliasi tanggung jawab profesional dan

keluarga melalui pemajuan kebijakan yang layak tentang perawatan anak (*childcare*) dan perawatan atas anggota keluarga yang masih bergantung.

25. Pasal 8 ayat 1 (a) dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk menjamin hak bagi setiap orang untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh pilihannya sendiri. Pasal 3 berkaitan dengan pasal 8 menuntut bahwa laki-laki dan perempuan harus diperkenankan untuk berorganisasi dan bergabung dengan serikat pekerja yang menangani persoalan-persoalan khusus mereka. Berkaitan dengan hal ini, perhatian khusus harus diberikan kepada mereka yang seringkali dirampas haknya, seperti pekerja domestik, perempuan pedesaan, perempuan yang bekerja di industri yang didominasi oleh perempuan, dan perempuan yang bekerja di rumah.

26. Pasal 9 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan hak atas akses terhadap pelayanan sosial. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 9 antara lain menuntut penyetaraan usia pensiun yang diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan; jaminan bahwa perempuan menerima keuntungan yang sama dari skema pensiun publik dan swasta; dan jaminan cuti melahirkan bagi perempuan, cuti paternal bagi laki-laki, dan cuti orang-tua baik untuk laki-laki maupun perempuan.

27. Pasal 10 ayat 1 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk mengakui bahwa perlindungan dan bantuan yang sebesar-besarnya harus diberikan kepada keluarga, dan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan memilih (*free consent*) dari pihak-pihak yang menikah. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 10 antara lain menuntut Negara-negara Pihak untuk menyediakan akses terhadap rumah-aman, remedi dan perbaikan atas kerusakan fisik, mental, dan emosional bagi korban-korban kekerasan domestik yang utamanya adalah perempuan; untuk menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memilih apakah akan, dengan siapa, dan kapan akan menikah – secara khusus, usia legal untuk menikah harus sama bagi laki-laki dan perempuan, serta bahwa anak laki-laki dan anak perempuan harus sama-sama dilindungi dari praktik-praktik yang mendorong pernikahan anak-anak, pernikahan yang tidak dihadiri oleh mempelai wanita (*marriage by proxy*), atau pernikahan paksa; serta untuk menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama terhadap properti dan warisan hasil pernikahan setelah suaminya meninggal. Kekerasan berbasis gender merupakan suatu bentuk diskriminasi yang menghambat kemampuan untuk menikmati hak dan kebebasan berdasarkan prinsip kesetaraan, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menghapuskan kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan dalam rangka mencegah, menyelidiki, memediasi, menghukum, dan memperbaiki tindakan-tindakan kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh aktor-aktor privat.

28. Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk perumahan yang layak (ayat 1) dan makanan yang cukup (ayat 2). Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 11 ayat 1 mewajibkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, atau setidaknya mengontrol perumahan, tanah, dan properti atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, serta untuk mengakses sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 11 ayat 2 juga antara lain mewajibkan Negara-negara Pihak untuk menjamin bahwa perempuan memiliki akses untuk atau kontrol terhadap cara produksi makanan, serta bahwa Negara-negara Pihak harus memberikan perhatian secara aktif terhadap praktik-praktik kebiasaan yang menyebabkan perempuan tidak bisa makan sampai pihak laki-laki telah selesai makan, atau perempuan hanya diperkenankan makan makanan yang kurang bergizi.<sup>xii</sup>

29. Pasal 12 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk melakukan langkah-langkah menuju pemenuhan secara penuh hak setiap orang atas penikmatan standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 12 mewajibkan seminimum-minimumnya penghapusan hambatan-hambatan hukum dan lainnya yang mencegah laki-laki dan perempuan untuk mengakses dan memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip kesetaraan. Hal ini termasuk, antara lain, memberikan perhatian kepada cara-cara di mana peran jender mempengaruhi akses terhadap faktor-faktor penentu kesehatan seperti air dan makanan; penghapusan pembatasan-pembatasan legal terhadap provisi mengenai hak reproduksi; pelarangan terhadap mutilasi genital; dan adanya provisi tentang pelatihan yang layak bagi pekerja pelayanan kesehatan dalam menangani persoalan-persoalan kesehatan perempuan.<sup>xiii</sup>

30. Pasal 13 ayat 1 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) meminta Negara-negara Pihak untuk mengakui hak setiap orang atas pendidikan dan ayat 2 (a) memerintahkan bahwa pendidikan dasar harus diwajibkan dan bebas biaya untuk semua. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 13 antara lain mewajibkan adopsi peraturan dan kebijakan yang menjamin kriteria penerimaan yang sama bagi anak laki-laki dan anak perempuan di semua tingkatan pendidikan. Negara-negara Pihak harus menjamin, khususnya melalui kampanye-kampanye informasi dan peningkatan kesadaran, bahwa keluarga-keluarga berhenti memberikan perlakuan yang prefensial bagi anak laki-laki ketika mengirimkan anak-anaknya ke sekolah, serta menjamin bahwa kurikulum harus memajukan kesetaraan dan nondiskriminasi. Negara-negara Pihak harus menciptakan kondisi yang konstruktif untuk menjamin keselamatan anak-anak, terutama anak perempuan, dalam perjalanan mereka ke dan dari sekolah.

31. Pasal 15 ayat 1 (a) dan (b) dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) meminta Negara-negara Pihak untuk mengakui hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan untuk

menikmati keuntungan dari perkembangan ilmiah. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 15 ayat 1 (a) dan ayat (b) antara lain mewajibkan dilakukannya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan institusional dan lainnya, seperti hambatan-hambatan yang berdasarkan pada tradisi budaya dan agama, yang mencegah partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan budaya, pendidikan keilmuan, dan penelitian ilmiah, serta diarahkannya sumber-sumber daya untuk penelitian ilmiah berkaitan dengan kebutuhan kesehatan dan ekonomi perempuan berdasarkan pada kesetaraan dengan laki-laki.

### III. PELAKSANAAN DI TINGKAT NASIONAL

#### A. Kebijakan dan strategi

32. Cara dan sarana yang paling layak dalam melaksanakan hak berdasarkan pasal 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) akan bervariasi antara satu Negara Pihak dengan lainnya. Setiap Negara Pihak memiliki penilaian sendiri dalam mengadopsi langkah-langkah yang cukup dalam melaksanakan kewajiban yang bersifat mendesak dan utama, serta dalam menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Negara-negara Pihak antara lain harus mengintegrasikan strategi-strategi yang layak untuk menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budayanya dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia.

33. Strategi-strategi tersebut harus didasarkan pada identifikasi sistematis dari kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan dengan situasi dan konteks di dalam Negara, sebagaimana berasal dari isi normatif pasal 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) dan dinyatakan secara jelas berkaitan dengan tingkatan dan sifat alamiah dari kewajiban Negara-negara Pihak sebagaimana yang dirujuk dalam paragraph 16 sampai 21 di atas. Strategi-strategi harus memberikan perhatian khusus bagi penghapusan diskriminasi dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

34. Negara-negara Pihak harus secara berkala meninjau ulang peraturan, kebijakan, strategi, dan program yang ada berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengadopsi perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa peraturan, kebijakan, strategi, dan program tersebut berkesesuaian dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan pasal 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB).

35. Adopsi langkah-langkah khusus yang bersifat sementara mungkin diperlukan untuk mempercepat penikmatan semua hak ekonomi, sosial, dan budaya secara setara oleh perempuan, serta untuk memperbaiki posisi *de facto* perempuan.<sup>xiv</sup> Langkah-langkah khusus yang bersifat sementara harus dibedakan dari kebijakan dan strategi permanen yang diambil untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

36. Negara-negara Pihak didorong untuk mengadopsi langkah-langkah khusus yang bersifat sementara dalam rangka mempercepat pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak-hak yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dianggap diskriminatif karena langkah-langkah tersebut didasarkan pada kewajiban Negara-negara Pihak untuk menghapuskan ketidak-beruntungan yang disebabkan oleh peraturan, tradisi, dan praktik masa lalu yang bersifat diskriminatif. Sifat, jangka waktu, dan pelaksanaan dari langkah-langkah tersebut harus dirancang dengan merujuk pada persoalan dan konteks yang spesifik, dan harus disesuaikan sebagaimana dibutuhkan oleh keadaan. Hasil dari langkah-langkah tersebut harus dimonitor dengan pandangan bahwa langkah-langkah tersebut harus dihentikan ketika tujuan yang menjadi alasan langkah-langkah tersebut diambil telah dicapai.

37. Hak individu dan kelompok individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pengembangan mereka harus menjadi suatu komponen yang integral dalam setiap kebijakan, program, atau kegiatan yang dibuat untuk membebaskan kewajiban pemerintah berdasarkan pasal 3 dari Kovenan.

#### **B. Perbaikan dan akuntabilitas**

38. Kebijakan dan strategi nasional harus menyediakan suatu pembentukan mekanisme dan institusi yang efektif, ketika mekanisme dan institusi semacam ini tidak ada, termasuk otoritas administrasi, ombudsmen, dan institusi nasional hak asasi manusia lainnya, serta pengadilan. Institusi-institusi ini harus melakukan investigasi dan menangani pelanggaran yang diasumsikan berkaitan dengan pasal 3 dan menyediakan perbaikan/jawaban (*remedy*) bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Negara-negara Pihak, sebagai bagiannya, harus menjamin bahwa perlakuan semacam itu dilaksanakan secara efektif.

#### **C. Indikator dan batasan**

39. Kebijakan dan strategi nasional harus mengidentifikasi indikator dan batasan yang tepat terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budayanya dalam rangka memantau secara efektif pelaksanaan kewajiban Negara Pihak berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Diperlukan statistik yang tidak bersifat kolektif yang disediakan dalam kerangka waktu tertentu, untuk mengukur pemenuhan secara bertahap hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh laki-laki dan perempuan.

### **IV. PELANGGARAN**

40. Negara-negara Pihak harus memenuhi kewajiban yang bersifat mendesak dan utama untuk menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka

41. Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah fundamental bagi penikmatan setiap hak yang dinyatakan secara spesifik dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Kegagalan untuk

menjamin kesetaraan secara formal dan substantif dalam penikmatan hak apa pun merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut. Penghapusan diskriminasi secara *de jure* maupun *de facto* dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kegagalan untuk mengadopsi, melaksanakan, dan memonitor dampak-dampak dari hukum, kebijakan, dan program untuk menghilangkan diskriminasi secara *de jure* dan *de facto* berkaitan dengan hak-hak yang tercantum dalam pasal 6 sampai pasal 15 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

42. Pelanggaran terhadap hak-hak yang termuat dalam Kovenan dapat terjadi melalui tindakan langsung, kegagalan untuk bertindak (*by omission*) oleh Negara-negara Pihak, atau melalui institusi atau agen-agen mereka di tingkat nasional dan lokal. Adopsi dan pelaksanaan langkah-langkah apa pun yang bersifat regresif yang mempengaruhi kesetaraan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak yang dicantumkan dalam Kovenan merupakan pelanggaran terhadap pasal 3.

<sup>i</sup> Draft Kovenan Internasional tentang Laporan Hak Asasi Manusia kepada Komite Tiga. A/53/65 (17 Desember 1962), paragraf 85.

<sup>ii</sup> Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (seterusnya disebut CESCR), komentar umum No. 4 (1991): Hak atas perumahan yang layak (pasal 11, ayat 1 dari Kovenan) paragraf 6; komentar umum No. 7 (1997): Hak atas perumahan yang layak (pasal 11, ayat 1 dari Kovenan): Pengurusan, paragraf 10.

<sup>iii</sup> CESCR, komentar umum No. 12 (1999): Hak atas makanan yang layak (pasal 11 dari Kovenan), paragraf 26.

<sup>iv</sup> CESCR, komentar umum No. 11 (1999): Perencanaan untuk pendidikan dasar (pasal 14 dari Kovenan), paragraf 3; komentar umum No. 13 (1999): Hak atas pendidikan (pasal 13 dari Kovenan), paras. 6 (b), 31 and 32.

<sup>v</sup> CESCR, komentar umum No. 14 (2000): Hak atas kesehatan dengan standar tertinggi (pasal 12 dari Kovenan), paragraf 18-22.

<sup>vi</sup> CESCR, komentar umum No. 15 (2000): Hak atas air (pasal 11 and 12 dari Kovenan), paragraf 13 dan 14.

<sup>vii</sup> Cf. Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, komentar umum XXV (2000): Dimensi yang berkaitan dengan jender dalam diskriminasi rasial.

<sup>viii</sup> Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

<sup>ix</sup> Tetapi, ada pengecualian terhadap prinsip umum ini: alasan-alasan yang spesifik terhadap seorang kandidat individu laki-laki dalam mengunggulkannya, yang harus dinilai secara obyektif dengan mempertimbangkan semua kriteria yang sesuai dengan kandidat-kandidat individual. Hal ini merupakan suatu persyaratan dari prinsip proporsionalitas.

<sup>x</sup> CESCR, komentar umum No. 3 (1990): Sifat kewajiban Negara-negara Pihak (pasal 2, ayat 2).

<sup>xi</sup> Berdasarkan komentar umum CESCR No. 12 and No. 13, kewajiban untuk memenuhi termasuk kewajiban untuk memfasilitasi dan kewajiban menyediakan. Dalam komentar umum tersebut, kewajiban untuk memenuhi juga termasuk kewajiban untuk mendorong penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

<sup>xii</sup> Contoh-contoh lain kewajiban dan pelanggaran yang mungkin terjadi dari pasal 3 berkaitan dengan pasal 11 (1) dan (2) didiskusikan lebih lanjut dalam komentar umum CESCR No. 12, paragraf 26.

<sup>xiii</sup> CESCR komentar umum No. 14, paragraf 18-21.

<sup>xiv</sup> Referensi diberikan dalam hal ini terhadap rekomendasi umum No. 25 tentang pasal 4, ayat 1 dari Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), komentar umum CESCR No. 13, dan Prinsip-prinsip Limburg tentang Implementasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.